

# LAPORAN AKHIR PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA (PEKKA) 2001-2004

## SEBUAH PENGANTAR Apa Kata Mereka Tentang Pekka

Paling tidak program ini telah diakui amat penting dan dibutuhkan sehingga mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan dalam masyarakat baik di tingkat lokal maupun nasional.

*"Kami bersama dengan tim pergi ke Desa Mutiara di Kabupaten Pidie, NAD beberapa tahun yang lalu. Dan kami duduk di mesjid di sana untuk berbicara dengan masyarakat. Dan muncul beberapa perempuan yang marah kepada saya. Mereka bilang kamu suka bicara tentang kemiskinan, tapi kami di sini ini cukup miskin tidak ada program untuk membantu kami. Dan saya membuat refleksi dan memang mereka benar. Ketika kembali ke Jakarta dan saya membuat penelitian, ada banyak desa seperti itu, semua bisa lihat yang miskin itu perempuan janda. Program lain tidak sampai ke mereka, oleh karena itu kami duduk bersama dengan orang dari Depdagri, Komnas Perempuan dan ibu Nani untuk pikir bersama kalau bisa bangun salah satu proyek baru khusus untuk ibu kepala keluarga".*  
(Scott Guggenheim, Bank Dunia Jakarta)

*"Kalau kita runut kembali dari awal, program pekka ini 'kan diadakan karena belajar dari belum optimalnya partisipasi kaum perempuan di dalam program PPK, kemudian dirancang program pekka ini untuk mencari pendekatan baru. Sekarang kita lihat ternyata hasilnya jauh berbeda, kelompok-kelompok perempuan memang terorganisir, ibu-ibu kepala keluarga ini lebih percaya diri, lebih termotivasi, lebih berani untuk berbicara di muka forum-forum. (Bito Wikantosa, Pimpro PPK)*

*"Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga atau disingkat PEKKA ini langka terjadi, karena bukan merupakan data perempuan yang diolah secara ilmiah statistik empiris valid dan bukan hanya uraian tentang kemiskinan. Melalui pekka kita mengenali, posisi perempuan kepala keluarga dan tantangan hidup mereka. Realitas hidup mereka belum banyak dikenal karena letak geografis, kondisi sosial budaya desa asalnya dan kondisi daerah konflik. Tetapi juga karena paradigma pembangunan yang ditetapkan telah menyebabkan bahwa ada penduduk miskin yang telah atau jarang disentuh oleh pemerintah pusat atau daerah".* (Prof. Dr. Saporinah Sadli, Guru Besar UI, Tokoh Nasional Perempuan)

*"Ini organisasi dari bawah dan memang berbeda dengan organisasi yang dari atas. Ini memang pada hakikatnya kan keluar dari bawah yang tidak terkontaminasi ideologi politik manapun. Kalau PPK itu kan sangat punya kepentingan politik. Semua kegiatannya itu sangat semu tidak riil seperti ini, karena ini 'kan lebih ke masalah yang sesungguhnya, bagaimana seseorang janda harus mandiri yang harus tegak berdiri dan harus mampu membiayai anak-anaknya sendiri dan itu telah dilakukan secara konkrit oleh Pekka" (Ahmad Tohari, Tokoh dan Budayawan Nasional)*

*"Ternyata orang-orang yang jadi pekka ada, berarti mereka-mereka yang hidup susah sekali kan. Ada yang tertindas karena keadaan, ada yang terpaksa berjuang sendirian untuk mencapai tujuan. Itu khan hebat sekali orang yang sudah terpuruk tanpa harapan lalu bangkit lagi dan survive dan mengajak kawan-kawan lain yang juga terpuruk yang tadinya tertindas sama sekali, itu kan hebat sekali. Saya nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka."* (Jajang C. Noer, Artis Ibukota, Tokoh Perfilman Nasional)

*"Fenomena single parent itu fenomena sosial yang lebih sering dianggap sebagai masalah sosial yang perlu dicari solusinya . Yang mendapat vonis adalah perempuannya, seringkali tanggungan anak juga pada perempuan. Persepsi sosial masih sering menempatkan bahwa laki-laki itu yang benar lalu kemudian menimpakan kesalahan pada perempuan itu begitu saja. Saya rasa sudah saatnya melakukan proses pencerahan bahwa ada persoalan-persoalan sosial yang harus kita cari solusinya. Mereka ini ternyata perempuan-perempuan hebat yang punya potensi keuletan dan perempuan yang mau bekerja keras"* (Khofifah Indar Parawansa, mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan, Anggota DPR)

*"Terus terang pekka ini sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para NGO, karena kita mendekonstruksi banyak hal. Misalnya kita mendekonstruksi tentang perempuan kepala keluarga. Bahwa dalam dokumen negara, statistik itu selalu mengacu kepada laki-laki sebagai kepala keluarga. Yang kedua itu ini mendobrak unit analisa. Selama ini dalam ilmu sosial dan ilmu antropologi unit analisisnya itu selalu keluarga, itu sebenarnya unit analisa itu tidak akurat sama sekali karena unit analisisnya itu adalah individu yang bisa berarti bisa laki-laki dan bisa perempuan. Jadi sangat impress dan saya sangat senang dengan kegiatan ini dan sangat penting saya kira"* (Natsir, anggota masyarakat, Jakarta)

*"Dari awalnya komnas perempuan sangat yakin bahwa ibu-ibu telah berjuang untuk menghidupkan keluarga. Oleh karena itulah Komnas perempuan mendukung adanya program pemberdayaan perempuan kepala keluarga. Perjuangan ibu-ibu ini adalah sebuah realita. Perjuangan ibu-ibu adalah perjuangan untuk menciptakan kehidupan tanpa kekerasan. Optimisme untuk menjadi kepala keluarga bukan hanya untuk diakui tapi harus diterima oleh masyarakat Indonesia".* (Samsidar, Pjs Sekjen Komnas Perempuan)

*"Saya optimis dengan program ini dan terus didampingi, akan membantu proses pengentasan kemiskinan di Klubagolit. Karena 70% warga sini tergolong keluarga prasejahtera. Dan kebanyakan memang perempuan kepala keluarga. Di lapangan mungkin belum maksimal, tapi dalam hal berkoperasi, desa yang menjadi sasaran pekka ini cukup berhasil. Ini dilihat dari kesadaran meminjam dan mengembalikan. Jadi saya kira jika program ini berjalan dengan baik, maka akan menjawab tantangan bahwa masyarakat Klubagolit miskin, sekaligus perempuan ditampilkan ke masyarakat dan menunjukkan bahwa mereka juga berperan dalam pembangunan, terutama pembangunan ekonomi".* (Dr. Yosef K, Camat Klubagolit, NTT)

*"Kalau menurut saya program itu bagus sekali membantu program ini membantu para janda yang telah ditinggal mati oleh suami nya dia berusaha bangkit untuk membantu ekonomi keluarganya, saya sendiri adanya program pekka ini sangat mendukung sekali khususnya di kecamatan Tanjung siang ini".* (Nita Bambang, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Tanjungsiang, Jawa Barat)

*“Bedanya Program Pekka dengan pola program yang lain dalam mendekati perempuan. Kita hanya menemani, kita hanya memfasilitasi, dengan beberapa materi yang tidak bersifat teknis seperti latihan visi misi kelompok, pelatihan manajemen kelompok, itulah yang saya pikir mereka butuhkan untuk meng-eksplor mencari apa di level teknis mereka butuhkan”.* (Diah Pitaloka, Pendamping Lapang Jawa Barat)

*“Manfaat forum wilayah pekka adalah ibu-ibu bisa dikenal di dalam masyarakat luas dan juga bisa dikenal di aparat kecamatan dan juga pemerintah. Bagi ibu-ibu yang belum masuk kelompok bisa tertarik, dan benar-benar kelompok ini yakin kuat, saya ingin juga. Padahal ada juga yang berkata saya juga diajak saya nggak mau saya ingin baik katanya. Ibu-ibu bisa menjalin jaring persaudaraan dan bisa menampilkan kegiatan-kegiatan yang telah dikerjakan di desa. Seperti kerajinan tangan itu bisa dinampakkan di masyarakat bahwa kami sudah bisa mengerjakan ini”.* (Irma Suryani, Kader Lokal NAD)

*“Program pekka ini kalau menurut saya sangat bagus. Sangat membantu, sangat kita rasakan manfaatnya. Karena sebelum ada pekka, kehidupan kita sebagai janda memang susah. Tapi setelah masuk pekka dan berkelompok, rasanya kita diperhatikan,. Jadi sangat bagus sekali dan kami mau mendukung program ini dan kami mau mensukseskannya karena kami tahu besar sekali manfaatnya”.* (Angela Fernandez, Anggota Pekka NTT)

*“Forum nasional pekka merupakan hal yang luar biasa yang mengangkat kami menyampaikan ke permukaan hal – hal yang selama ini dirasakan oleh kami sendiri. Kami sebenarnya seperti seorang laki-laki padahal kami adalah seorang ibu tapi juga harus merasa berkuasa untuk memikirkan apa yang dipikirkan oleh seorang laki-laki yang mencari nafkah”* (Kamsina, Kader Lokal NTT)

*“Menurut saya ini forum ini saya rasa sangat luar biasa karena ini baru pertama kali diadakan di sini. Kehadiran kami di sini ini untuk membagi suka dan duka, pengalaman dengan teman-teman yang lain yang selama ini kami tidak kenal mereka”.* (Fia Bunga, Anggota Pekka NTT)

*“Manfaat Pekka menurut saya sangat baik, dulunya sebelum kita berkelompok kita kan tidak pernah kumpul. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu kita pendam sendiri, tidak pernah dikeluarkan. Setelah berkelompok ternyata tidak sendirian lagi. Semua anggota kelompok mengalami juga seperti kita. Makanya manfaat yang sangat berarti dalam kehidupan saya itu, bahwa ternyata saya tidak sendiri. Saya anjurkan kepada mereka bahwa kita harus berjuang, kita harus bangkit dan bagaimana kita harus menghidupi anak kita dan bagaimana kita memperjuangkan kehidupan kita tanpa suami”.* (Suna’ah, Kader Lokal NTB)

*“Saya berpikir bisa membentuk satu persatuan dengan adanya kelompok ini. Kenyataan itu yang saya rasakan betul. Saya bisa akrab dengan mereka .Yang dulunya tidak akrab sekarang saya bisa kenal sama mereka. Seandainya tidak ada kelompok pekka ini saya tidak bisa kenal dengan mereka. Walaupun kita ketemu di jalan pasti kita tidak bisa tegur mereka. Tapi sekarang kalo ketemu pasti ditanya mau pergi kemana, mau kerja apa, jadi kita senang”.* (Martha, anggota kelompok pekka Malut)

Memang, yang terjadi di lapangan tidak selalu indah, banyak juga tantangan yang cukup serius yang dihadapi.

*"Persoalan kami di sana, ibu-ibu janda itu sebelum ada pekka kurang diperhatikan. Kalau mengurus apa-apa itu sulit sekali. Kayaknya kita nggak dianggap. Kita nggak pernah dilibatkan, kayaknya kita itu dianggap nggak ada. Juga gangguan karena kita tidak punya suami kita dianggap remeh sekali. Karena kita itu sendiri, yang ditakuti sama mereka itu nggak ada. Jadi merasa tidak aman juga". (Heni Samawi, Kader Lokal Tobelo, Halmahera, Maluku)*

*"Kenyataan program pemberdayaan ini di Batauga mengalami hambatan. Paradigma pandangan pemerintah di sini setiap tandatangan tiap lembarnya dinilai dengan uang. Jadi pada saat pengajuan BLM mereka minta bagiannya sekian persen, apalagi mereka mendengar dana BLM untuk ini cukup besar. Mereka pikirannya bahwa pasti ada bagian untuk mereka. Dan kenyataannya bantuan itu langsung ke kelompok tidak melalui pemerintah lagi". (Baralia, Pendamping Lapang Buton, Sultra)*

*"Dalam saya mengurus BLM (bantuan langsung masyarakat) kesulitan pertama saya temukan di desa Bola yaitu kepala desa Bola tidak mau tandatangan. Kedua kesulitan di desa Lawela, pertama pengurus kelompok sama kader lokal teman saya Wa Manah pergi bawa proposalnya di Lawela, kepala desa juga tidak mau tanda tangan. Pak desa Lawela bilang katanya tidak bisa tanda tangan karena saya juga masih punya atasan yaitu pak camat. Kesulitan kedua kami temukan di kecamatan, PJAK (Penanggung Jawab Administrasi Kecamatan) tidak mau tanda tangan alasannya dia kecuali punya SK PJAK. Sampai saya katakan bahwa program ini jangan samakan dengan program yang sudah masuk yang dulu-dulu, karena program ini pemerintah punya kewajiban tapi untuk hak tidak ada." (Anisa, Kader Lokal Buton)*

*"Memang yang ingin kami sampaikan dan itu pesan dari teman-teman kalau bisa yang pertama itu, soal perhatian pemerintah terhadap ibu-ibu janda. Karena mereka hampir kurang ada perhatian, walaupun ada ada semacam diskriminasi, jadi kalau ada mungkin di tingkat pusat enggak tapi kalau di daerah itu selalu ada unsur kekeluargaan. Yang kedua itu soal biaya pendidikan, karena di Maluku utara itu biaya pendidikan itu mahal transportasi juga mahal, mereka meminta kalau bisa ada semacam beasiswa untuk anak-anak mereka, jadi untuk biaya makan sehari-hari itu mereka harus banting tulang, bagaimana dengan biaya pendidikan. Kalau sekarang ini biaya pendidikan itu kalau mau daftar masuk kelas aja itu harus ada daftar ulang satu anak itu 25 ribu selama tiga bulan mereka berpikir bagaimana kalau tiga anak SD, SM, SMA darimana biaya mereka dapatkan. Yang jelas putus sekolah, mereka berharap agar pemerintah memperhatikan itu" (Ismi. Kader lokal pekka, Maluku)*

*"Dulu usahanya gini juga, tapi pake modal orang. Pinjam dari BRI juga. Tapi kan terbatas, banyak langganan lari. Setelah ada pekka dan bantuan ini, saya bisa pinjam BLM dan saya bisa teruskan. Alhamdulillah sampai sekarang masih bisa angsur seminggu bisa 200-300 ribu rupiah. Jadi sebulan bisa 1 juta lebih untungnya, kemarin saya hitung. Jadi syukur bisa menutupi satu kali angsuran saya. Saya kan angsur 1.100.000,- sebulan. Jadi sangat membantu sekali". (Mardiyah, anggota pekka NTT)*

*"Saya tetap bersikeras menyatukan dua komunitas ini hingga tidak ada perbedaan, memang tidak mudah. Saya pernah kumpulkan ibu-ibu dari Kristen juga dari Islam tapi mereka maunya tetap masing-masing. Lalu ada forum wilayah. Dan mereka melihat dan hadir. Kemudian setelah forwil, kami mengadakan pertemuan antar kelompok di salah satu pantai sambil rekreasi kami mencoba mengundang calon anggota dewan perwakilan daerah yang terpilih. Di sini mereka semua sadar memang tidak ada perbedaan bahwa yang terjadi yang lalu itu biarlah berlalu kami jadikan itu sebagai*

suatu pengalaman. Ada kelompok yang belum terbentuk mereka malah meminta kalau bisa dusunnya dibentuk kelompok seperti itu". (Ismiati Syarif, kader lokal Maluku Utara)

Memang tidak ada salahnya untuk tetap berharap. Dan telah ada tekad, komitmen dan harapan yang terbentang di depan, menjanjikan kehidupan yang lebih baik.

"Diharapkan melalui advokasi dapat merubah cara berpikir, merubah kebijakan pihak-pihak pemerintah dan organisasi masyarakat yang sangat besar pengaruhnya, perubahan itu sesuai dengan aspirasi kita. Saya kira apa yang dilakukan oleh Pekka dalam forum ini secara jelas menyuarakan apa yang diinginkan apa yang dibutuhkan. Bicaralah sejelasa mungkin tentang apa yang dianggap kebutuhan bagi para perempuan kepala keluarga yang selama ini belum dipenuhi. Memang ada kebutuhan yang sebenarnya bisa dipenuhi oleh diri kita sendiri. Karena kita sedang membangun kekuatan dalam diri kita dengan berorganisasi". (Kamala Chandrakirana, ketua Komnas Perempuan)

"Untuk melakukan perubahan sosial budaya terhadap nilai dan perilaku yang merugikan perempuan dan anak-anak ini memerlukan upaya serius dengan melibatkan berbagai pihak termasuk tokoh adat, tokoh agama, pemerintah, dan terutama masyarakat sendiri. Melalui forum yang ada, kelompok pekka dapat memfasilitasi proses dialog untuk membicarakan hal ini". (Kasmiasi, aktivis perempuan, tokoh perempuan adat NTB)

"Pertama pekka sebagai gerakan akan melanjutkan untuk mengorganisir ibu kepala keluarga. Mereka juga harus punya jalur tambahan untuk menguatkan hubungan di antara pekka dan organisasi lokal, dimana termasuk juga pemerintah lokal. Kedua, saya harap sekarang anggota pekka yang sudah percaya diri akan ada usulan baru dari mereka. Seperti sistem pendidikan untuk anaknya, banyak punya usaha kecil, jual ke pasar, ada bantuan teknis untuk memperkuat ketrampilannya. Usulan seperti itu harus datang dari pekka, donor lain tidak akan datang dengan program yang sudah siap. Harus muncul dari tim Pekka. Saya harap mereka bisa diskusikan untuk membuat usulan itu. Yang ketiga selain ibu kepala keluarga, di setiap desa ada juga masalah seperti orang cacat, orang yang masalah mental. Saya kurang tahu apakah pekka bisa membantu juga orang seperti ini mengorganisir juga. Saya rasa kalau ini datang dari masyarakat, bukan masalah dana tapi hanya masalah organisasi di Indonesia, sekarang ini ada banyak latihan pekka yang bisa kasih ke orang lain. Yang terakhir, itu secara umum di semua proyek di Indonesia tidak hanya pekka yaitu aspek dokumentasi sangat penting. Lewat video, tulisan, secara lisan tapi kelompok lain harus tahu". (Scott Guggenheim, Bank Dunia Jakarta)

"Langkah berikutnya mungkin bagaimana Program Pengembangan Kecamatan ini mau belajar atau mengadopsi dari hasil pengalaman Pekka (Bito Wikantosa, Pimpro PPK)

"Kita merencanakan program Pekka ini adalah salah satu bagian dari kegiatan alokasi anggaran untuk tahun 2005 yang akan datang. Apakah nanti pelaksanaannya terkoordinasi pasti terkoordinasi tidak hanya BPMD saja. Ada tim penggerak PKK, ada forkom Gender, kita punya forum komunikasi gender Jawa Barat, nanti forkom gender dan tim penggerak PKK dalam pelaksanaannya antara BPMD ada suatu koordinasi antara lembaga pemerintah dan lembaga kaum perempuan di sana" (Hazmi Romli, PMD Jabar)

*"Kan tidak selamanya pendamping ini harus mendampingi mereka. Dengan adanya kader yang mendampingi mereka ini berarti bukan hanya melepaskan, nanti bisa membina lagi kegiatan kelompok kerja yang positif, kelompok kerja yang menghasilkan. Kalau sekarang satu atau dua pendamping kelompok, kader-kader ini nanti diharapkan bisa membantu secara langsung yang akan menentukan terhadap keberhasilan kelompoknya. Jadi istilahnya ini akan terjadi kesinambungan terus menerus. Kita harapkan modal 480 juta ini bisa bertambah"* (Teuku Azwar, Camat Tangan-Tangan, NAD)

*"Saya kira sebenarnya masalahnya karena masalah sosialisasi yang terlambat. Kita harapkan ke depan ini jangan masalah itu jadi satu hambatan. Tapi bagaimana tugas kita pemerintah itu memfasilitasi, memberdayakan mereka agar masalah – masalah yang begini jangan dijadikan masalah. Kemudian masalah jalurnya itu kita kurangi, semacam PJOK harus ada pemahaman sedikit, yang selama ini mungkin dari kegiatan-kegiatan yang lain ada fee, bagaimana keterlibatan pemerintah dapat memberikan dorongan karena untuk masyarakat kita, kalau masyarakat kita senang, ibu-ibu senang, saya juga selaku camat di sini bisa enak tidur"* (Camat Batauga, Buton)

*"Kami juga mengharapkan pemerintah juga membuka mata. Untuk melihat kegiatan yang sebenarnya menjadi tugas mereka, tapi ternyata orang dari luar yang membangun. Jadi tolong mereka memberikan perhatian dan melanjutkan itu. Sehingga pekka yang akan datang bukan hanya di tiga kecamatan Klubagolit, Ilebolong dan Larantuka saja tapi kalau perlu di seluruh kecamatan. Sehingga kekuatan itu semakin besar".* (Martinus Boliwuran, Pengurus Karang Taruna, Kelubagolit NTT)

*"Setiap minggu kita bikin pertemuan gitu. Yang Kristen ke sini yang Islam ke rumah Kristen. Jadi roling tiap bulan. Dengan diadakannya forum wilayah ini harapan saya yaitu kelompok satu dengan kelompok yang lain itu bisa bersatu tanpa memandang bulu suku, ras dan agama"* (Cut Sahara, Ketua Kelompok Pekka Malut)

*"Hasil dari forum musyawarah ini akan kami sampaikan ke kelompok dan akan kami usahakan dalam kesempatan berikut anggota kelompok lain dapat hal yang sama seperti yang kami ikuti sekarang ini".* (Theresia Tuto Pati, anggota pekka NTT)

*"Insya Allah dengan adanya program Pekka ini, nasib kami bisa berubah ke tingkat yang lebih baik lagi"* (Cut Raihan, Kader Lokal NAD)

*"Jadi kita berdoa itu mudahan-mudahan ini ke sana akan aman-aman sajalah jangan lagi terjadi seperti dulu. Kita tidak bebas, kita juga tidak enak, jalan jalan mau ke mana, kalau dalam keadaan yang tidak aman khan tidak bebas tho. Tapi kalau sekarang khan gelap kita jalan tidak apa-apa. Mau pergi ke Galela biarpun malam so tidak apa-apa, tapi kalo dulu belum ada persatuan itu takut, kalo sekarang sudah enak sudah bebas. Baik dari kelompok muslim maupun kita dari kelompok Kristen supaya tidak ada lagi isu-isu yang berkembang".* (Martha, Anggota Kelompok Pekka Malut)

*"Harapannya saya pada pekka, jangan berhenti sampai ini saja, tapi untuk seterusnya, membimbing kita ibu-ibu janda, mengarahkan kita ibu-ibu janda supaya betul-betul mendapatkan hak kita. Betul – betul kita bisa menghidupi keluarga kita yang sekarang ini memang bukan pas-pasan lagi. Harapannya supaya pekka ini bisa membantu kita di dalam hal ekonomi kita sendiri. Pesan-pesan saya kalau bisa untuk ibu-ibu janda, yang jadi kepala rumah tangga, karena pekka ini manfaatnya sangat baik dan banyak sekali manfaatnya untuk kita".* (Heni Samawi, Anggota Kelompok Pekka Malut)

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) yang difokuskan kepada perempuan kepala rumah tangga miskin di tingkat lapangan pada phase pertama 2001-2004 telah selesai dilaksanakan. Program ini merupakan pilot project yang dilaksanakan di 6 propinsi yaitu : Nanggroe Aceh Darussalam, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat dan Maluku Utara. Secara umum program ini bertujuan untuk memperkuat perempuan kepala keluarga di keenam wilayah agar mempunyai akses dan kontrol terhadap sumberdaya dan dirinya, serta setara dengan warga masyarakat lainnya. Untuk mencapai tujuan ini, dikembangkan strategi pengorganisasian basis (CO), pengembangan jaringan, dan advokasi dengan lima aspek pemberdayaan seperti kesejahteraan, akses, partisipasi, kesadaran kritis, dan kontrol menjadi komponen penting dalam proses penguatan yang dilakukan di lapangan.

Pada phase pertama, kegiatan difokuskan pada pengorganisasian perempuan kepala keluarga melalui kegiatan penumbuhan, pengembangan dan penguatan kelompok-kelompok yang diberi nama kelompok pekka di seluruh wilayah program. Pada phase ini dilakukan berbagai aktivitas penguatan kelompok seperti pendampingan intensif pada pertemuan berkala, berbagai pelatihan dan lokakarya. Fokus pertemuan, pelatihan dan lokakarya pada tiga aspek kehidupan pekka yaitu membangun motivasi dan visi, membangun kepercayaan diri, meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial, serta membangun kapasitas kepemimpinan. Selain itu, kelompok juga difasilitasi untuk membangun kelembagaan dengan pengembangan swadaya mereka sendiri melalui kegiatan simpan pinjam. Melalui kelembagaan simpan pinjam ini, kelompok kemudian difasilitasi untuk mengakses dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang diperuntukkan bagi mereka melalui program ini. Dana BLM secara kolektif dikelola di lembaga keuangan mikro yang akan dikembangkan di tingkat kecamatan.

Pekka telah dilaksanakan di 6 provinsi, 14 kabupaten, 21 kecamatan, dan 151 desa, dengan jumlah kelompok yang terbentuk 198 kelompok dan jumlah anggota 4,748 orang, yang terdiri dari: NAD 44 kelompok, NTT 45 kelompok, Sultra 27 kelompok, Jabar 42 kelompok, NTB 18 kelompok, Malut 22 kelompok. Mereka telah mampu mengembangkan kegiatan simpan pinjam dengan total perputaran pinjaman seluruh wilayah adalah Rp 2,967,107,400 dengan modal dari simpanan anggota Rp 254,579,360 dan BLM Rp 2,438,002,000 serta perolehan jasa Rp 236,128,900. Jumlah modal swadaya yang mencapai 10% dari keseluruhan modal yang mereka dapatkan termasuk cukup baik mengingat mereka merupakan kelompok termiskin yang selama ini dianggap tidak mampu untuk menyimpan dan hanya tergantung pada orang lain.

Selama pelaksanaan program telah dilakukan 279 kali pelatihan visi dan misi serta motivasi berkelompok dengan jumlah peserta yang dilatih sebanyak 6, 531 orang. Selain itu, telah pula dilatih dan dikembangkan 74 orang kader lokal, lebih dari 500 pengurus kelompok, 30 kader foto, dan 15 kader penulisan. Kader-kader ini telah secara optimal bertugas di lapangan membantu PL mengembangkan kegiatan di lapangan. Selain itu, telah terbentuk pula 16 unit UPD dengan total pengurus 48 orang, yang bertanggungjawab untuk mengelola BLM. Untuk pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) ke depan ada 42 orang kader LKM yang telah dilatih.

Guna memulai proses pengembangan jaringan dan kegiatan advokasi mereka, pada periode ini telah diselenggarakan 11 forum wilayah yang dihadiri ratusan perwakilan anggota kelompok di wilayah masing-masing. Sebuah Forum Nasional (Fornas) telah pula diselenggarakan pada tanggal 8 - 14 Agustus 2004 di Jakarta, dengan tema "*Saatnya Bicara, Kami Perempuan Kepala Keluarga*". Fornas

bertujuan untuk memperkenalkan gerakan Pekka dengan perjuangannya kepada publik secara luas, mengkonsolidasikan organisasi pekka, dan membangun dukungan dari pihak lain. Forum dihadiri oleh 320 orang yang terdiri dari wakil-wakil kelompok Pekka di 14 kabupaten 21 kecamatan di 6 propinsi yaitu Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Jawa Barat (Jabar), Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku Utara (Malut), dan Sulawesi Tenggara (Sultra).

Secara sosial ekonomi, kondisi anggota kelompok dapat dikatakan berada pada strata sosial ekonomi yang sangat rendah. Mereka umumnya bekerja di sektor informal – berdagang - dan di sektor pertanian - sebagai buruh tani dan nelayan rumput laut. Pendapatan mereka sangat terbatas dengan kisaran tertinggi dari Rp. 50.000 – Rp. 200.000 per bulan (73%) dengan jumlah jam kerja tinggi lebih dari 8 jam perhari. Mereka juga mempunyai tanggungan yang cukup banyak 1-3 orang (63%) dan 4-6 orang (15%). Sebab menjadi kepala keluarga beragam mulai yang ditinggal meninggal oleh suami (51%), ditinggal merantau/tanpa kabar (16%), bercerai (12%), atau juga lajang yang menanggung keluarga (7%) dan istri yang suaminya tidak bisa bekerja karena sakit menahun/cacat (6%).

Tiga tahun pertama pelaksanaan program paling tidak ada lima pintu yang telah mulai terbuka bagi perbaikan kehidupan pekka di masa mendatang.

o **Pertama, pintu menuju kesejahteraan.**

Hal ini dapat dilihat dengan tumbuh dan berkembangnya berbagai usaha kecil dan mikro yang ditekuni oleh para anggota pekka. Meskipun sebagian besar anggota kelompok pekka memang telah bekerja baik sebagai buruh maupun dalam sektor perdagangan dan jasa sebelum ada program pekka, namun program ini telah berkontribusi dalam tahapan pengembangannya. Sebagian kecil bahkan memang memulai kegiatan ekonomi setelah program ini ada. Melalui pengembangan kegiatan ekonomi yang mereka rintis, mereka telah mampu meningkatkan pendapatan keluarga rata-rata 10 - 50%. Selain itu, melalui kegiatan simpan pinjam yang dikembangkan dalam kelompoknya, mereka juga telah mempunyai tempat meminjam dengan bunga memadai ketika harus membayar sekolah anak, berobat ketika sakit, bahkan untuk membeli beras. Mereka terhindar dari rentenir yang selama ini membuat kehidupan ekonomi mereka menjadi lebih sulit, "gali lobang tutup lobang" terlilit hutang. Ada juga kelompok yang selama ini memburuh mencoba menjadi pengusaha sendiri secara berkelompok, misalnya usaha persawahan di Jawa Barat, usaha emping melinjo di Aceh, dan usaha tenun di NTT, usaha hasil perkebunan di Buton. Namun demikian, hasil ini belum optimal. Masih banyak hal yang harus dikerjakan untuk memberdayakan ekonomi mereka misalnya persoalan pasar dan diversifikasi usaha. Perkembangan ekonomi mereka juga akan membantu secara optimal persoalan pendidikan anak-anak, kesehatan dan perumahan yang mereka hadapi yang masih sedikit sekali tersentuh dari program ini.

o **Kedua, pintu akses.**

Akses terhadap sumberdaya yang selama ini sangat tertutup bagi mereka mulai terbuka secara perlahan. Dimulai dengan penggalangan sumberdaya mereka sendiri melalui kegiatan simpan pinjam mereka belajar mengelola sumberdaya yang lebih besar seperti dana BLM. Sebagian besar anggota kelompok menyatakan tidak pernah menjadi penerima manfaat langsung program-program yang ada di wilayahnya selama ini. Akses berbagai pelatihan, informasi, dan BLM yang diberikan melalui program ini merupakan hal baru bagi mereka pada umumnya. Selain itu, setelah terorganisir dalam kelompok dengan identitas sendiri, mereka juga mulai dikenali oleh pemerintah lokal dan masyarakat sekitarnya. Sebagai dampaknya, mereka mulai dijadikan penerima manfaat beberapa program lain seperti program beras murah, PKK, dan PPK meskipun masih terbatas. Misalnya di NTT kelompok pekka menjadi



pengelola program beras murah yang ada di sana. Akses terhadap berbagai sumberdaya lain di luar program pekka baik sumberdaya ekonomi maupun sumberdaya lainnya memang belum optimal mengingat terbatasnya kapasitas mereka untuk mengelola sumberdaya tersebut.

o **Ketiga, pintu partisipasi**

Berpartisipasi dalam setiap tahapan kegiatan dalam kelompok dan dalam masyarakat merupakan hal penting yang juga telah dicapai oleh anggota kelompok pekka melalui program ini. Dimulai dari kegiatan dalam kelompok mereka secara aktif mendiskusikan, merencanakan, memutuskan dan melaksanakan berbagai kesepakatan dan kegiatan untuk kepentingan mereka sendiri. Dalam mengakses BLM semua anggota kelompok terlibat dalam menentukan alokasi budget dan proses pengembangan usulannya. Sebagian kecil mereka juga mulai masuk ke lingkungan yang lebih luas dalam masyarakat. Di beberapa wilayah kelompok mulai diajak dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek yang ada di wilayah tersebut. Misalnya di Jawa Barat kelompok pekka diminta konsultasinya dalam menentukan alokasi budget untuk program pemberdayaan perempuan di wilayah ini.

o **Keempat, pintu kesadaran kritis**

Membangun kesadaran kritis anggota pekka terhadap posisi, kondisi, hak dan kewajiban mereka sebagai manusia dan warga negara setara dengan lainnya merupakan hal tersulit yang dilakukan selama ini. Nilai-nilai sosial budaya yang didominasi oleh ideologi patriarchy menjadi penghambat utama dalam upaya membuka wawasan mereka akan persoalan yang mereka hadapi, penyebabnya, dan hak mereka. Guna mengantisipasi "shock budaya" yang mungkin muncul, maka proses ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan bertahap melalui berbagai pelatihan yang dilakukan dan diskusi dalam pertemuan kelompok mereka. Sejauh ini sebagian besar anggota kelompok telah cukup sadar bahwa persoalan yang mereka hadapi tidak berdiri sendiri namun terkait dengan berbagai persoalan dan aspek kehidupan lain yang lebih luas. Selain itu mereka juga mulai sadar bahwa hanya mereka lah yang dapat mengubah nasib mereka sendiri, buka orang lain. Dengan demikian mereka mulai mau berusaha dan mengembangkan keswadayaan sendiri. Selain itu mereka juga sadar bahwa persoalan yang mereka hadapi hanya dapat diselesaikan jika mereka bersatu, tidak berdiri sendiri. Untuk wilayah konflik seperti Maluku Utara, kesadaran untuk mengupayakan kelompok mereka menjadi pelopor rekonsiliasi antar dua kelompok masyarakat yang berbeda merupakan satu kemajuan yang sangat berarti bagi perdamaian di daerah ini.

o **Kelima, pintu kontrol terhadap kehidupan sendiri dan kehidupan sosial politiknya**

Tentu saja untuk sampai pada tahapan mereka mampu mempunyai kontrol penuh terhadap kehidupan pribadi dan sosial politiknya, masih sangat jauh dari pencapaian. Banyak faktor yang masih harus disoal dan diupayakan berubah, terutama konstruksi nilai budaya dan kehidupan sosial politik di dalam masyarakat. Namun demikian tahapan ke arah tersebut telah pula dilalui oleh kelompok selama pelaksanaan program ini. Misalnya, mereka belajar untuk menjadi pemimpin bagi diri, keluarga dan dalam kelompoknya. Mereka berlatih mengambil berbagai keputusan baik secara sendiri maupun berkelompok. Mereka juga belajar berorganisasi dengan menerapkan berbagai prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan. Terlihat perkembangan yang cukup signifikan dalam hal kemampuan anggota kelompok menentukan arah kelompok dan mengambil keputusan bagi kepentingan mereka sendiri. Mereka juga telah membuat kesepakatan-kesepakatan tanpa campur tangan orang lain. Dalam hal menghadapi persoalan, mereka juga telah sanggup bertanggungjawab dan menyelesaikan persoalan secara bersama. Misalnya dalam kegiatan simpan pinjam dimana terjadi penunggakan oleh anggota lain, mereka semua bersedia bertanggungjawab dengan sistem tanggung renteng. Namun demikian, di beberapa wilayah kehidupan mereka juga masih sangat dikontrol oleh pihak keluarga lain

bahkan oleh tokoh lokal. Misalnya di Buton, masih ada anggota kelompok yang tidak berani keluar desamu untuk mengikuti pelatihan dan pertemuan di tingkat nasional karena tidak direstui oleh kepala desanya.

Hampir semua tujuan khusus program ini telah dapat dicapai dengan baik.

- o **Tujuan khusus pertama memfasilitasi perempuan kepala keluarga untuk mengorganisir dirinya.**

Kegiatan untuk mencapai tujuan ini telah dapat dilakukan sepenuhnya meskipun menghadapi beberapa kendala pada tahap awalnya. Terbentuknya ratusan kelompok pekka yang merupakan basis organisasi rakyat yang dipimpin oleh kalangan mereka sendiri merupakan salah satu indikatornya. Dalam kelompok ini mereka belajar berorganisasi, memimpin, dan mengembangkan berbagai potensi yang mereka miliki. Organisasi ini juga menjadi tempat untuk mereka berlatih dan saling belajar, serta saling menguatkan. Prinsip keswadayaan, kesetaraan dan demokrasi telah dijadikan dasar mereka dalam berorganisasi. Mereka juga mulai merintis jaringan organisasi mereka agar kekuatan yang terbangun menjadi lebih besar dan berdampak lebih luas. Melalui forum-forum wilayah yang telah mulai dirintis, mereka telah memulai sebuah upaya menjembatani berbagai hambatan dan perbedaan bagi mereka selama ini untuk mengatasi kemiskinan dan keterkucilan.

- o **Tujuan khusus kedua memfasilitasi perempuan kepala keluarga untuk mengakses berbagai sumberdaya.**

Hal ini juga telah dapat dilaksanakan meskipun dengan berbagai hambatan. Berbagai akses seperti pelatihan, informasi dan bahkan dana hibah dalam BLM telah mereka rasakan. Kemampuan mereka mengakses dan mengelola dana BLM dan dana swadaya merupakan hal yang sangat luar biasa mengingat selama ini mereka hampir tidak pernah mendapatkan bantuan langsung seperti itu. Di Aceh bahkan cukup banyak janda korban konflik yang tidak pernah mendapatkan hak mereka berupa kompensasi dari pemerintah. Selain itu, kelompok pekka juga sudah difasilitasi untuk mempunyai akses langsung dengan berbagai pihak yang mungkin dapat memperjuangkan nasib mereka menjadi lebih baik seperti pemerintah lokal, DPRD, BPD, organisasi dan lembaga non pemerintah seperti KOMNAS Perempuan dan LSM lain di tingkat lokal maupun nasional. Melalui kegiatan dialog dan forum wilayah dan nasional, mereka memperkenalkan diri dan identitasnya sehingga dapat membuka akses lebih lanjut pada berbagai pihak tersebut.

- o **Tujuan khusus ketiga memfasilitasi perempuan kepala keluarga untuk mampu terlibat dalam proses pengambilan keputusan di berbagai tingkatan.**

Upaya ini masih belum dapat dicapai sepenuhnya. Pada saat ini mereka baru sampai pada tahap menumbuhkan keberanian dan meningkatkan kapasitas untuk berdialog dengan pengambil keputusan di tingkat wilayah maupun di tingkat nasional. Dibutuhkan beberapa tahapan lagi sampai mereka mampu terlibat secara langsung dan aktif dalam proses pengambilan keputusan, misalnya dengan duduk dalam lembaga untuk itu di wilayahnya. Kepemimpinan dan kapasitas memahami dan menganalisa berbagai persoalan yang dihadapi secara lebih komprehensif merupakan dua hal penting yang masih harus ditingkatkan oleh mereka. Namun demikian, pintu ke arah tersebut telah terbuka. Sebagian kecil mereka terutama yang memimpin kelompok mulai diakui keberadaannya di tingkat lokal dan dilibatkan dalam berbagai proses penting di wilayahnya. Memfasilitasi pengembangan jaringan

kelompok, pengembangan forum wilayah, bahkan pengembangan forum nasional merupakan salah satu strategi yang dianggap cukup efektif dalam mengembangkan kepemimpinan dikalangan mereka, mengangkat status mereka dalam masyarakat, memperkenalkan kelompok mereka pada masyarakat, dan mensosialisasikan agenda mereka secara lebih luas. Mereka juga mempergunakan peran media massa untuk mempublikasikan keberadaan gerakan mereka. Pada Fornas di Jakarta, kegiatan pekka diliput oleh puluhan media cetak nasional dan ditayangkan oleh sebuah TV berita yang berkompeten.

o **Tujuan khusus keempat, mendokumentasikan proses dan hasil**

Mendokumentasikan proses pengorganisasian mereka juga merupakan agenda penting dari program ini. Hal ini dikarenakan pekka merupakan pilot program dimana penggalian pelajaran berharga menjadi kunci untuk mengembangkan program ini secara lebih luas. Selain itu, persoalan perempuan kepala keluarga belum pernah diangkat secara komprehensif sehingga menjadi issue marjinal. Oleh karenanya mendokumentasikan dan mempublikasikannya menjadi sangat strategis untuk sosialisasi issue dan membangun kesadaran masyarakat tentang persoalan ini. Ada 10 judul video dokumenter yang telah diproduksi selama program berjalan, sebuah buku kisah pekka yang diterbitkan, 6 serie buletin yang disebarkan, dan ribuan foto yang telah dibuat. Foto-foto telah dipamerkan diberbagai wilayah dan di kantor Bank Dunia Washington DC. Sementara itu video dan buku juga telah disebarluaskan keberbagai pihak seperti pemerintah, LSM, donor, dan masyarakat luas.

Pelaksanaan program ini menghadapi banyak persoalan yang menjadi tantangan serius dalam mencapai tujuannya. Berdasarkan analisa terhadap tantangan tersebut dan pengalaman mengatasinya maka rekomendasi untuk perbaikan dimasa mendatang telah dikembangkan.

o **Program Pemberdayaan vs Proyek Penanggulangan Kemiskinan**

Tantangan terbesar dari pelaksanaan program ini adalah tidak sinkronnya konsep program dengan mekanisme pendanaan proyeknya. Sebagai sebuah program pemberdayaan, dibutuhkan fleksibilitas dan waktu tertentu untuk pengalokasian dan administrasi keuangan proyeknya. Selain itu, program pemberdayaan juga membutuhkan tidak hanya indikator kuantitatif dalam targetnya, namun juga kualitatif berkaitan dengan pengembangan aspek sosial manusianya. Namun sebagai sebuah proyek dalam mekanisme birokrasi, pendanaan program ini sangatlah berorientasi pada pendekatan proyek dengan sistem birokrasi yang tidak luwes. Sistem anggaran tahunan yang hampir tidak memungkinkan untuk diubah dalam perjalanannya merupakan hambatan yang kerap muncul. Selain itu, sistem reimbursement dengan keterlambatan sampai mencapai satu tahun dalam pembayarannya menyebabkan program seperti ini hampir tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh lembaga seperti seknas pekka.

Bantuan langsung masyarakat (BLM) yang dalam konsep pemberdayaan hanya sebagai alat dan stimulasi untuk penguatan, menjadi tujuan utama dalam konsep proyek di kerangka pemerintah. Sebagai akibatnya penetapan pagu BLM untuk tiap wilayah yang harus dilakukan pada tahap awal proyek tanpa data yang akurat tentang jumlah calon penerima manfaat dan kebutuhan aktual mereka menyebabkan terjadinya mis-alokasi dana BLM di beberapa wilayah, dan rendahnya absorpsi dana BLM tersebut oleh masyarakat.

Tidak jelasnya sistem koordinasi dan aliran informasi dalam birokrasi pemerintah dari pusat ke daerah menyebabkan seringnya terjadi salah informasi dan komunikasi antara pelaksana dengan pihak birokrasi. Tidak jelasnya status dan dana pendampingan proyek ini dimata pemerintah daerah menyebabkan dipersulitnya pelaksanaan program di tingkat lapangan oleh oknum-oknum pemerintah setempat.

o **Kondisi sosial, ekonomi, politik dan kultural**

Tantangan lain yang tidak kalah beratnya adalah kondisi ekonomi, sosial, dan kultural dan kultural anggota kelompok pekka di wilayah-wilayah program. Kemiskinan, penderitaan dan trauma yang berkepanjangan menyebabkan sulitnya menumbuhkan kembali motivasi mereka untuk bangkit dan mempergunakan kekuatan yang ada dalam mengatasi berbagai persoalannya. Nilai-nilai budaya yang cenderung menghambat ruang gerak mereka merupakan salah satu kondisi yang cukup sulit untuk diatasi dalam mengorganisir mereka. Ketertinggalan dan keterpinggiran mereka dari sistem yang ada selama ini, menyebabkan mereka tidak mempunyai wawasan dan pengalaman dalam berkelompok. Kerangka proyek adalah uang, yang selama ini selalu diterapkan dalam mengembangkan program di pedesaan telah mengurangi nilai dan motivasi mereka untuk mengorganisir diri dalam konteks pemberdayaan. BLM menjadi tujuan utama dengan tidak mempunyai rasa tanggungjawab untuk mengelola, memutarakan serta mengembalikannya bagi kepentingan masyarakat karena dianggap hibah dari pemerintah sebagaimana lazimnya selama ini.

Di wilayah konflik bersenjata seperti NAD dan wilayah pasca konflik seperti Maluku Utara, atau wilayah pengungsian akibat konflik seperti Buton, tantangan terberatnya adalah mempergunakan program ini sebagai salah satu alternatif membangun perdamaian dan kehidupan lebih baik bagi mereka, dan mengatasi trauma dan ketakutan yang mendera dan menghantui mereka. Rasa curiga antar satu kelompok masyarakat yang bertikai juga membuat proses pengorganisasian terhambat dalam hal ini. Tingkat pendidikan yang sangat rendah bahkan cukup banyak yang buta huruf, kesibukan mencari nafkah, dan keterkucilan di medan yang sulit dijangkau, merupakan aspek lainnya yang mempengaruhi kualitas pendampingan yang dapat dilakukan. Dibutuhkan upaya yang sangat serius untuk meningkatkan kapasitas mereka agar mampu setara dengan anggota masyarakat lainnya. Hidup dalam situasi keterbelakangan dalam waktu lama menyebabkan mereka sangat sulit untuk mencerna berbagai informasi dan proses pembelajaran yang dilakukan bersama mereka.

o **Kapasitas organisasi pelaksana**

Dari segi organisasi pelaksana program, tantangan juga muncul terutama dalam hal kapasitas mengelola dana proyek dengan sistem yang diberlakukan oleh pemerintah. Seknas dan tim PL memiliki pengalaman yang tidak memadai dalam pengelolaan proyek dengan pemerintah dan dalam bekerjasama dengan birokrasi pemerintah. Selain itu, sebagian besar PL merupakan orang-orang yang belum mempunyai pengalaman lapangan yang memadai sehingga pada tahap awal banyak kesulitan yang dihadapi di lapangan. Sistem komunikasi baik karena infrastruktur yang tidak memadai maupun karena keterbatasan kemampuan personal dalam hal ini, juga menjadi tantangan yang cukup serius dalam pelaksanaan program selama ini. Kerap terjadi kesalahfahaman dalam manajemen program karena kurang komunikasi. Lemahnya kemampuan pelaksanaan program dalam mengembangkan data based merupakan tantangan yang cukup berpengaruh dalam kinerja program selama ini.

Jika program ini akan dikembangkan secara lebih luas dan mendalam maka dibutuhkan perubahan-perubahan mendasar sebagai rekomendasi dari pelajaran berharga selama ini.

- Sistem pendanaan program seperti ini haruslah keluar dari kerangka proyek pada umumnya. Membuat sistem pendanaan rutin dan blok grant yang dapat diakses sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan dengan jangka waktu yang panjang merupakan salah satu rekomendasinya.
- Komponen BLM harus dibuat sebagai stimulan akhir dari pengembangan kelompok simpan pinjam

atau lembaga keuangan mikro jika tahapan pemberdayaan telah memasuki masa pengembangan ekonomi kelompok. Alokasi BLM harus berdasarkan proposal kelompok yang dibuat secara partisipatif dengan analisa sosial dan kebutuhan yang objektif. BLM harus dikampanyekan sebagai dana berputar bukan hibah yang tidak dikembalikan.

- Untuk mengatasi kendala ekonomi, sosial, politik dan kultural, diperlukan strategi beragam untuk setiap wilayah dengan memfokuskan pada persoalan khusus yang dihadapi. Pendekatan yang dilakukan harus dalam konteks masyarakat tanpa menyeragamkan target yang harus dicapai oleh semua wilayah.
- Advokasi kebijakan dan kampanye publik secara lebih luas dan terstruktur merupakan hal yang harus dilakukan dalam pengembangan program kedepan guna berkontribusi dalam proses perubahan sosial masyarakat agar tercipta kondisi yang lebih kondusif bagi pekka.
- Diperlukan alokasi budget yang lebih besar untuk berbagai aktivitas pelatihan, lokakarya, diskusi, dialog, kampanye dan studi banding bagi anggota kelompok agar dapat mengembangkan kegiatannya dalam kondisi yang mereka hadapi.
- Dibutuhkan pengembangan sistem pendanaan yang berkelanjutan misalnya melalui pembiayaan rutin oleh pemerintah daerah dalam program pembangunannya agar kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan meskipun tanpa dukungan proyek.
- Dibutuhkan lembaga keuangan mikro yang berada dekat dengan anggota kelompok pekka agar mereka dapat terus mempunyai akses terhadap sumberdaya ekonomi untuk kebutuhan hidup mereka. Agar LKM ini benar-benar berfihak pada mereka, maka pengembangannya harus dirintis dari kelompok simpa pinjam mereka sendiri.
- Pengembangan sistem pengelolaan data yang profesional dan dapat diandalkan serta diakses sesuai kebutuhan menjadi rekomendasi penting yang harus diperhatikan mengingat tidak adanya data tentang pekka selama ini dan pentingnya data untuk menentukan berbagai strategi program dan advokasi mereka.

**Laporan Akhir**  
**PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA**  
*pekka*  
 2001- 2004

## I. LATAR BELAKANG

Program ini digagas berdasarkan pengalaman program penanggulangan kemiskinan masyarakat desa melalui penguatan institusi-institusi lokal, bernama Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang dijalankan oleh pemerintah. Melalui refleksi dan evaluasi program, disadari bahwa skema program ini masih belum mampu menjangkau kelompok termiskin di wilayah-wilayah tertentu, terutama rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan dan lebih khusus lagi keluarga janda. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala baik yang sifatnya teknis seperti kurangnya penguasaan terhadap metode pengorganisasian rakyat khususnya perempuan maupun kendala struktural yaitu rendahnya posisi perempuan kepala keluarga dalam struktur sosial masyarakat.

Memang satu fenomena yang menarik di Indonesia saat ini adalah meningkatnya jumlah kepala rumah tangga perempuan, baik sebagai janda maupun sebagai perempuan lajang berusia sekitar 45-59 tahun.



*Program Pekka ini merupakan satu upaya untuk memfasilitasi mereka agar memiliki akses dan kontrol terhadap sumberdaya dan kebijakan yang ada di wilayahnya, mempunyai status dan posisi setara dengan anggota masyarakat lain*

Data tahun 1999<sup>1</sup> menunjukkan bahwa rumah tangga di Indonesia yang dikepalai perempuan mencapai 13.2%. Tingkat perceraian yang relatif tinggi mencapai 12% merupakan salah satu penyebab kondisi ini. Selain itu, migrasi laki-laki dari pedesaan dan konflik yang berkepanjangan di wilayah tertentu yang menyebabkan terbunuhnya kaum laki-laki meninggalkan beban keluarga pada perempuan. Keadaan rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan ini umumnya relatif lebih miskin dibandingkan yang dikepalai oleh laki-laki. Selain itu pengakuan terhadap perempuan kepala rumah tangga yang mempunyai hak setara kepala rumah tangga laki-laki masih merupakan proses perjuangan yang panjang. Hal ini terlihat dalam kehidupan bermasyarakat di pedesaan

khususnya, dimana perwakilan keluarga yang dikepalai oleh perempuan cenderung diberikan kepada anak laki-laki atau keluarga dekat laki-laki lainnya.

Berdasarkan pengalaman tersebut, dikembangkanlah gagasan Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (pekka). Program yang difokuskan pada perempuan yang menjadi kepala keluarga rumah tangga miskin ini merupakan satu upaya untuk memfasilitasi mereka agar memiliki akses dan kontrol terhadap sumberdaya dan kebijakan yang ada di wilayahnya, mempunyai status dan posisi setara dengan anggota masyarakat lain, serta dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di wilayahnya. Dalam program ini perempuan kepala rumah tangga termasuk janda dengan berbagai

<sup>1</sup> Indikator sosial gender—Biro Pusat Statistik, 2000

sebab—meninggal, bercerai tetap, ditinggal tanpa kabar--dan keluarga dimana pencari nafkah utama adalah anggota keluarga yang perempuan seperti istri dan anak, serta keluarga dimana laki-laki pergi ke luar wilayah untuk jangka waktu lama.

Program ini merupakan inisiatif baru sehingga untuk tahap awal dilaksanakan sebagai pilot proyek di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Jawa Barat (JABAR), Sulawesi Tenggara (SULTRA) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun pertama, diperluas ke Maluku Utara (MALUT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun kedua. Pemilihan lokasi berdasarkan pertimbangan keberadaan jumlah perempuan kepala keluarga di wilayah tersebut dan karakteristik wilayah yang menyebabkan kondisi tersebut terjadi—misalnya wilayah konflik, pasca konflik, angka migrasi laki-laki yang tinggi, konflik sumberdaya alam, serta konflik sosial budaya lokal. Jika dikemudian hari program ini mampu memberikan alternatif pendekatan pengorganisasian basis yang efektif maka dapat dikembangkan pada wilayah lain. Seluruh proses pelaksanaan program didokumentasikan melalui berbagai cara pada berbagai tingkatan sebagai bahan refleksi bagi seluruh pihak yang berkepentingan untuk melakukan perubahan sosial.

## II. TUJUAN

Secara umum program ini bertujuan untuk memperkuat perempuan kepala keluarga agar memiliki akses dan kontrol terhadap sumberdaya yang ada, memiliki posisi dan status sosial yang setara dengan anggota masyarakat lain, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan di berbagai tingkatan.

Secara khusus tujuan program adalah:

- Memfasilitasi perempuan kepala keluarga untuk mengorganisir dirinya.
- Memfasilitasi perempuan kepala keluarga untuk mengakses berbagai sumberdaya
- Memfasilitasi perempuan kepala keluarga untuk mampu terlibat dalam proses pengambilan keputusan di berbagai tingkatan.
- Mendokumentasikan proses pengorganisasian perempuan kepala keluarga

## III. STRATEGI DAN PENDEKATAN

Memahami persoalan perempuan kepala keluarga yang komprehensif, maka program ini menerapkan strategi pengorganisasian masyarakat atau community organizing (CO) dengan menyoal ketidakadilan gender dan kelas yang ada dalam masyarakat. Dengan strategi ini diharapkan dapat menjawab lima fokus pemberdayaan perempuan yaitu:

- Meningkatkan kesejahteraan perempuan yaitu terpenuhinya semua kebutuhan hidup perempuan termasuk rasa aman.
- Meningkatkan akses perempuan pada berbagai sumberdaya yang ada termasuk pada pengambilan keputusan,
- Meningkatkan partisipasi perempuan pada setiap tahapan kegiatan proyek dan pembangunan di wilayahnya,
- Meningkatkan kesadaran kritis perempuan terhadap hak dan kewajibannya sebagai manusia dan warga negara
- Meningkatkan kontrol perempuan terhadap dirinya dan terhadap proses pengambilan keputusan dalam keluarga dan dalam masyarakat.

Untuk mendukung strategi tersebut maka ada lima prinsip dasar program yang diterapkan dalam pelaksanaan PEKKA yaitu partisipatif, fleksibel, pendampingan dan fasilitasi, berkelanjutan, dan terdesentralisasi.

- Partisipatif; perempuan kepala keluarga akan difasilitasi untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program. Dengan pendekatan ini maka potensi lokal akan tergali secara maksimal dan kesinambungan, program dapat terjamin karena masyarakat akan ikut memiliki proyek.
- Fleksibel; rancangan program dibuat "open menu", fleksibel dan lentur sehingga penyesuaian terhadap kondisi, kebutuhan, dan persoalan masyarakat dapat dilakukan secara cepat. Fleksibilitas program juga dapat membantu perempuan mengembangkan segala potensi yang mereka miliki.
- Pendampingan dan fasilitasi; pendekatan ini menekankan pada otonomi dan kepemimpinan perempuan kepala keluarga untuk menentukan kehidupannya sendiri. Pendamping akan memfasilitasi pemenuhan kebutuhan, mengembangkan jaringan dan kerjasama dengan kelompok lain, mengakses sumberdaya dan teknologi serta meningkatkan kemampuan diri.
- Berkelanjutan; perencanaan yang cermat, proses fasilitasi yang tepat, serta pengembangan sumberdaya manusia secara optimal, dapat membantu menjamin keberlanjutan program. Salah satu kunci keberlanjutan program adalah pengembangan keswadayaan, kepemimpinan, kelembagaan, dan kerjasama dalam masyarakat sendiri. Dengan demikian sejak awal program, pendekatan yang dilakukan akan diarahkan untuk mencapai keempat hal tersebut.
- Terdesentralisasi; pendekatan ini mensyarakatkan otonomi penuh bagi semua pelaksana program di tingkat wilayah dan lapangan. Pelaksana program di tingkat wilayah harus mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan agar tuntutan perubahan karena kondisi lapangan dapat diantisipasi dengan cepat. Desentralisasi juga dapat membantu mempercepat kemandirian setiap wilayah.



*Salah satu kegiatan monitoring dan evaluasi di wilayah NTB*

#### IV. URAIAN KEGIATAN YANG TELAH DILAKUKAN

Selama hampir tiga tahun pelaksanaan program Pekka, kegiatan difokuskan pada beberapa aspek program yaitu pengembangan sistem pendukung berupa sekretariat nasional dan pendamping lapang, pengorganisasian kelompok perempuan kepala keluarga (pekka), penguatan dan pengembangan kapasitas kelompok pekka, pembukaan akses kelompok pekka pada sumber daya ekonomi, pengembangan jaringan kelompok pekka, serta sosialisasi dan kampanye tentang pekka dalam rangka advokasi dan perubahan sosial kehidupan pekka dalam masyarakat. Agar seluruh proses, hasil dan pelajaran berharga dapat terekam dengan baik, pada periode ini juga dilakukan dokumentasi kegiatan secara intensif.

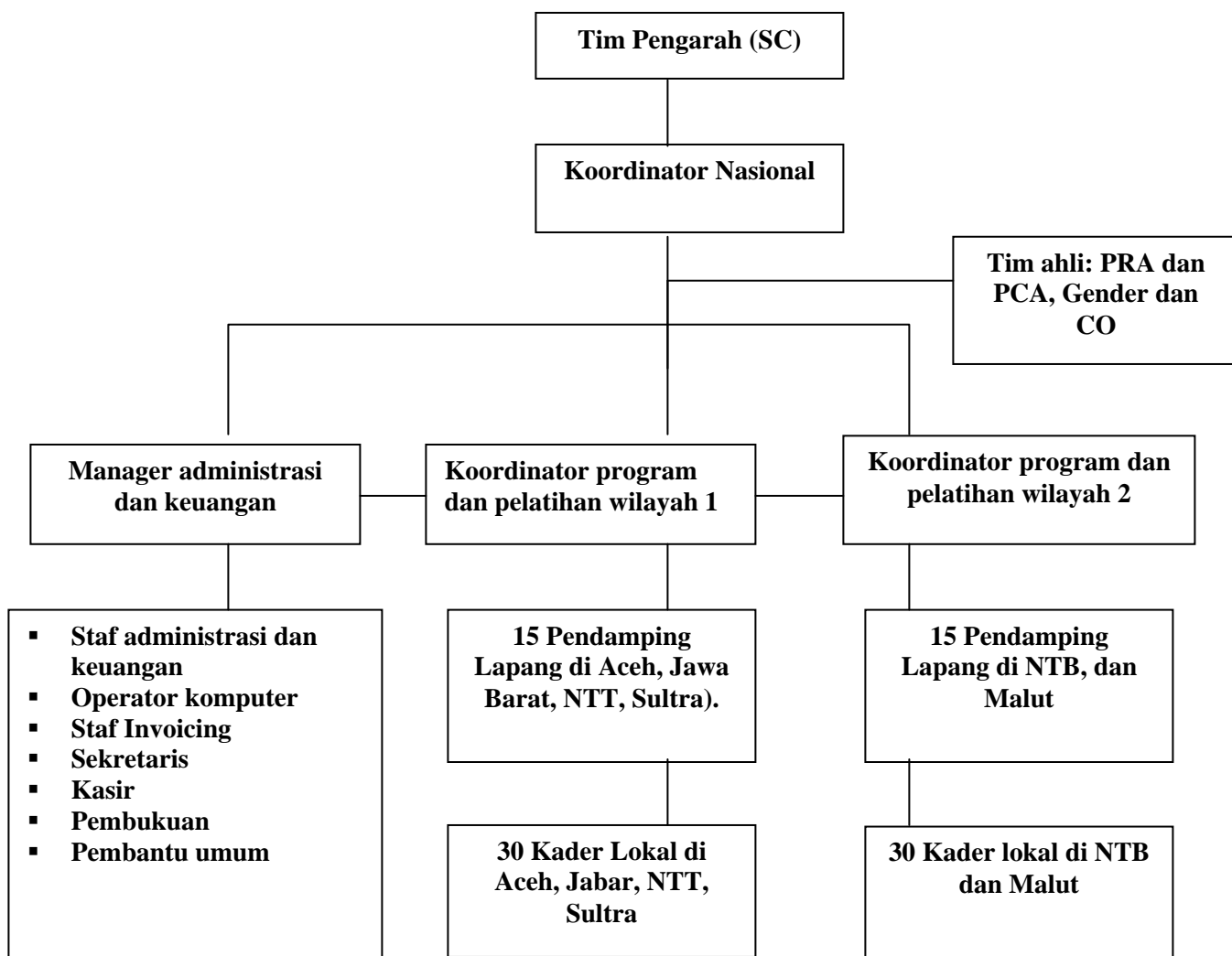


#### 4.1. Pengembangan Sistem Pendukung

Pengembangan sistem pendukung bertujuan untuk menunjang efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program di tingkat lapangan serta kesinambungan program. Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut diuraikan berikut ini.

##### 1. Pembentukan dan pengembangan Sekretariat Nasional

Sekretariat nasional (Seknas Pekka) dibentuk di Jakarta oleh tim pengarah program yang terdiri dari Komnas Perempuan, wakil lembaga donor dan wakil pemerintahan. Sekretariat dipimpin oleh seorang koordinator nasional yang dalam tugas kesehariannya dibantu oleh beberapa orang tim koordinasi yang ahli dalam berbagai bidang yang dibutuhkan oleh program ini. Seknas merupakan penanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan di lapangan. Guna mendukung tanggungjawab ini, Seknas Pekka kemudian mengembangkan struktur organisasinya sebagai berikut:



**i. Tim Pengarah (PMD dan Komnas Perempuan)**

- Membuat dan menandatangani MoU
- Merumuskan kebijakan-kebijakan umum yang akan dilaksanakan oleh EC Nasional
- Membuat kriteria dan merekrut tim leader nasional
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program

Tim pengarah nasional terdiri dari:

- Pemimpin proyek PPK selaku penanggungjawab program dan proyek PEKKA
- Sekjen Komnas Perempuan selaku penanggungjawab kegiatan pendokumentasian
- Anggota Komnas Perempuan atau orang yang ditunjuk oleh Komnas Perempuan selaku Koordinator Tim Pelaksana Nasional
- Anggota Sekretariat PPK selaku pelaksana pengendalian proyek.

**i. Tim Pelaksana Nasional**

- Koordinasi implementasi tingkat nasional dan daerah.
- Mengembangkan modul dan manual untuk pelaksanaan program
- Melaksanakan lokakarya dan training untuk tim pelaksana lokal
- Memfasilitasi akses ke sumber daya terkait (ekonomi dan non ekonomi) serta membangun jaringan kerja di tingkat nasional dan regional.
- Mengkoordinir advokasi kebijakan tingkat nasional
- Melaksanakan fungsi administrasi program di tingkat nasional
- Mengorganisir proses pendokumentasian program
- Monitoring, evaluasi, dan supervisi pelaksana wilayah.
- Melaporkan pelaksanaan program kepada tim pengarah

**i. Tim Pelaksana di Tingkat Wilayah / Daerah**

- Melakukan survey wilayah dan sosialisasi program
- Mengidentifikasi dan menyeleksi calon kader lokal
- Mengkoordinir kegiatan pelatihan dan lokakarya di tingkat lokal
- Mensupervisi kader lokal dalam melakukan pengorganisasian basis
- Memfasilitasi akses ke sumber daya terkait (ekonomi dan non ekonomi) serta membangun jaringan kerja di tingkat lokal dan wilayah.
- Mendokumentasi proses kegiatan-kegiatan di wilayahnya.
- Melakukan monitoring dan evaluasi
- Melakukan fungsi administrasi program di tingkat lokal

**i. Kader Lokal**

- Bersama fasilitator wilayah melakukan pengorganisasian basis di daerahnya.
- Memfasilitasi dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan kelompok basis.
- Melakukan fungsi administrasi kelompok basis.

**i. Tim Nara Sumber atau Tim Ahli**

- Memberikan masukan kepada tim pelaksana tentang strategi dan pelaksanaan program sesuai dengan bidang keahliannya.

- Memfasilitasi proses pelatihan dan lokakarya pada tingkat regional atau nasional sesuai dengan bidang keahliannya.
- f. **Koordinator nasional atau Team Leader**
- Memimpin seluruh tim agar program dapat berjalan sesuai tujuan
  - Mengembangkan konsep, rancangan, dan pelaksanaan seluruh program
  - Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana dan sumberdaya program
- g. ***Koordinator program dan pelatihan***
- Membantu tim leader dalam mengkoordinasikan seluruh kegiatan di lapangan
  - Membantu tim leader dalam kegiatan supervisi, monitoring, evaluasi, dan pembuatan laporan kegiatan.
  - Membantu tim leader mengembangkan berbagai modul pelatihan
- h. ***Koordinator Administrasi dan Keuangan***
- Merancang sistem administrasi dan keuangan program PEKKA
  - Mengelola dan mendokumentasi file-file administrasi dan keuangan program PEKKA
  - Memonitor proses dan mensupervisi pencatatan dan pembayaran segala bentuk transaksi keuangan program PEKKA
  - Memfasilitasi pelatihan sistem keuangan PEKKA bagi pelaksana
  - Membuat perencanaan anggaran keuangan program PEKKA
  - Mengelola keuangan program sesuai dengan perencanaan
  - Merekap laporan keuangan program
  - Membuat laporan secara periodik dari kegiatan administrasi dan keuangan kepada koordinator program
  - Melatih pendamping lapang dan pengurus kelompok tentang administrasi keuangan sesuai kebutuhan.
- i. ***Tim wilayah***
- TPL wilayah : 3 - 5 orang / propinsi
  - Bertanggung jawab pada sekretariat nasional dalam pelaksanaan program
  - Berkoordinasi secara intensif dengan sekretariat nasional
  - Kerjasama dengan pendamping lapang lain dalam mengidentifikasi kebutuhan program dengan metode PRA
  - Pembentukan kelompok pada desa sasaran program
  - Memfasilitasi pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kelompok sasaran program
  - Medampingi kelompok sasaran dalam membuat perencanaan kegiatan dengan metode PRA
  - Mendampingi kelompok sasaran dalam merealisasikan perencanaan kegiatannya
  - Mengembangkan kelompok-kelompok atau lembaga yang mandiri
  - Mengembangkan pemimpin-pemimpin perempuan di tingkat lokal
  - Melaporkan seluruh kegiatan dan keuangan kepada sekretariat nasional
  - Membuat catatan harian dan laporan bulanan kepada sekretariat nasional

## 2. Pembentukan dan pengembangan tim pendamping lapang (PL)

### a. Rekrutmen

Sebagai pelaksana langsung program di tingkat lapang, Seknas kemudian merekrut tim pendamping lapang (tim PL), melatih mereka, dan mensupervisi mereka. Hingga akhir program telah direkrut dan dilatih 26 orang PL, namun hanya 21 orang yang secara sinambung terus bekerja hingga akhir periode program ini. Lima (5) orang mengundurkan diri dan dikeluarkan karena berbagai sebab yang menyebabkan pergantian PL di beberapa wilayah dalam masa tugasnya. Anggota PL umumnya berpendidikan sarjana S-1 dari berbagai bidang atau pendidikan SLA dengan pengalaman lapang diatas 10 tahun. Hanya 9 orang saja yang memiliki pengalaman pengembangan masyarakat. Mereka berusia antara 25 – 42 tahun, dan sebagian besar baru lulus perguruan tinggi dalam berbagai jurusan atau pernah bekerja dalam bidang yang berbeda. Oleh karena itu mereka semua membutuhkan pelatihan yang intensif sebelum diterjunkan ke masyarakat dan pelatihan dan refleksi berkala selama bertugas. 18 orang PL adalah perempuan, dan hanya 3 orang PL laki-laki. Mereka umumnya berasal dari daerah dimana mereka bertugas atau paling tidak telah menetap tinggal di wilayah tersebut cukup lama.



*Pelatihan PL Malut dan NTB pada bulan April 2003*

**Tabel 1. Daftar nama tim PL Pekka selama periode 2001-2004:**

No	Nama Lengkap	TTL	Alamat Rumah	Wilayah kerja
1	Muhammad Daud, SE. AK	Mtg. Seuke Pulot, 25/10/1962	Desa Dayah Tanah Kec. Mutiara Kab. Pidie 0653-821850 (fax)	Kecamatan Permata Timur, Kabupaten Pidie, NAD
2	Iskandar, SKM	Pante Kulu, 15/10/1973	Perumahan Lembah Hijau Jl. Batara V No. 50 Ds. Lot Mesjid Kec. Baiturrahman Banda Aceh 0651-22293 0653-821174 rencong2002@yahoo.com	Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar, NAD
3	Afrida Purnama, S.Sos	Sinabang, 30/09/1974	Perumahan Pola Keumala Permai Blok A No. 52. Aceh Besar	Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Timur, NAD
4*	Zatul Fikar	10/05/1974		Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur Idi

No	Nama Lengkap	TTL	Alamat Rumah	Wilayah kerja
5	Ratna Fitri, ST	Sigli, 10/09/1976	Jl. Al Kindi No. 33 Ds. Sederhana Kopelma Darussalam Banda Aceh 0651-52256 fitriez33@yahoo.com	Kecamatan Jeunib, Kabupaten Aceh Biruén
6*	Daden Iskandar, S.Ag	Sukabumi, 22/03/1976	Citamiang RT 13/03 Kec. Kadulampit Sukabumi Jawa Barat 43153 0266-216322 08164637285	Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi
7	Oemi Faezathi, S.Sos	Jakarta, 21/09/1978	Taman Yasmin Sektor I Jl. Teratai V No. 8 Cilendek Bogor 16310 0251-339493 08129082944 faezathi@yahoo.com	Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur
8	Diah Pitaloka	Cilacap, 30/11/1977	Jl. Bojong Kulon No:22/17 Cikondang Bandung 40191 0818436637 08122336832 anakbintang@hotmail.com anakbintang@yahoo.com	Kecamatan Tanjung Siang, Kabupaten Subang
9	Giri Ayu Wardhani, S.Sos	Bandung, 27/07/1975	Jl. Cikoang Kaler No. 1 Jatiendah, Ujung Berung Bandung 40611 patepang@yahoo.com	Kecamatan Telaga Sari, Kabupaten Karawang
10	Ir. Baralia	Buton, 05/09/1966	Jl. Mayjen Sutoyo Lr. Bukit Indah No. 34 Kendari Sulawesi Tenggara	Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton
11	Muliana, SP	Buton, 28/09/1970	Jl. Muh. Yamin SH No. 15 Bau-Bau Buton Sulawesi Tenggara	Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton
12*	Emmy Astuti	Kendari, 30/05/1979	Jl. Sao-Sao No. 21/1 Wua-Wua Kendari Sulawesi Tenggara a.emmy@mailcity.com spukk_kendari@telkom.net	Kecamatan Pasar Wadjo, Kabupaten Buton
13	Bernadete Deram, Amd	Lamawara, 17/11/1970	Jl. Batuata, Kel P.T.W. Bao RT 015/005, Ke. Larantuka Flores Timur	Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur
14	Benedikta B. Hera	Leworook, 21/03/1972	Yayasan Mitra Sejahtera Kel. Wibalun Larantuka Flores Timur, Kp. 45	Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur
15	Nur Aisyiah Jamil, S.Ag	Batu Gadang, 18/08/1974	Hinga, RT 001/RW 001, Waiwerang Adonara Timur Flores Timur	Kecamatan Klubak Golit, Kabupaten Flores Timur.
16	Ornila Hanim	09/06/1966	Toko Bina Ilmu, Jl Medanbanda aceh, Kp Blang, Idi Rayeuk, Aceh Timur	Kecamatan Idi Rayeuk, Aceh Timur, NAD
17	Wa Ode Salawati	Raha, 19/09/1971	Jl Kelapa No 25 C, Kel. Wangkanapi, Bau- bau, Sultra	Kecamatan Pasar Wajo, Buton, Sultra
18	Mibnasah Rukamah	Sukabumi, 01/06/1977	Jal Segog, RT I/II Desa Batununggal, Kec. Cibadak, Sukabumi, Jabar	Kecamatan Cibadak, Sukabumi, Jabar
19	Maryam	Dofa,	Jl. Ki Hajar Dewantara No 55, Kel.	Kecamatan Kao,

No	Nama Lengkap	TTL	Alamat Rumah	Wilayah kerja
	Sapsuha	12/07/1973	Takoma, Kec. Kota Ternate Selatan, Kab. Kota Ternate, Maluku Utara	Halmahera Utara, Maluku Utara
20*	Leny Umaternate	Sanana, 04/11/74	Kelurahan Kampung Makasar Barat Kota Ternate, Maluku Utara	Kecamatan Malifut, Halmahera Utara, Maluku Utara
21*	Rahma Abidin	Ternate, 19/09/1970	Kelurahan Tanah Tinggi Kota Ternate, Maluku Utara	Kecamatan Tobelo, Halmahera Utara, Maluku Utara
22	Riadul Wardiyah	Bengkel, 01/04/1972	Bengkel Selatan, Kec. Labuapi, Lombok Barat, NTB	Kecamatan Gerung, Lombok Barat, NTB
23	Sitti Zamraini Alauthi	Selong, 29/05/1973	Jl. Teratai I No. 253 BTN Sweta Indah Cakranegara Mataram, NTB	Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, NTB
24	Nurhaida Mandalika	Mataram, 23/03/1979	Jl. Pendidikan No. 1 Mataram, NTB	Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah
25	Amir Lurung	Palembang, 13/01/1968	Kelurahan Tanah Tinggi Kota Ternate, Maluku Utara	Kecamatan Tobelo, Halmahera Utara, Maluku Utara
26	Rosida	Bitung, 18/06/1975	Desa Peleri, Kecamatan Malifut, Maluku Utara	Kecamatan Malifut, Halmahera Utara, Maluku Utara

\* Yang bersangkutan tidak lagi bekerja sebagai PL Pekka pada saat laporan ini dibuat.

#### b. Pengembangan kapasitas Pendamping Lapang

Agar tim PL mampu melakukan pendampingan pada kelompok pekka di tingkat lapangan secara mandiri, maka kepada mereka telah diberikan berbagai pelatihan secara intensif dan berkala. Berbagai pendekatan pelatihan yang diterapkan antara lain, in-class training, magang, praktek lapang, studi banding, dan bertukar pengalaman melalui refleksi dari lapang. Berikut ini tabel kegiatan pengembangan kapasitas PL yang telah dilaksanakan selama periode 2001-2004.

**Tabel 2. Daftar kegiatan pengembangan kapasitas PL 2001-2004**

No	Waktu	Tempat	Judul Kegiatan	Fokus Materi	Jmlh Peserta
1	27 Desember 2001 – 23 Januari 2002	Wisma Hijau, Jakarta	Pelatihan Pendamping Lapang Pekka	Pembekalan materi pemberdayaan kepada PL yang akan bertugas di wilayah Pekka	15
2	13-18 Agustus 2002	Padepokan Pencak Silat Indonesia, Jakarta	Refleksi PL dan Pelatihan Dokumentasi	Refleksi PL, Pelatihan dokumentasi, menggunakan kamera dan video	15
3	6-12 Januari 2003	Hotel Santai, Bali	Refleksi & Pelatihan Pendamping Lapang & Kader Lokal	Refleksi PL, pelatihan assertiveness, workshop dg Komnas Perempuan,	21
4	7-21 April	Hotel Hobi-	TOT untuk PL wilayah baru	Pemberdayaan : CO,	9

No	Waktu	Tempat	Judul Kegiatan	Fokus Materi	Jmlh Peserta
	2003	hobi, Jakarta		membangun kelompok mandiri, PRA bagi PL wilayah baru	
5	10-14 April 2003	Hotel Hobi-hobi, Jakarta	Pelatihan penulisan populer bagi kader penulisan dan PL	Pelatihan penulisan populer	5
6	20-25 Mei 2003	Wisma Hijau, Jakarta	Refleksi & Pelatihan Pendokumentasian Foto Lanjutan	Refleksi PL, pelatihan dokumentasi foto	7
7	16-21 September 2003	Wisma Hijau, Jakarta	Refleksi dan Pelatihan CO bagi kader lokal	Pelatihan CO: konsep, metode dan media, ketrampilan teknis	5
8	8-13 Desember 2003	Hotel Jayakarta, NTB	Refleksi dan Pelatihan PL Pekka	Refleksi PL, pelatihan administrasi-pembukuan dan kesehatan reproduksi	21
9	24-29 Maret 2004	Hotel Sahid, Yogyakarta	Pelatihan Community Organizing (CO) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	Pembekalan CO dan mekanisme LKM, pembukuan keuangan kelompok & LKM	21
10	8-14 Agustus 2004	Hotel Millenium, Jakarta	Forum Nasional	Refleksi perjalanan program Pekka, Pelatihan advokasi, launching buku, praktek advokasi	21
11	29 Agust - 4 Sept 2004	GG House, Cibogo, Bogor	Refleksi akhir PL	Refleksi akhir PL, pelatihan kerangka pemberdayaan perempuan, Rencana Kerja tahun 2005	21

Berbagai materi yang telah diberikan melalui kegiatan pelatihan tersebut adalah sebagai berikut:

- ***Membangun visi dan misi***

Materi pelatihan mencakup membangun perspektif keadilan gender, yaitu mencoba memahami perbedaan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan, mengapa perbedaan ini menjadi persoalan, bagaimana berbagai bentuk perbedaan itu dikonstruksikan dan oleh siapa, serta apa konsekwensi perbedaan itu pada kehidupan perempuan. Kemudian peserta juga diajak mengenal lebih jauh kehidupan perempuan kepala keluarga khususnya janda dengan segala persoalannya. Materi lainnya dalam bagian ini adalah tentang pengorganisasian basis (CO), yaitu memahami philosophy, prinsip, dan strateginya. Dengan pemahaman ini kemudian peserta mengidentifikasi langkah-langkah strategis untuk mengorganisir perempuan kepala keluarga dalam program Pekka. Dua materi pokok ini membantu peserta melihat persoalan perempuan kepala keluarga secara komprehensif sampai pada akar masalahnya sehingga mereka dapat membangun visi dan misi program secara lebih tajam.

- ***Meningkatkan kapasitas dan keterampilan sebagai pendamping lapang***

Setelah visi dan misi terbangun dalam diri peserta, kemudian mereka dibekali dengan berbagai keterampilan teknis dan manajerial untuk memfasilitasi masyarakat dengan metode dan pendekatan partisipatif. Materi yang diberikan meliputi metode dan media kreatif dalam pengorganisasian basis

(CO), berbagai tehnik Participatory Rural Appraisal (PRA), serta tehnik memfasilitasi

dan mengembangkan kelompok swadaya (pra-koperasi). Semua keterampilan tersebut akan membantu peserta memfasilitasi masyarakat dalam hal membangun kapasitas, membangun kelembagaan dan kepemimpinan perempuan local, serta memobilisasi sumber daya (termasuk juga mengakses sumber daya, melatih mereka agar mampu mengakses dll), bagaimana mengembangkan

kegiatan ekonomi, bagaimana mengembangkan kegiatan simpan pinjam dll. Materi ini diberikan dalam bentuk in-class training dan praktek lapang sehingga peserta benar-benar berlatih dalam realitas kehidupan perempuan basis.



- ***Aspek tehnik pelaksanaan program***

Dengan visi dan misi yang jelas dan keterampilan memfasilitasi masyarakat yang memadai, kemudian peserta difasilitasi untuk mempersiapkan pelaksanaan program di lapang. Hal ini mencakup langkah-langkah yang akan dilakukan, mengenal stakeholder program, dan membuat rencana kerja. Selain itu, dibuat juga berbagai kesepakatan berkaitan dengan manajemen program, mekanisme dengan sekretariat nasional, dan aturan-aturan bekerja yang mengikat semua pihak. Dengan proses ini, seluruh personil yang terlibat dalam program dibangun rasa kepemilikan terhadap program ini bukan sekedar pekerja pelaksana.

- ***Pengayaan wawasan dan materi***

Untuk memperluas wawasan dan memperkaya materi PL, dalam pelatihan diberikan juga materi-materi yang dapat dijadikan bahan untuk mendampingi kelompok pekka. Materi yang diberikan umumnya berkaitan dengan persoalan perempuan secara khusus dan persoalan masyarakat secara umum seperti kesehatan reproduksi, kekerasan terhadap perempuan, pengembangan kepercayaan diri, dan pendidikan politik.

- ***Membangun Tim Kerja***

Selain itu, seluruh materi pelatihan dipergunakan pula untuk proses membangun tim kerja yang solid di antara semua peserta yang akan menjadi pelaksana langsung program di lapangan. Pendekatan pelatihan partisipatif dengan dukungan metode dan media yang kreatif memungkinkan proses pelatihan mendukung proses tim building di antara pendamping lapangan Pekka. Untuk mengurangi kejenuhan peserta juga melakukan rekreasi dan berlibur bersama di sela-sela waktu pelatihan.



### 3. Pengembangan Modul dan Panduan

Dalam rangka memfasilitasi kegiatan lapang tim Seknas yang terdiri dari Koordinator Nasional, Koordinator Program, Koordinator Keuangan, dan tim ahli lainnya telah mengembangkan berbagai kerangka dan modul pelatihan dan pendampingan. Kerangka dan modul-modul ini dikembangkan untuk memudahkan tim PL melaksanakan tugasnya di lapang. Panduan dan modul memuat secara rinci langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PL dalam mendampingi dan melatih kelompok pekka. Modul dan panduan yang telah dibuat selama periode 2001-2004 seperti diuraikan di bawah ini.

*Tabel 3. Daftar modul dan panduan PL Pekka 2001-2004*

No.	Judul Modul dan Panduan	Gambaran isi Modul dan Panduan
1.	TOT Membangun Visi dan Misi Kelompok Pekka	<p><b>Pokok Bahasan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Potret atau kondisi dan masalah perempuan kepala keluarga</li> <li>• Posisi perempuan kepala keluarga dalam struktur masyarakatnya</li> <li>• Cita-cita atau harapan Pekka dan langkah-langkah ke depan</li> </ul> <p><b>Tujuan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peserta mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapinya</li> <li>• Peserta melihat posisinya dalam struktur sosial, politik dan budaya di masyarakatnya.</li> <li>• Peserta membangun harapan atau cita-cita dan langkah-langkah ke depan dalam mengatasi persoalan</li> </ul>
2.	TOT Motivasi Berkelompok	<p><b>Pokok Bahasan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Falsafah Berkelompok</li> <li>• Kerjasama</li> <li>• Komunikasi</li> <li>• Keswadayaan</li> </ul> <p><b>Tujuan:</b></p> <p>Secara umum tujuan dari pelatihan ini adalah memberikan motivasi pada anggota untuk berkelompok terutama kelompok yang baru terbentuk. Dan juga memberikan gambaran cara bekerjasama dan berkomunikasi dalam kelompok dan penyadaran pentingnya menggali potensi diri.</p>
3.	TOT Manajemen Kelompok	<p><b>Pokok Bahasan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengetahui Tugas, Peran, Hak dan Kewajiban Pengurus dan Anggota</li> <li>▪ Mengetahui Peraturan dan Mekanisme Kelompok yang tertuang dalam AD/ART</li> <li>▪ Perencanaan Kelompok</li> </ul> <p><b>Tujuan:</b></p> <p>Secara umum tujuan dari pelatihan ini adalah untuk mengembangkan kapasitas para pengurus kelompok tentang manajerial dan memahami strategi bersama untuk mencapai tujuan berkelompok. Secara khusus tujuan pelatihan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberi pengetahuan pada peserta tentang tugas, fungsi dan peran seorang pemimpin kelompok</li> <li>• Memberi pengetahuan pada peserta tentang peraturan atau</li> </ul>

No.	Judul Modul dan Panduan	Gambaran isi Modul dan Panduan
		<p>mekanisme kelompok yang tertuang dalam AD/ART</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberi pengetahuan pada peserta tentang cara membuat perencanaan dalam kelompok.</li> </ul>
4.	TO Kepemimpinan kelompok	<p><b>Pokok Bahasan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyadaran diri sebagai seorang pemimpin</li> <li>▪ Memahami ciri-ciri kepemimpinan yang efektif dalam kelompok</li> <li>▪ Refleksi diri tentang kepemimpinan kelompok saat ini</li> <li>▪ Membangun kapasitas kepemimpinan kelompok</li> </ul> <p><b>Tujuan:</b> Secara umum tujuan dari pelatihan ini adalah untuk mengembangkan kapasitas kelompok tentang kepemimpinan. Secara khusus tujuan pelatihan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan penyadaran pada para pengurus bahwa dirinya adalah sebagai seorang pemimpin.</li> <li>• Memberikan pemahaman pada para pengurus tentang ciri-ciri pemimpin yang baik dan efektif dan pemimpin yang lemah di dalam kelompok</li> <li>• Peserta mampu mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan, juga mengenali hambatan dan kesulitan untuk menjadi pemimpin</li> <li>• Membekali para pengurus kelompok Pekka untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinannya</li> </ul>
5.	TOT Administrasi dan Pembukuan Kelompok	<p><b>Pokok Bahasan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Administrasi kelompok</li> <li>▪ Pembukuan simpan - pinjam kelompok</li> <li>▪ Membuat Kas, Neraca Kelompok</li> <li>▪ Cara Perhitungan SHU</li> </ul> <p><b>Tujuan:</b> Secara umum tujuan dari pelatihan adalah untuk mengembangkan kapasitas para pengurus kelompok tentang administrasi dan pembukuan simpan pinjam kelompok, agar pengurus kelompok Pekka mampu mengelola kelompok dan bertanggung jawabkannya secara tertulis. Secara khusus tujuan pelatihan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan ketrampilan dalam melakukan pencatatan administrasi kelompok</li> <li>• Memberikan ketrampilan dalam melakukan transaksi keuangan kelompok</li> <li>• Memberikan ketrampilan dalam melakukan pencatatan simpan-pinjam, Kas dan Neraca Kelompok</li> <li>• Memberikan ketrampilan dalam menghitung SHU kelompok</li> </ul>
6.	Perintisan Lembaga Keuangan Mikro	<p><b>Pokok Bahasan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membangun suasana</li> <li>▪ Membangun Visi LKM</li> <li>▪ Jenis-jenis LKM</li> <li>▪ Pengalaman Perempuan Marginal Membangun LKM</li> </ul>

No.	Judul Modul dan Panduan	Gambaran isi Modul dan Panduan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Langkah-langkah Membangun LKM</li> <li>▪ Identifikasi Kebutuhan</li> <li>▪ Pembukuan untuk LKM</li> <li>▪ Studi banding ke Koperasi Setara di Klaten</li> <li>▪ RTL</li> </ul> <p><b>Tujuan:</b> Secara umum tujuan Lokakarya Lembaga Keuangan Mikro ini adalah untuk memperkuat perempuan kepala keluarga agar memiliki akses dan kontrol terhadap sumberdaya yang ada, memiliki posisi dan status sosial yang setara dengan anggota masyarakat lain, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan di berbagai tingkatan. Secara khusus tujuan pelatihan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membangun visi bersama tentang Lembaga Keuangan Mikro untuk Pekka.</li> <li>▪ Mempelajari pengalaman lembaga lain dalam membentuk LKM</li> <li>▪ Menyusun strategi pembentukan LKM</li> <li>▪ Mempersiapkan ketrampilan teknis mengelola LKM di bidang pembukuan</li> <li>▪ Menyusun Rencana Tindak Lanjut</li> </ul>
7.	Modul PRA untuk Pendamping Lapangan	<p><b>Pokok bahasan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Philosophy dan pengertian PRA</li> <li>▪ PRA dalam Siklus Program</li> <li>▪ Proses melakukan PRA</li> <li>▪ Memahami PRA sebagai alat perencanaan</li> <li>▪ PRA sebagai alat monitoring dan evaluasi</li> <li>▪ Tehnik-tehnik PRA</li> <li>▪ Praktek Lapangan</li> <li>▪ Refleksi hasil praktek</li> <li>▪ RTL</li> </ul> <p><b>Tujuan:</b> Memberikan kemampuan tehnik memfasilitasi masyarakat pada Pendamping Lapangan dengan menggali partisipasi seluruh potensi masyarakat. Secara khusus tujuan dari pelatihan ini adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memahami dan menggali kondisi fisik dan kondisi sosial suatu masyarakat</li> <li>▪ Memahami berbagai potensi masyarakat baik potensi alam maupun potensi manusia</li> <li>▪ Memahami permasalahan masyarakat dan tindakan yang sudah dilakukan.</li> <li>▪ Memahami berbagai keadaan kehidupan masyarakat dalam tiap kurun waktu</li> <li>▪ Mengenali kegiatan rutin masyarakat dari mulai kegiatan reproduktive s.d kegiatan produktif.</li> </ul>

No.	Judul Modul dan Panduan	Gambaran isi Modul dan Panduan
8.	Modul Pelatihan Asertivenes	<p><b>Pokok Bahasan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun suasana</li> <li>• Pengenalan diri</li> <li>• Pengembangan diri</li> <li>• Pengertian Assertif</li> <li>• Evaluasi</li> </ul> <p><b>Tujuan:</b> Secara umum pelatihan ini diharapkan peserta menjadi asertif dan percaya diri dalam kegiatan yang berkaitan dengan kelompok dan masyarakat. Secara khusus tujuan pelatihan ini agar peserta mengetahui dan sadar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bagaimana perilaku diri sendiri dan bagaimana merubahnya</li> <li>▪ Bagaimana menggunakan kekuatan diri sendiri sehingga tidak disia-siakan dan menyakiti orang lain.</li> <li>▪ Perilaku bisa dipelajari dan diperbaiki.</li> <li>▪ Belajar bersama bisa mengurangi rasa terasing.</li> <li>▪ Bisa meningkatkan efektifitas kerja di kelompok</li> </ul>
9.	Modul Kesehatan Reproduksi	<p><b>Pokok Bahasan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membangun Suasana</li> <li>▪ Pengertian Kesehatan Reproduksi</li> <li>▪ Pentingnya mempelajari Kesehatan Reproduksi</li> <li>▪ Dampak memahami Kesehatan Reproduksi</li> <li>▪ Masalah kesehatan reproduksi Perempuan</li> <li>▪ Mengenali gejala-gejala penyakitnya</li> <li>▪ Cara merawat/menjaga kesehatan</li> <li>▪ RTL</li> </ul> <p><b>Tujuan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Memahami pengertian kesehatan reproduksi</li> <li>▪ Menyadari pentingnya belajar kesehatan reproduksi</li> <li>▪ Mengetahui dampak dari memahami kesehatan reproduksi</li> <li>▪ Mengetahui dan menyadari bahwa masalah kesehatan reproduksi adalah masalah yang dapat terjadi pada siapapun.</li> <li>▪ RTL</li> </ul>

#### 4. Koordinasi dan Komunikasi “Stakeholder” Program

Agar program dapat dilaksanakan secara efektif, berbagai pihak terkait program ini (stakeholder) harus mempunyai sistem koordinasi dan komunikasi yang baik. Berbagai upaya telah dilakukan agar hal ini dapat terjadi selama periode proyek 2001-2004.

##### a. Rapat koordinasi dan konsultasi

Kegiatan konsultasi dan koordinasi dilakukan antara Seknas Pekka dengan berbagai pihak seperti Ditjen PMD, Komnas Perempuan selaku tim pengarah program Pekka dan dengan World Bank.

Kegiatan ini dilakukan melalui diskusi formal dan non formal, melalui telpon, email, maupun laporan, secara berkala, minimal satu bulan sekali. Koordinasi dan konsultasi juga dapat terjadi sesuai dengan kebutuhan mendesak berkaitan dengan pelaksanaan program. Pokok bahasan dalam setiap rapat koordinasi dan konsultasi umumnya berkaitan dengan progress pelaksanaan program di tingkat lapangan, masalah yang dihadapi dan rencana setiap tahapan. Selain itu, persoalan yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan proyek juga selalu dibahas dalam setiap rapat koordinasi. Selain itu Seknas juga melakukan koordinasi dan konsultasi dengan tim PL, Pemerintah Daerah juga dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan program di tingkat lapangan. Berikut jadwal rapat tim koordinasi yang pernah dilaksanakan selama 2001-2004

**Tabel 4. Jadwal rapat koordinasi Stakeholder Pekka 2001-2004**

No	Waktu	Tempat	Pokok bahasan pertemuan
1	16 November 2001	Hotel Bidakara	Dialog pemerintah pusat dan daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui PPK
2	27 & 28 Pebruari 2002	Hotel Bumikarsa	Sosialisasi Nasional Pilot Project Program Pekka
3	12 April 2002	Sekret. Komnas Perempuan	Rencana Rapat Koordinasi Steering Committee pilot Project pekka
4	26 Juni 2002	Sekret. PPK Pusat	Membahas Administrasi dan keprograman Pekka di lokasi
5	16 September 2002	Sekret PPK Pusat	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pilot Project program pekka
6	9 Oktober 2002	Sekret PPK Pusat	Membahas rencana penyelenggaraan Program pekka untuk tahun anggaran 2003
7	20 Desember 2002	Sekret PPK Pusat	Rapat koordinasi rencana Pelaksanaan pilot project Program Pekka tahun 2003
8	3 Pebruari 2003	Sekret PPK Pusat	Rapat koordinasi membahas: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hasil Evaluasi program Pekka tahun 1 (TA.2002)</li> <li>▪ Sosialisasi surat Edaran DJA untuk Program Pekka</li> <li>▪ Lokasi Program Pekka TA 2003</li> </ul>
9	13 Pebruari 2003	Sekret PPK Pusat	Rapat koordinasi membahas : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penjelasan Program Pekka dari aspek Program oleh Team Leader Seknas Pekka</li> <li>▪ Penjelasan Program Pekka dari aspek Administrasi Proyek oleh Pemimpin Proyek Pembinaan PPK</li> <li>▪ penjelasan sistem pencairan dan penyaluran dana masyarakat Program pekka oleh PHLN II, DLN-DJA</li> </ul>
10	12 Maret 2003	Sekret PPK Pusat	Persiapan Rapat Kerja dan Kunjungan Lapang program Pekka

No	Waktu	Tempat	Pokok bahasan pertemuan
11	3 April 2003	Sekret PPK Pusat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Laporan hasil rapat kerja dan kunjungan lapang program pekka</li> <li>▪ Rencana tindak lanjut pembinaan</li> </ul>
12	5 Maret 2004	Sekret PPK Pusat	Membahas Proses pencairan dana BLM di 6 Propinsi Program Pekka di tahun 2004
13	5 Mei 2004	Sekret PPK Pusat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Progres pelaksanaan Program Pekka di lapangan</li> <li>▪ Diskusi "<i>Problem solving</i>" program dan administrasi proyek</li> </ul>
14	27 Juli 2004	Sekret PPK Pusat	Evaluasi Forum wilayah (forwil) dan rencana forum Nasional (fornas) di tingkat pusat
15	9 Agustus 2004	Hotel Millenium	Rapat Koordinasi TK-PPK Nasional dan TK-PPK Daerah lokasi Program pekka

Koordinasi dan konsultasi antara Seknas Pekka dan PL dilakukan secara intensif. Tim Seknas ataupun tim PL selalu mengkomunikasikan perkembangan program di lapangan, permasalahan di lapangan, aspek-aspek teknis dan strategi program, konsultasi tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, hambatan komunikasi antara PL dengan PJOK ataupun dengan pemerintah daerah, pemberian informasi dan bahan-bahan dari Seknas ke lapang, dll. Berbagai media komunikasi yang digunakan, yaitu: telpon, e-mail, SMS, Fax, Pos, kunjungan langsung tim Seknas ke lapang ataupun PL dari 4 wilayah diundang untuk refleksi bersama dan pembekalan.

Komunikasi antar PL secara intensif dilakukan. Komunikasi tersebut tidak saja antara PL di dalam satu wilayah juga antar wilayah. Hubungan antar PL cukup baik, masing-masing saling berkabar tentang pelaksanaan kegiatan di wilayahnya dan saling berbagi pengalaman. Komunikasi di antara mereka dilakukan melalui berbagai media seperti telpon, surat, pertemuan wajib dalam satu wilayah minimal satu bulan sekali, saling kunjung dan saling membantu ketika ada permasalahan di lapang, ataupun bila ada pelatihan di kelompok. Juga di dalam satu wilayah di antara PL mengadakan kegiatan koperasi simpan-pinjam, sehingga bila PL membutuhkan dana dapat meminjam lewat wadah yang mereka kembangkan sendiri. Namun bagi wilayah yang lokasinya belum terdapat jaringan telepon, komunikasi di antara mereka agak mengalami hambatan., misalnya di wilayah NTT dan Maluku Utara.

Kegiatan koordinasi dan konsultasi antara PL dengan dinas terkait di beberapa wilayah program berjalan lancar, misalnya dengan PMD, pelaksana PPK (FK, KM. Kab, dll), lurah/kepala desa, kecamatan (Camat ataupun PJOK), ataupun lembaga-lembaga lainnya. Berbagai cara yang digunakan, antara lain kunjungan dari Dinas ke lapang ataupun PL ke kantor dinas, PL diundang dalam diskusi Musbangdes ataupun Rakor PPK, penandatanganan time sheet oleh PJOK, pemberitahuan ke kelurahan/ke Kepala Desa ketika ada pelatihan di kelompok, bahkan PL terlibat dengan kegiatan kemasyarakatan, dll. Bahkan akhir-akhir ini pihak pemerintah setempat aktif berkunjung ke lapang menanyakan tentang pelaksanaan dana BLM. Namun demikian masih ada wilayah seperti di NTT yang menghadapi hambatan komunikasi dengan pihak PJOK dan PMD. Dalam hal ini pihak Seknas Pekka ataupun Ditjen PMD telah mencoba membantu kelancaran komunikasi tersebut.

## b. Lokakarya

Pada tahun 2003, telah dilakukan lokakarya nasional Pekka guna membahas perkembangan Pekka, masalah khusus dan Pekka ke depan. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2003 di Hotel Maharaja, Jakarta. Terdapat 38 peserta hadir dalam lokakarya tersebut yang terdiri dari wakil pemerintah seperti PMD pusat, Bappenas, DJA, Depkimpraswil, sekretariat PPK, World Bank, NMC-PPK, Komnas Perempuan dan kalangan LSM seperti ASPPUK, Jari, PPSW, Koalisi Perempuan. Pada lokakarya ini, Seknas mempresentasikan perkembangan program hingga saat itu dengan menggaris bawahi berbagai kendala. Melalui proses diskusi dengan peserta, diperoleh berbagai masukan untuk meningkatkan efektivitas program dan pencapaiannya. Rekomendasi lokakarya antara lain:

- Perlu perbaikan manajemen dan koordinasi antara Seknas Pekka dengan pihak lain
- Pengembangan sistem jaminan sosial dari dana BLM
- Memfasilitasi sharing pengalaman antara FK dan PL, perlu diskusi antara Seknas Pekka dan NMC di tingkat nasional
- Melanjutkan pendampingan sampai tiga tahun sambil menyusun exit strategy
- Perlu adanya dokumentasi proses pelaksanaan program
- Pemetaan program lain yang ada di lokasi Pekka untuk merumuskan posisi tiap pihak
- Melibatkan pemerintah daerah sejak awal untuk sustainability program
- Menyusun exit strategy bagi kelompok Pekka
- Program Pekka dalam kerangka hak perempuan

## 5. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala melalui pengecekan catatan harian PL, laporan bulanan PL dan kunjungan langsung ke lapangan. Evaluasi secara mendalam dilakukan pada wilayah-wilayah yang mempunyai persoalan khusus. Secara khusus tujuan evaluasi adalah:

- o Mengidentifikasi dan menganalisa berbagai hambatan, kesulitan, dan kemudahan yang dihadapi oleh PL dalam menerapkan konsep dan kerangka program di tingkat lapangan.
- o Menyempurnakan dan membangun kesepakatan kerangka kerja untuk diterapkan pada tahapan selanjutnya.
- o Melihat secara langsung kegiatan kelompok, sistem administrasi dan pembukuan kelompok, dan mekanisme kelompok yang sedang berjalan.
- o Melihat secara langsung pengembangan kepemimpinan dan pengkaderan yang terjadi di kelompok.
- o Merekomendasikan hal-hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan program.



Tabel 5. Jadwal monitoring dan evaluasi lapang Pekka 2001-2004

No	Waktu	Lokasi	Fokus
1	02 – 05 April 2002	NTT	Peninjauan pelaksanaan program pekka oleh Bank Dunia dan mengadakan pengamatan langsung terhadap kinerja pelaksanaan program pekka
2	13 – 21 Mei 2002	NAD	Memberikan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan PL dalam melaksanakan Program Pekka
3	19 – 22 Mei 2002	Jawa Barat	Memberikan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan PL dalam melaksanakan Program Pekka
4	20 – 29 Mei 2002	Sultra	Memberikan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan PL dalam melaksanakan Program Pekka
5	04 – 12 Juni 2002	NTT	Memberikan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan PL dalam melaksanakan Program Pekka
6	14 – 17 Juni 2002	Sultra	Tim Misi Bank dunia untuk peninjauan pelaksanaan program pekka
7	26 – 27 Juli 2002	Jawa Barat	Peninjauan perkembangan pelaksanaan program pekka dan penyelesaian permasalahan di kabupaten karawang
8	24 – 30 September 2002	NAD	Monitoring dan pelatihan kepemimpinan
9	4 – 10 Oktober 2002	NTT	Monitoring dan pelatihan kepemimpinan
10	21 – 27 Oktober 2002	Sukabumi, Jabar	Monitoring dan pelatihan kepemimpinan
11	28 Oktober – 4 September 2002	Sultra	Monitoring dan pelatihan kepemimpinan
12	18 - 25 Desember 2002	Sultra	Evaluasi dan Refleksi Perkembangan Pelaksanaan Program Pekka
13	18 - 25 Desember 2002	Jawa Barat	Evaluasi dan Refleksi Perkembangan Pelaksanaan Program Pekka
14	28 – 31 Desember 2002	Sultra	Evaluasi dan Refleksi Perkembangan Pelaksanaan Program Pekka
15	28 – 31 Desember 2002	Jawa Barat	Evaluasi dan Refleksi Perkembangan Pelaksanaan Program Pekka
16	16 – 17 April 2003	Pacet, Jabar	Peningkatan kemampuan peserta pelatihan pendamping lapang dalam melakukan praktek pendampingan di masyarakat
17	7 – 15 Juni 2003	NTT	Monitoring dan Evaluasi perkembangan pelaksanaan program Pekka
18	12 – 16 Juli 2003	NTB	Monitoring perkembangan pelaksanaan program Pekka
19	21 – 24 Juli 2003	Karawang dan Subang	Monitoring perkembangan pelaksanaan program Pekka
20	25 – 28 Juli 2003	Sukabumi dan Cianjur	Monitoring perkembangan pelaksanaan program Pekka
21	1 – 6 Agustus 2003	Sultra	Monitoring dan Evaluasi perkembangan pelaksanaan



No	Waktu	Lokasi	Fokus
			program Pekka
22	8 – 15 Agustus 2003	Maluku Utara	Monitoring dan Evaluasi perkembangan pelaksanaan program Pekka
23	5 – 12 Oktober 2003	NTT	Monitoring dan Evaluasi perkembangan pelaksanaan program Pekka
24	8 – 16 Oktober 2003	Jawa Barat	Monitoring dan Evaluasi perkembangan pelaksanaan program Pekka
25	24 – 31 Oktober 2003	Sultra	Monitoring dan Evaluasi perkembangan pelaksanaan program Pekka
26	3 – 10 Januari 2004	Maluku Utara	Monitoring dan Evaluasi perkembangan pelaksanaan program Pekka
27	5 – 10 Januari 2004	NAD	Monitoring dan Evaluasi perkembangan pelaksanaan program Pekka
28	19 – 24 Januari 2004	NTB	Monitoring perkembangan pelaksanaan program Pekka
29	05 – 12 Juni 2004	NTT	Monitoring pelaksanaan Program Pekka
30	07 – 13 Juni 2004	NTB	Monitoring pelaksanaan Program Pekka
31	09 – 17 Juni 2004	NAD	Monitoring pelaksanaan Program Pekka
32	14 – 22 Juni 2004	NAD	Monitoring pelaksanaan Program Pekka
33	14 – 22 Juni 2004	Sultra	Monitoring pelaksanaan Program Pekka
34	23 Juni – 1 Juli 2004	Maluku Utara	Monitoring pelaksanaan Program Pekka
35	2 – 9 Juli 2004	Jawa Barat	Monitoring pelaksanaan Program Pekka
36	27 - 30 September 2004	Jawa Barat	Monitoring pelaksanaan program Pekka

## 4.2. Pemberdayaan di Tingkat Lapang

Kegiatan pemberdayaan di tingkat lapang difokuskan pada tiga unsur guna mencapai 5 aspek pemberdayaan yang telah diuraikan di atas. Ketiga unsur tersebut adalah pengorganisasian kelompok pekka, pengembangan jaringan dan advokasi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam setiap unsur sangat bervariasi, beragam, dan bertahapan, tergantung situasi dan kondisi setiap wilayah. Berikut uraian aktivitas yang telah dilakukan.

### 1. Pengorganisasian kelompok pekka

#### a. Pemilihan lokasi pekka

Kegiatan pengorganisasian kelompok pekka dilakukan di wilayah-wilayah yang telah ditentukan sebelumnya. Terjadi perluasan wilayah pekka kedua provinsi lain pada tahun kedua dengan tetap memegang kriteria yang telah ditetapkan. Pemilihan lokasi program dilakukan berdasarkan review data sekunder yang ada tentang jumlah perempuan kepala keluarga, dan survey awal oleh Tim Seknas ke semua wilayah tersebut. Berdasarkan hasil survey tersebut kemudian ditentukan kecamatan-kecamatan yang dijadikan lokasi program. Kecamatan yang dipilih umumnya mempunyai jumlah perempuan kepala keluarga sangat tinggi akibat migrasi, kawin cerai, suami meninggal dan konflik. Pada periode 2001-2004, pekka telah dilaksanakan di 6 provinsi, 14 kabupaten, 21 kecamatan, dan 151 desa, yang rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Daftar wilayah Pekka 2001-2004

PROPINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA
N A D	Aceh Bireun	Jeunib	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desa Teupin Keupula</li> <li>• Desa Meunasah Tambo</li> <li>• Desa Seunebok Seumawe</li> <li>• Desa Krueng Baroo</li> <li>• Blang Me Barat</li> <li>• Lampoh Oe</li> <li>• Lancang Baroh</li> <li>• Seumbok Nalan</li> <li>• Maunasah keupula</li> </ul>
	Aceh Besar	Suka Makmur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Baet Meusugo</li> <li>• Baet Lampeuoi</li> <li>• Desa Bae Mesjid</li> <li>• Desa Pante Rawe</li> <li>• Desa Dilip Lamteungoh</li> <li>• Desa Luthu Dayah Krueng</li> <li>• Desa Luthu Lam Weu</li> <li>• Tampok Blang</li> <li>• Kp. Jeurat Raya</li> </ul>
	Pidie	Mutiara Timur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desa Dayah Tanoh</li> <li>• Desa Paloh Tinggi (Dusun Paloh)</li> <li>• Paloh Tinggi (Dsn Tinggi Ara Amey)</li> <li>• Paloh Lhok. USI</li> <li>• Ulee Tutue</li> <li>• Mee Adan</li> <li>• Meucat Adan</li> <li>• Dayah Kumbah</li> <li>• Meugit</li> <li>• Kulam Ara</li> </ul>
	Aceh Selatan	Tangan-Tangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tangan-tangan Cut</li> <li>• Padang Bak Jeumpa</li> <li>• Desa Binen Krueng</li> <li>• Pantee Geulumpang</li> <li>• Gunung Cut</li> <li>• Drien Jalo</li> <li>• Padang kawa</li> <li>• Blang Padang</li> </ul>
	Aceh Timur Idi	Idi Rayeuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuala Gelumpang</li> <li>• Tanjung Kapai</li> <li>• Tanjung Anau</li> <li>• Keude Blang</li> <li>• Pendawa Puntong/Snb. Teungoh</li> <li>• Kp. Snp. Meuku</li> <li>• Kp. Blang</li> <li>• Pulo Blang</li> </ul>

PROPINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA
JAWA BARAT	Subang	Tanjung Siang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desa Sidang Laya, Kamp. Nanggela</li> <li>• Desa Pakuhaji, Kamp. Cilandeusan</li> <li>• Desa Cibuluh Kamp. Antai</li> <li>• Desa Pakuhaji, Kamp. Cisegel</li> <li>• Desa Cibuluh Kamp. Bolang</li> <li>• Desa Tanjung Siang, Dsn. Cibadak</li> <li>• Desa Cikawung</li> <li>• Desa Sirap</li> </ul>
	Sukabumi	Cibadak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desa Batu Nunggal</li> <li>• Desa Pamuruyan</li> <li>• Desa Karang Tengah</li> <li>• Desa Ciheulang Tonggoh</li> <li>• Kel. Cibadak</li> <li>• Desa Tejo Jaya</li> <li>• Desa Warna jati</li> <li>• Desa Sekar Wangi</li> <li>• Desa Sukasirna</li> <li>• Desa Pamuruyan</li> </ul>
	Cianjur	Pacet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desa Cipendawa</li> <li>• Desa Cibodas</li> <li>• Desa Sindang Laya</li> <li>• Desa Sukatani</li> <li>• Kel. Palasari</li> <li>• Desa Cimacan</li> <li>• Desa Sukanagalih</li> </ul>
	Karawang	Telaga Sari	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desa Cilowo</li> <li>• Desa Kali Jaya, Dsn. Karokrok Utara</li> <li>• Desa Kali Buaya</li> <li>• Desa Kali Sari</li> <li>• Desa Talaga Mulya</li> <li>• Desa Kali Jaya, Dsn. Citamiang</li> </ul>
SULTRA	Buton	Mawasangka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lagili</li> <li>• Gumanano</li> <li>• Bungi</li> </ul>
		Batauga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desa Bola</li> <li>• Kel. Masiri</li> <li>• Desa Poogalampa</li> <li>• Kel. Majapahit</li> <li>• Desa Lawela</li> <li>• Kel. Laompo</li> <li>• Desa Busoa</li> </ul>
		Pasar Wajo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desa Lapanda</li> <li>• Desa Kaumbu</li> <li>• Desa Winning</li> <li>• Desa Kancinaa</li> <li>• Desa Matawia</li> <li>• Desa Wolowa</li> </ul>

PROPINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA
NTT	Flores Timur	Larantuka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kel. Waibalun</li> <li>• Kel. Weri</li> <li>• Kel. Sarotari</li> <li>• Desa Puken Tobiwangi Bao</li> <li>• Kel. Pantai Besar, Pantai Besar</li> <li>• Desa Bama</li> <li>• Desa Lewo Kluok, Koliwutung</li> <li>• Desa Lamawalang</li> <li>• Desa Lamika</li> <li>• Desa Wato Tika Ile - Wolo</li> </ul>
		Ile Boleng	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desa Helan Langowuyo</li> <li>• Desa Nelelamadiken</li> <li>• Desa Boleng</li> <li>• Desa Nelereren, Dsn. Nobo</li> </ul>
		Klubagolit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desa Horinara</li> <li>• Papa-kelu</li> <li>• Hinga</li> <li>• Adobala</li> <li>• Redontena</li> <li>• Desa Suku Tokan</li> </ul>
NTB	Lombok Barat	Gerung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Babusalam</li> <li>• Dasan Geres</li> <li>• Sukamakmur</li> <li>• Gapuk</li> <li>• Beleka</li> <li>• Bayu Urip</li> </ul>
		Lingsar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peteluan Indah</li> <li>• Karang Bayan</li> <li>• Lingsar</li> <li>• Gegerung</li> <li>• Desa Griye</li> </ul>
	Lombok Tengah	Jonggat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suka Rare</li> <li>• Batu Tulis</li> <li>• Puyung</li> <li>• Gemel</li> <li>• Nyerot</li> <li>• Jelantik</li> </ul>

MALUT	Maluku Utara	Malifut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mailoa</li> <li>• Tagono</li> <li>• Ngofagita</li> <li>• Ngofabobawa</li> <li>• Peleri</li> <li>• Tahane</li> <li>• Tafasoho</li> </ul>
		Kao	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tomabaru</li> <li>• Kao</li> <li>• Dimdim</li> <li>• Gol-gol</li> <li>• Gayok</li> <li>• Sosol</li> <li>• Patang</li> <li>• Kukumutuk</li> </ul>
		Tobelo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gamsungi</li> <li>• Wari</li> <li>• Gurua</li> <li>• Popilo</li> <li>• Luari</li> </ul>

#### e. Sosialisasi Program Pekka

Kegiatan sosialisasi program merupakan kegiatan yang terintegrasi dengan proses sosialisasi pendampingan lapangan di wilayah program. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang maksud, tujuan, sasaran, pendekatan dan penerima manfaat program, yang dilakukan melalui pendekatan individu, pertemuan formal dan informal baik yang khusus ditujukan untuk proses ini ataupun menumpang pada pertemuan yang sudah ada di wilayah. Proses ini dilakukan langsung oleh PL di setiap wilayah dampingan pada bulan pertama mereka berada di lapangan. Sosialisasi dilakukan baik kepada pihak pemerintah, tokoh informal, tokoh formal, dan langsung pada masyarakat. Melalui proses ini PL mendapatkan respon dan dukungan dari berbagai pihak untuk melaksanakan tugasnya di lapangan. Dengan demikian proses selanjutnya dapat dilakukan.

#### e. Pembentukan Kelompok Pekka

Setelah sosialisasi dilakukan, dimulailah proses penumbuhan dan pengembangan kelompok perempuan kepala keluarga atau kelompok pekka. Penumbuhan dan pengembangan kelompok merupakan sarana untuk mengaktifkan dan mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan perempuan kepala keluarga. Ada berbagai strategi yang diterapkan PL dalam membentuk kelompok. Pertama PL mendatangi setiap pekka yang ada di wilayahnya ke rumah-rumah, berkenalan dan berdialog secara non formal dengan mereka. Di beberapa wilayah, PL dibantu oleh tokoh-tokoh perempuan atau aparat desa setempat dalam melakukan kunjungan. Melalui proses ini, PL membangun motivasi pekka untuk mau bekerja dalam kelompok bersama pekka lainnya. Pendekatan seperti ini dilakukan di hampir seluruh wilayah pada tahap pertama proses pembentukan kelompok di desa entry. Setelah banyak yang termotivasi, PL kemudian mengundang pertemuan formal untuk pembentukan kelompok dimana mereka menentukan nama kelompok, memilih pengurus, dan membuat kesepakatan kelompok.

Ada juga pendekatan lainnya yaitu PL meminta bantuan kepala desa untuk mengidentifikasi pekka di desa tersebut, dan memberi rekomendasi pekka potensial untuk menjadi penggerak atau kontak person. Kemudian PL mendatangi yang bersangkutan dan mendiskusikan rencana pembentukan kelompok tersebut. Kontak person kemudian akan menghubungi kawan-kawannya untuk mendiskusikan lebih jauh gagasan ini. Jika telah cukup banyak pekka yang mau terlibat, PL kemudian mengadakan pertemuan khusus untuk mendiskusikan lebih jauh dan melakukan pembentukan kelompok bersama mereka.

Selanjutnya ketika sudah ada kelompok yang terbentuk, PL juga dibantu oleh anggota kelompok yang sudah ada untuk memotivasi pekka di wilayah lainnya. Dibutuhkan waktu 1-3 bulan untuk sampai pada kesepakatan pekka membentuk kelompok. Pembentukan kelompok juga dilakukan terus menerus oleh PL yaitu mengidentifikasi kembali kelompok dalam satu desa.

Pada periode 2001-2004, telah berhasil dibentuk 198 kelompok pekka dengan jumlah anggota 4,634. orang, yang terdiri dari : NAD 44 kelompok, NTT 45 kelompok, Sultra 27 kelompok, Jabar 42 kelompok, NTB 18 kelompok, Maluku 22 kelompok. Kelompok-kelompok tersebut masih akan terus bertambah dan kegiatan kelompok pun berkembang. Sampai saat ini para PL masih melakukan pembentukan kelompok di desa-desa yang belum terbentuk kelompok pada kecamatan yang telah ditentukan. Hal tersebut dilatarbelakangi agar program dapat diakses merata di beberapa desa dengan tetap mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan. Data tentang jumlah kelompok dan anggotanya dapat dilihat di tabel berikut.

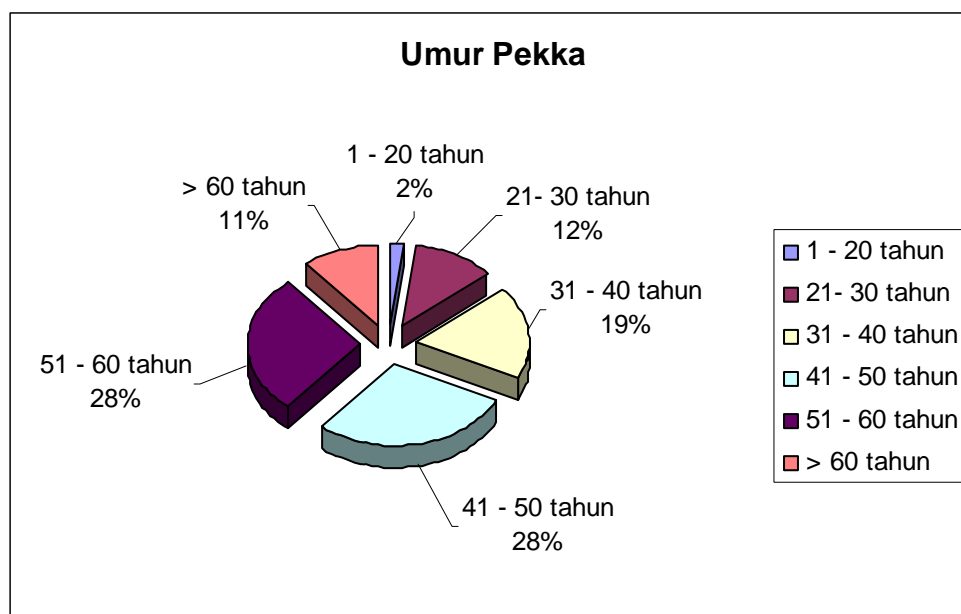
**Tabel 7. Data Jumlah Kelompok dan Anggota Wilayah Lama dan Baru**

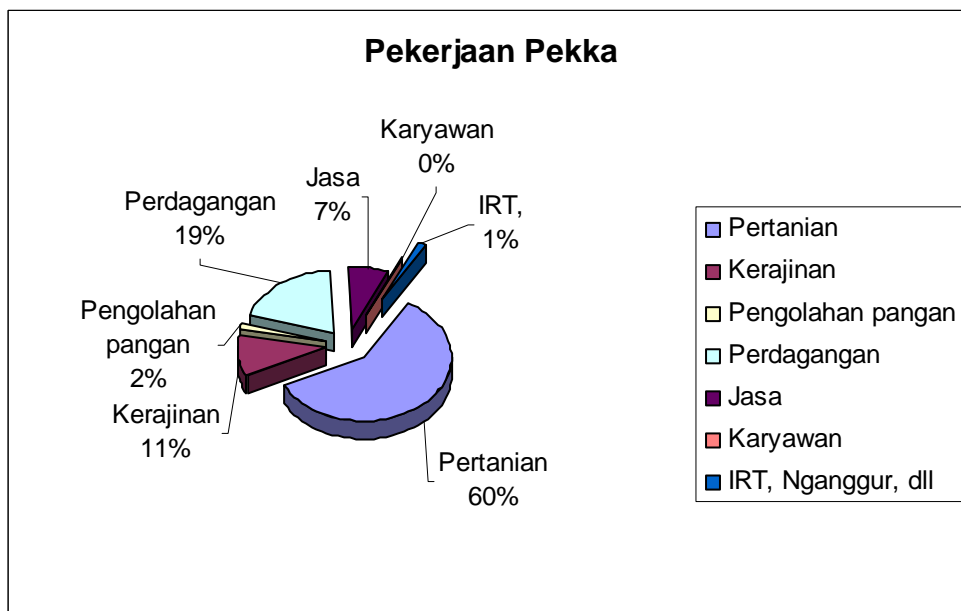
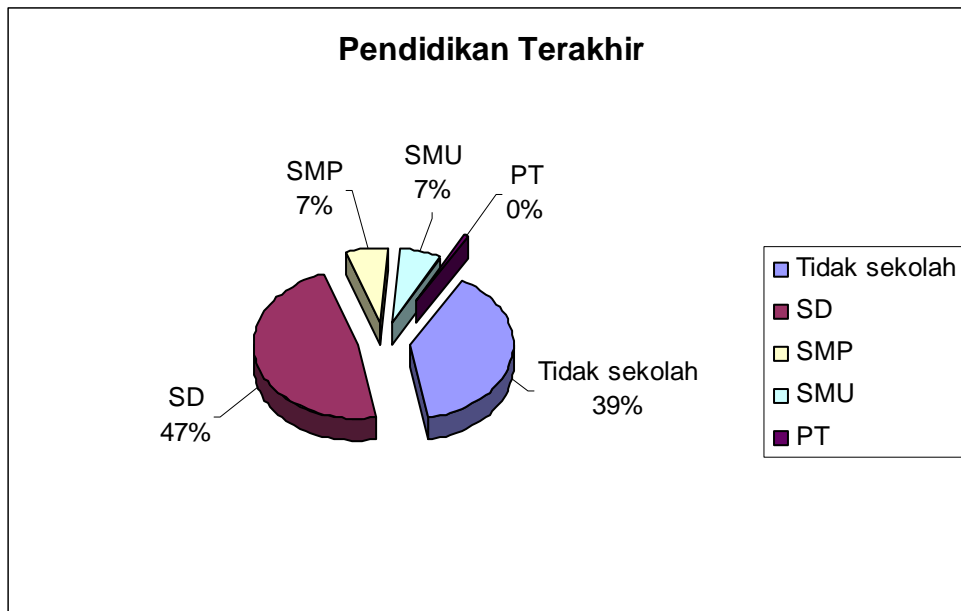
NO.	LOKASI	JML DESA	JML KELOMPOK	JML ANGGOTA
<b>I.</b>	<b>Sulawesi Tenggara -Buton</b>			
1	Kec. Mawasangka	3	10	249
2	Kec. Batauga	7	10	229
3	Kec. Pasar Wajo	6	7	263
	<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>27</b>	<b>741</b>
<b>II.</b>	<b>Jawa Barat</b>			
1	Kab. Cianjur – Kec. Pacet	7	10	214
2	Kab. Sukabumi – Kec. Cibadak	9	10	217
3	Kab. Subang-Kec. Tanjung Siang	7	11	267
4	Kab. Karawang – Kec. Telaga Sari	6	11	231
	<b>Total</b>	<b>29</b>	<b>42</b>	<b>929</b>
<b>III.</b>	<b>Nusa Tenggara Timur Kab. Flores Timur</b>			
1	Kec. Larantuka	10	12	293
2	Kec. Kelubagolit	6	15	467
3	Kec. Ile Boleng	8	18	467
	<b>Total</b>	<b>24</b>	<b>45</b>	<b>1,227</b>
<b>IV.</b>	<b>Nanggroe Aceh Darussalam</b>			
1	Kab. Aceh Bireun – Kec. Jeunib	9	9	222
2	Kab. Aceh Besar – Kec. Suka Makmur	9	9	209
3	Kab. Aceh Selatan – Tangan-Tangan	8	8	189
4	Kab. Pidie – Kec. Mutiara Timur	9	10	263
5	Kab. Aceh Timur – Kec. Idi Rayeuk	8	8	146
	<b>Total</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>1,029</b>

NO.	LOKASI	JML DESA	JML KELOMPOK	JML ANGGOTA
<b>V.</b>	<b>Maluku Utara - Kab.Halmahera Utara</b>			
1	Kec.Malifut	7	7	87
2	Kec.Kao	8	8	122
3	Kec.Tobelo	5	7	123
	<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>332</b>
<b>VI.</b>	<b>Nusa Tenggara Barat</b>			
1	Kab.Lombok Barat, Kec.Gerung	6	6	155
2	Kab.Lombok Barat, Kec.Lingsar	6	6	185
3	Kab.Lombok Tengah, Kec.Jonggat	6	6	150
	<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>462</b>
	<b>Total I-VI</b>	<b>151</b>	<b>198</b>	<b>4,748</b>

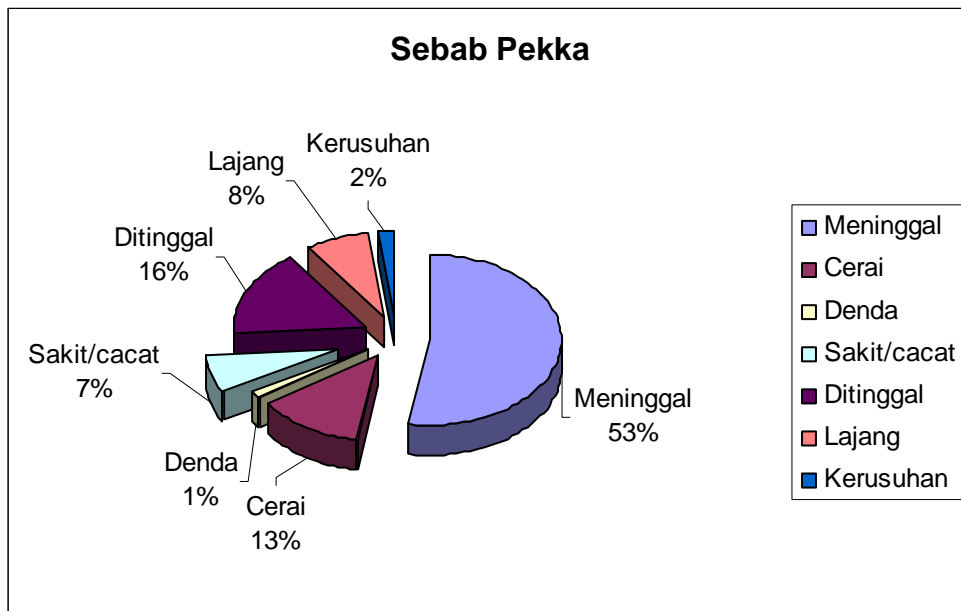
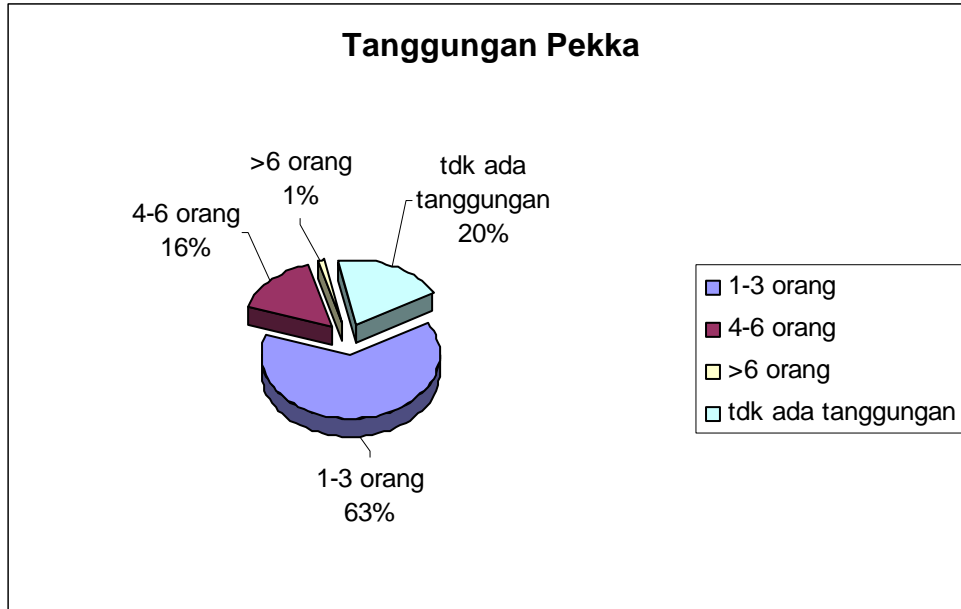
#### d. Profil kelompok pekka

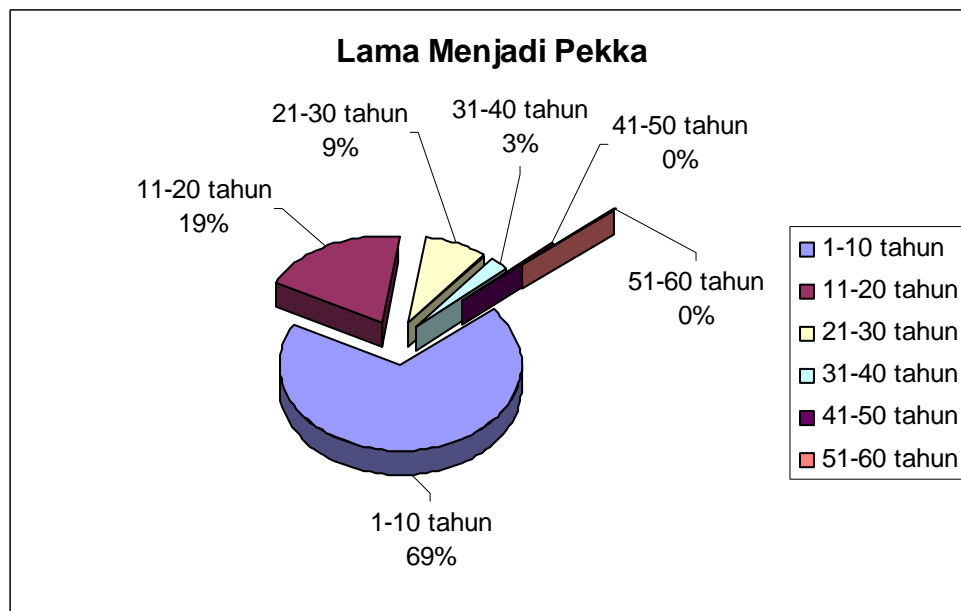
Hampir semua (86%) anggota pekka berada dalam usia produktif yaitu antara 21-60 tahun. Namun demikian pendidikan formal mereka sangat terbatas yaitu 39% tidak bersekolah sedangkan 47% hanya sekolah SD. Karena itu mereka tidak mempunyai banyak pilihan dalam bekerja. Lebih dari separuh (60%) bekerja sebagai buruh di sektor pertanian, dan sebagian lagi di sektor perdagangan sebagai pengusaha mikro. Pendapatan rata-rata Rp.314.400. Mereka rata-rata mempunyai tanggungan sebanyak 3 orang baik anak maupun anggota keluarga lainnya. Lebih dari separuh (69%) belum terlalu lama menjadi kepala keluarga yaitu di bawah 10 tahun. Mereka menjadi kepala keluarga karena berbagai sebab namun umumnya karena suami meninggal dan bercerai. Profil lengkap anggota kelompok dapat dilihat pada diagram berikut ini.











e. **Peningkatan kapasitas anggota dan pengurus kelompok pekka**

Peningkatan kapasitas anggota kelompok pekka dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan dan pendampingan rutin. Fokus pelatihan pada peningkatkan wawasan, motivasi diri, keterampilan teknis, manajerial, kepemimpinan, dan keyakinan diri.

Proses meningkatkan kapasitas mereka umumnya didahului dengan membangun visi dan misi mereka. Proses ini dilakukan melalui satu training lokakarya dimana pekka difasilitasi untuk mengidentifikasi masalah mereka, memahami posisi, status dan kondisi mereka dalam tataran masyarakat, mengidentifikasi potensi yang mereka miliki, lalu bersama membangun harapan dan impian yang ingin diraih. Setelah itu, proses ini diakhiri dengan membangun kesepakatan untuk meraih harapan dan impian dengan bekerja bersama dalam kelompok. Semua kelompok yang telah terbentuk melalui proses ini agar mereka menyadari sepenuhnya mengapa mereka berkelompok. Proses ini juga memberikan kesempatan pada mereka untuk berfikir secara kritis melihat posisi dan kondisi mereka serta membangun motivasi untuk berkembang. Pada tahap inilah proses penguatan mulai berjalan.

Setelah kelompok terbentuk, kepada semua anggota diberikan pelatihan motivasi berkelompok. Pelatihan motivasi berkelompok bertujuan untuk memahami filosofi kerjasama dalam kelompok, cara berkomunikasi dan memahami tugas, peran dan tanggung jawab masing-masing komponen dalam kelompok yaitu anggota dan pengurus. Selama pelaksanaan program telah dilakukan 279 kali pelatihan visi dan misi serta motivasi berkelompok dengan jumlah peserta yang dilatih sebanyak 6, 531 orang.

Pelatihan Kepemimpinan Manajemen, Administrasi dan pembukuan kelompok diberikan kepada para pengurus kelompok terpilih yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara agar mampu mengelola kelompok dan memimpin kelompok secara baik dan benar. Proses pelatihan dilakukan bersama

dengan pengurus kelompok lain dalam satu kecamatan sehingga mereka dapat saling mengenal, berbagi pengalaman dan saling memotivasi.

Pelatihan tentang pengelolaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) diberikan kepada pengurus Unit Pengelolaan Keuangan Desa (UPD) agar mereka mampu membantu PL dalam pengurusan dan pengelolaan BLM. Materi pelatihan berkaitan dengan berbagai aspek BLM seperti ketentuan, mekanisme, pengisian form-form, proses pencairan dan sebagainya. Pelatihan ini memberikan pula kesadaran dan wawasan kepada peserta untuk memahami betapa rumitnya jalan yang harus dilalui dalam mengakses sumber dana melalui pemerintah. Mereka juga dikenalkan dengan birokrasi dalam pemerintahan.

Pelatihan kader lokal dilakukan dengan memilih pekka potensial untuk dilatih menjadi kader lokal pengganti pendamping lapang. Pelatihan dilakukan di tingkat nasional dengan wakil peserta dua orang setiap wilayahnya. Materi pelatihan menyangkut penajaman visi dan misi, mengenal metode dan media bekerja dan memfasilitasi masyarakat. Setelah dilatih para kader lokal kemudian bertugas di wilayah masing-masing sebagai pendamping PL. Dalam jangka waktu tertentu kemudian mereka difasilitasi lagi untuk merefleksikan apa yang telah mereka kerjakan di lapangan. Selama periode 2001-2004 telah 74 orang kader lokal yang dilatih dan lebih dari separuhnya telah pula mendedikasikan waktunya untuk bekerja sebagai kader di tingkat lapangan.

Dalam rangka pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM) sebagai sumber keuangan pekka di masa mendatang, telah pula dilatih 42 orang kader LKM. Mereka dibekali dengan berbagai aspek terkait dengan LKM seperti visi dan misi LKM, pengelolaan LKM, tugas, peran dan tanggungjawab pengurus LKM, serta manajemen LKM. Kader LKM ini diharapkan dapat menjadi pengurus LKM jika suatu saat kelompok-kelompok di kecamatan tersebut telah mampu membentuknya.

Selain pelatihan, kelompok juga mendapatkan berbagai materi dalam proses pendampingannya. Materi yang diberikan berkaitan dengan kesehatan, pengembangan diri, keterampilan khusus tertentu sesuai kebutuhan mereka. Materi didiskusikan dengan kelompok oleh PL dalam pendampingannya.

Semua proses pelatihan dilakukan dengan menggunakan metode partisipatif dan penggunaan media gambar dan foto. Dengan demikian hambatan keterbatasan pendidikan formal dapat diatasi. Selain dalam bentuk pelatihan dalam kelas, peserta juga diberi kesempatan untuk berpraktek langsung dan studi banding ke kelompok lain. Pelatihan dan lokakarya yang telah diberikan pada anggota kelompok pekka dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 8. Daftar kegiatan pelatihan, lokakarya, dan diskusi kelompok pekka 2001-2004**

Judul dan jenis kegiatan	Wilayah dan level peserta	Pokok bahasan	Frekwensi dan Jumlah Peserta
Visi, misi dan motivasi berkelompok	Desa-Anggota Kelompok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun visi dan misi pekka untuk berkelompok,</li> <li>• Memahami pentingnya berkelompok.</li> <li>• Berlatih bagaimana</li> </ul>	279 kali dan 6,531 orang

Judul dan jenis kegiatan	Wilayah dan level peserta	Pokok bahasan	Frekwensi dan Jumlah Peserta
		mengembangkan kelompok	
Kepemimpinan, Manajemen dan Adm & Pembukuan	Kecamatan-pengurus kelompok	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun kesadaran potensi diri sebagai pemimpin serta membangun kapasitas sebagai pemimpin kelompok.</li> <li>• Mengenal tugas, peran, hak dan kewajiban pengurus dan anggota kelompok.</li> <li>• Mengembangkan kesepakatan peraturan dan mekanisme kelompok yang tertuang dalam AD/ART</li> <li>• Membuat perencanaan kelompok</li> <li>• Berlatih mengelola administrasi kelompok, pembukuan simpan - pinjam kelompok, membuat kas, dan neraca kelompok serta cara perhitungan SHU</li> </ul>	68 kali – 611 orang
Pengelolaan dan pengembangan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)	Kecamatan – pengurus UPD (unit Pengelolaan Keuangan Desa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memahami mekanisme prosedur dan tahapan pencairan BLM</li> <li>• Mengerti ketentuan khusus persyaratan kelompok yang bisa mengakses BLM</li> <li>• Mengerti ketentuan pemerintah tentang pendanaan, mekanisme penyaluran dana dari pemerintah, dan mekanisme administrasi BLM</li> <li>• Berlatih mengisi berbagai format usulan BLM</li> </ul>	16 kali –371 orang UPD
Pelatihan Pengorganisasian bagi Kader Lokal	Nasional – kader lokal terpilih	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempertajam visi dan misi pekka</li> <li>• Memahami tugas, peran dan fungsi kader lokal dalam rangka mencapai visi dan misi Pekka.</li> <li>• Berlatih berbagai metode dan media serta keterampilan dalam bekerja sebagai kader lokal.</li> </ul>	2 kali – 74 orang
Pelatihan Pengembangan dan Pengelolaan Lembaga Keuangan	Nasional – Kader LKM terpilih	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun visi dan misi mengembangkan LKM</li> <li>• Mengenal jenis-jenis LKM</li> </ul>	1 kali – 42 orang kader LKM

Judul dan jenis kegiatan	Wilayah dan level peserta	Pokok bahasan	Frekwensi dan Jumlah Peserta
Mikro (LKM)		beserta analisa potensinya <ul style="list-style-type: none"> <li>Berlatih mengelola dan mengembangka LKM</li> <li>RTL</li> </ul>	
Modul Pelatihan Pengorganisasian Masyarakat tingkat lanjutan	Nasional – kader lokal yang sudah pernah dilatih dan bekerja di lapangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Merefleksikan pengalaman sebagai kader lokal di lapangan</li> <li>Mempertajam visi dan misi</li> <li>Meningkatkan kapasitas dan keterampilan sebagai kader lokal.</li> <li>Berlatih sebagai fasilitator masyarakat</li> <li>Berlatih mengembangkan media kreatif dan populer dalam memfasilitasi masyarakat.</li> </ul>	1 kali – 30 orang

#### f.. Pertemuan rutin dan pendampingan

Setelah kelompok terbangun visi dan misinya, kemudian mereka difasilitasi untuk membuat kesepakatan bertemu secara rutin yang difasilitasi PL. Pertemuan rutin kelompok yang telah disepakati bersama dalam sebulan sekali atau 2 kali adalah merupakan sarana yang paling penting untuk melakukan pemberdayaan kelompok. Pada pertemuan tersebut pengurus kelompok dapat mengembangkan kepemimpinannya dan membangun kepercayaan diri antara anggota dan pengurus. Pertemuan rutin juga merupakan sarana untuk mendiskusikan perencanaan kelompok dan kesepakatan bersama. Pada pertemuan ini peran PL lebih sebagai fasilitator. Seluruh proses dilakukan oleh pengurus dan anggota. Materi membangun kesadaran kritis dan ketrampilan teknis disampaikan dengan metode partisipatif sehingga proses yang terjadi di kelompok adalah merupakan proses yang dilakukan oleh para pekka sendiri. Semua kelompok melakukan pertemuan rutin dan dalam kurun waktu 2001-2004. Kehadiran anggota dalam pertemuan masih mencapai 85%, kecuali di wilayah Aceh yang dalam kondisi konflik bersenjata. Hal ini cukup bagus mengingat kesibukkan para pekka mencari nafkah dapat saja menghambat mereka untuk bertemu. Tingkat kehadiran anggota yang cukup tinggi menandakan kelompok mulai berkembang dan anggota tumbuh kesadarannya akan manfaat kelompok.

Pendampingan dilakukan PL dengan mengadakan kunjungan langsung kepada para pekka secara individual untuk mendiskusikan persoalan-persoalan pribadi. Dalam pendampingan ini PL mengajak para pekka untuk mau terbuka dan berani menyampaikan persoalan-persoalan dalam kelompok. Dengan demikian kelompok dapat fungsikan sebagai wadah untuk membangun kepedulian dan rasa empati terhadap persoalan-persoalan orang lain. Selain kunjungan secara individual ke anggota, PL juga mengadakan kunjungan ke para pengurus untuk membimbing mereka serta menumbuhkan kepercayaan diri pengurus dalam mengelola kelompok serta mendampingi pengurus dalam melakukan administrasi dan pembukuan kelompok. Hal ini juga terjadi dari arah anggota kelompok—artinya jika merasa perlu mereka juga dapat datang ke PL setiap saat untuk berbincang. Banyak hal yang dapat

diselesaikan melalui pendekatan ini. Secara perlahan dan pasti telah terbangun kepercayaan antara PL dan dampungannya. PL sudah dianggap menjadi bagian dari kehidupan para pekka di lapangan. Ini sangat penting dan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan satu proses pemberdayaan perempuan.

#### g. Pengembangan kegiatan simpan pinjam

Pada awalnya sangatlah sulit untuk membangun pengertian kelompok untuk mulai dengan swadaya mereka sendiri. Mereka umumnya sudah terbiasa mendengar dan mengalami pendekatan proyek dengan memberikan uang ataupun barang. Oleh karena itu, mereka meminta program ini juga melakukan hal serupa yaitu memberikan uang atau bantuan sesuai kebutuhan. Meskipun ada komponen BLM dalam program ini, pendekatan yang dilakukan adalah dengan penguatan mereka. BLM hanya merupakan stimulan untuk mereka lebih berkembang. Oleh karena itu mereka secara terus menerus dimotivasi untuk mulai dengan mengakumulasi dana swadaya melalui kegiatan simpan pinjam.

Berkat upaya yang gigih dan kesabaran PL, akhirnya secara berangsur-angsur kelompok-kelompok mulai mau melakukan kegiatan simpan pinjam. Pada periode 2001-2004 sudah semua kelompok melakukan kegiatan simpan pinjam. Aturan yang diterapkan oleh setiap kelompok bervariasi sesuai dengan kondisi dan kemampuan mereka. Umumnya simpanan pokok berkisar antara Rp 1,000 s/d Rp 10,000 per anggota dibayarkan sekali waktu. Simpanan wajib yang harus dibayar secara berkala apakah bulanan, mingguan atau dua mingguan berkisar antara Rp 500 s/d 10,000 per bulan.

Simpanan ini juga telah diputar melalui kegiatan pinjaman. Dalam mekanisme pinjaman pun mereka menerapkan aturan yang bervariasi sesuai tingkat kepercayaan dan kesepakatan yang terbangun dalam kelompok. Umumnya anggota dapat meminjam sebesar Rp 50,000 s/d Rp 500,000 dengan bunga bervariasi antara 1-3% per bulan. Sebagian kelompok telah memutar dana umum mereka lebih dari 5 kali. Tujuan pinjaman juga bervariasi mulai dari kepentingan kegiatan ekonomi sampai kebutuhan hari-hari termasuk biaya sekolah anak dan berobat.

Sampai akhir periode ini (data per awal September) jumlah simpanan dan perputaran dana cukup besar untuk ukuran mereka. Hal ini memang bervariasi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Total perputaran pinjaman seluruh wilayah adalah Rp 2,967,107,400 dengan modal dari simpanan anggota Rp. 254,579,360 dan BLM Rp 2,438,002,000 serta perolehan jasa Rp 236,128,900.. Jumlah modal swadaya yang mencapai 10% dari keseluruhan modal yang mereka dapatkan termasuk cukup baik mengingat mereka merupakan kelompok termiskin yang selama ini dianggap tidak mampu untuk menyimpan dan hanya tergantung pada orang lain. Yang paling pesat perkembangannya adalah wilayah NTT dengan jumlah uang berputar sebanyak Rp. 1,338,880,400 yang berasal dari total simpanan Rp 93,634,310 dan dana BLM Rp 979,850,000 dan jasa yang diperoleh sebesar Rp 145,008,600. Hal ini dapat terjadi karena anggota pekka di NTT sudah terbiasa dengan kegiatan simpan pinjam dan mereka umumnya mempunyai kegiatan ekonomi yang membutuhkan modal dari kelompok.

Kegiatan simpan pinjam menjadi sangat berarti dan bermanfaat bagi pekka karena menghindarkan mereka dari rentenir ketika membutuhkan uang. Selain itu pengelolaan simpan pinjam dari dana mereka sendiri juga menjadi sarana belajar bagi mereka untuk mengelola dana yang lebih besar misal dana BLM. Kegiatan simpan pinjam juga menjadi proses berlatih bagi kelompok untuk

memiliki lembaga keuangan mikro sendiri dimasa mendatang. Data simpan pinjam kelompok secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 9. Daftar simpan pinjam kelompok pekka 2001-2004**

No	Wilayah/Kecamatan	Total Simpanan	Dana BLM	Total Pinjaman	Jasa
<b>WILAYAH LAMA</b>					
<b>I.</b>	<b>NAD</b>				
1	Suka Makmur	4,468,100	0	7,447,000	555,000
2	Tangan-tangan	8,673,000	192,700,000	208,481,000	1,870,500
3	Jeunib	5,311,700	270,431,500	294,362,000	9,874,100
4	Mutiara Timur	11,485,000	0	23,508,000	1,091,200
5	Idi Rayeuk	5,356,500	0	13,670,000	330,500
	<b>Total I</b>	<b>35,294,300</b>	<b>463,131,500</b>	<b>547,468,000</b>	<b>13,721,300</b>
<b>II.</b>	<b>Jawa Barat</b>				
1	Subang	10,377,500	124,050,000	151,879,000	10,607,800
2	Sukabumi	9,757,150	133,800,000	167,559,000	6,251,500
3	Cianjur	16,442,700	109,046,500	17,981,000	8,653,500
4	Karawang	10,754,300	105,550,000	95,128,500	13,559,100
	<b>Total II</b>	<b>47,331,650</b>	<b>472,446,500</b>	<b>432,547,500</b>	<b>39,071,900</b>
<b>III</b>	<b>Sultra</b>				
1	Mawasangka	15,193,600	232,624,000	257,365,000	12,460,450
2	Batauga	9,834,000	130,150,000	164,571,000	10,389,650
3	Pasar Wajo	22,440,050	159,800,000	184,538,000	12,192,300
	<b>Total III</b>	<b>47,467,650</b>	<b>522,574,000</b>	<b>606,474,000</b>	<b>35,042,400</b>
<b>IV.</b>	<b>NTT</b>				
1	Larantuka	27,030,475	308,050,000	102,008,550	41,181,300
2	Klubagolit	42,500,835	305,800,000	906,922,350	78,531,800
3	Ile Boleng	24,103,000	366,000,000	329,949,500	25,295,500
	<b>Total IV</b>	<b>93,634,310</b>	<b>979,850,000</b>	<b>1,338,880,400</b>	<b>145,008,600</b>
	<b>Total I – IV</b>	<b>223,727,910</b>	<b>2,438,002,000</b>	<b>2,925,369,900</b>	<b>232,844,200</b>
<b>WILAYAH BARU</b>					
<b>I.</b>	<b>Maluku Utara</b>				
1	Tobelo	12,069,500	0	11,080,000	1,226,250
2	Kao	7,415,000	0	5,700,000	430,000
3	Malifut	2,475,000	0	3,845,000	364,700
	<b>Total I</b>	<b>21,959,500</b>	<b>0</b>	<b>20,625,000</b>	<b>2,020,950</b>
<b>II.</b>	<b>Nusa Tenggara Barat</b>				
1	Gerung	1,949,000	0	5,255,500	357,300
2	Lingsar	3,316,100	0	6,725,000	181,150
3	Jonggat	3,626,850	0	9,132,000	724,400
	<b>Total II</b>	<b>8,891,950</b>	<b>0</b>	<b>21,112,500</b>	<b>1,262,850</b>
	<b>Total I-II</b>	<b>30,851,450</b>	<b>0</b>	<b>41,737,500</b>	<b>3,283,800</b>
	<b>Grand Total</b>	<b>254,579,360</b>	<b>2,438,002,000</b>	<b>2,967,107,400</b>	<b>236,128,900</b>

No	Wilayah/Kecamatan	Total Simpanan	Dana BLM	Total Pinjaman	Jasa
	( Wil Lama + Wil Baru )				

#### h. Pengembangan Kader Lokal

Pengembangan kader lokal merupakan salah satu strategi kesinambungan program yang diterapkan selama ini. Anggota pekka yang potensial, dipilih untuk kemudian dilatih secara intensif menjadi pengorganisir masyarakat. Setelah dilatih, kader lokal akan membantu PL dalam melaksanakan kegiatan di lapang. Dengan demikian, secara langsung kader lokal akan melihat, mengamati dan praktek langsung bagaimana mendampingi kelompok pekka di lapangan. Pada periode 2001-2004, telah dilatih 74 orang kader lokal. Namun demikian tidak semua kader lokal dapat berkembang dan melanjutkan tugasnya di lapangan. Sekitar 25% kader lokal tidak aktif di lapangan setelah dilatih karena berbagai sebab seperti kesibukan bekerja dan mengurus anak, serta merasa tidak mampu. Kader lokal yang tidak aktif digantikan dengan kader lokal baru. Wilayah yang berganti kader lokal yaitu kec. Mawasangka, Buton, kec. Jeunib, Bireuen, kec. Tanjung Siang, Subang. Hasil refleksi menunjukkan bahwa sebagian besar kader lokal mampu menyerap materi pelatihan untuk kemudian mempraktekkannya di lapangan dengan baik. PL mengungkapkan bahwa kader lokal sangat membantu tugas PL sehari-hari dalam mendampingi kelompok. Bahkan terdapat di antara mereka yang telah mampu melakukan sosialisasi program ke desa terdekat dan secara perlahan memfasilitasi pembentukan kelompok. Kader lokal mendapatkan materi-materi pelatihan seperti visi dan misi pengorganisasian masyarakat, tehnik memfasilitasi dan mendampingi masyarakat, komunikasi, keyakinan diri, dan kepemimpinan.

Selain kader lokal di setiap wilayah juga dikembangkan kader foto dan kader penulisan. Di setiap kecamatan dipilih 2 orang anggota Pekka yang potensial untuk dikembangkan menjadi kader foto. Hingga ada sekitar 30 orang kader foto dari 15 kecamatan di wilayah lama. Kader foto ini dikembangkan untuk mendokumentasikan kehidupan pekka di setiap kecamatan melalui foto-foto yang dibuatnya. Foto-foto yang mereka buat digunakan sebagai media pemberdayaan dan informasi baik untuk kalangan Pekka maupun masyarakat di luar Pekka. Sementara untuk kader penulisan tidak semua wilayah ada. Hanya ada 10 kader penulis dari 10 kecamatan. Mereka bersama 5 orang PL dilatih untuk mampu membuat tulisan populer. Kader penulisan ini dikembangkan untuk mendokumentasikan cerita kehidupan pekka melalui tulisan. Setelah selesai pelatihan mereka secara rutin diminta menulis tentang pekka di wilayahnya masing-masing. Untuk itu diterbitkan buletin Cermin menjadi ajang mereka menyalurkan kreativitas mereka menulis. Kader penulisan bersama seluruh PL wilayah lama masing-masing telah pula membuat tulisan tentang pekka yang diterbitkan menjadi sebuah buku berjudul "Sebuah Dunia tanpa Suami".

#### i. Akses Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Setelah melalui proses persiapan BLM yang cukup panjang dan intensif pada tahun pertama program, maka memasuki tahun kedua pelaksanaan program, proses pengajuan dan pencairan BLM telah bisa dilakukan pada sebagian besar wilayah. BLM merupakan dana stimulan untuk memacu pertumbuhan ekonomi kelompok dan perbaikan kesejahteraannya. Komponen terbesar dana ini adalah untuk kegiatan usaha ekonomi produktif yang harus diputarkan melalui kelompok. Namun demikian



diperbolehkan pula kelompok untuk mengalokasikan sebagian kecil dana untuk beasiswa sekolah anak-anaknya serta pengadaan makanan sehat dan obat-obatan bagi anggota pekka yang sudah tua.

Tidak semua pagu dana BLM yang disediakan diakses oleh kelompok. Hingga akhir program periode ini hanya 53,47% dari pagu BLM yang diserap kelompok di wilayah lama dan 41,44% untuk wilayah baru. Tingkat penyerapan tiap wilayah pun berbeda-beda. Yang tertinggi untuk wilayah lama adalah di wilayah NTT mencapai 66,03% dan NTB untuk wilayah baru yang mencapai 82,88%. Sedangkan yang terendah di wilayah lama adalah Sultra yang baru mencapai 34,54% dan Maluku yang gagal mengakses dana BLM. Berbagai hal mempengaruhi kondisi ini di antaranya keseimbangan jumlah kelompok dan dana yang dipatok, faktor kesiapan kelompok dan kemampuan kelompok mengelola keuangan kelompok, serta dukungan kerjasama dari aparat pemerintah lokal yang memegang peranan penting dalam proses pencairan dana BLM.

Kesalahan terbesar dari mekanisme BLM adalah penetapan pagu BLM tiap wilayah pada tahap awal sekali program ini dilaksanakan di lapangan. Pada tahap itu assesment terhadap kebutuhan dan kapasitas kelompok belum bisa dilakukan. Selain itu, tidak tersedianya data sekunder maupun primer tentang keberadaan, kondisi dan kebutuhan pekka juga merupakan faktor penting lainnya. Oleh karena itu, terjadi salah asumsi terhadap pengalokasian BLM pada sebagian wilayah seperti di Kabupaten Buton, Sultra misalnya.

Mekanisme dan proses pencairan BLM yang rumit dan melibatkan birokrasi pemerintahan lokal menyebabkan sering terhambatnya proses pencairan BLM di tingkat kelompok. Sebagian pemerintah lokal tidak mendukung percepatan proses pencairan karena kelompok tidak bersedia memberikan alokasi dana untuk mereka. Alasan tidak tersedianya dana operasional mereka kerap menjadi senjata utama dalam ketidaksihinggaan mereka memproses BLM. Dengan demikian, dibutuhkan waktu yang lama untuk memproses pencairan di beberapa wilayah. Selain itu, keterlambatan dalam menerbitkan berbagai surat yang dibutuhkan untuk eksekusi dana di tingkat wilayah juga menyebabkan proses pencairan BLM harus berkejaran dengan waktu ditutupnya perjanjian bantuan dana. Konflik bersenjata yang masih terjadi dan pemberlakuan darurat militer dan sipil di wilayah NAD, cukup menghambat proses pencairan BLM. Wilayah ini baru bisa mengakses sepenuhnya dana BLM setelah program tahap ini hampir selesai.

Daftar pencairan serta total pengajuan BLM dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 11. Data BLM berdasarkan SPM per September 2004**

No	Lokasi	Dana Tersedia	Dana Terserap	%
	<b>Wilayah Lama</b>			
	<b>NAD</b>			
1	Kec. Sukamakmur, Aceh Besar	480.000.000	210.445.850	43,84
2	Kec. Mutiara Timur, Pidie	480.000.000	240.000.000	50,00
3	Kec. Jeunib, Bireuen	480.000.000	363.499.250	75,73
4	Kec. Tangan-tangan, Aceh Barat Daya	480.000.000	432.000.000	90,00
5	Kec. Idi Rayeuk, Aceh Timur	480.000.000	135.797.100	28,29
	<b>Sub Total</b>	<b>2.400.000.000</b>	<b>1.381.742.200</b>	<b>57,57</b>
	<b>JABAR</b>			

1	Kec. Cibadak, Sukabumi	360.000.000	238.788.900	66,33
2	Kec. Pacet, Cianjur	360.000.000	270.715.241	75,20
3	Kec. Talaga Sari, Karawang	360.000.000	174.341.000	48,43
4	Kec. Tanjung Siang, Subang	360.000.000	140.607.000	39,06
	<b>Sub Total</b>	<b>1.440.000.000</b>	<b>824.452.141</b>	<b>57,25</b>
	<b>SULTRA</b>			
1	Kec. Mawasangka, Buton	900.000.000	298.558.770	33,17
2	Kec. Batauga, Buton	750.000.000	237.059.760	31,61
3	Kec. Pasar Wajo, Buton	750.000.000	293.429.915	39,12
	<b>Sub Total</b>	<b>2.400.000.000</b>	<b>829.048.445</b>	<b>34,54</b>
	<b>NTT</b>			
1	Kec. Larantuka, Flotim	600.000.000	451.501.500	75,25
2	Kec. Klubagolit, Flotim	900.000.000	414.500.000	46,06
3	Kec. Ile Boleng, Flotim	900.000.000	718.736.000	79,86
	<b>Sub Total</b>	<b>2.400.000.000</b>	<b>1.584.737.500</b>	<b>66,03</b>
	<b>Total Wilayah Lama</b>	<b>8.640.000.000</b>	<b>4.619.980.286</b>	<b>53,47</b>
	<b>Wilayah Baru</b>			
	<b>NTB</b>			
1	Kec. Lingsar	300.000.000	206.520.000	68,84
2	Kec. Gerung	300.000.000	270.000.000	90,00
3	Kec. Jonggat	300.000.000	269.410.908	89,80
	<b>Sub Total</b>	<b>900.000.000</b>	<b>745.930.908</b>	<b>82,88</b>
	<b>Malut</b>			
1	Kec. Tobelo	300.000.000	-	-
2	Kec. Kao	300.000.000	-	-
3	Kec. Malifut	300.000.000	-	-
	<b>Sub Total</b>	<b>900.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Total Wilayah Baru</b>	<b>1.800.000.000</b>	<b>745.930.908</b>	<b>41,44</b>
	<b>Total Wilayah Lama + Baru</b>	<b>10.440.000.000</b>	<b>5.365.911.194</b>	<b>51,40</b>

## 2. Pengembangan Jaringan Kelompok Pekka

Pengembangan jaringan kerja merupakan salah satu unsur penting yang harus dilakukan dalam pemberdayaan pekka. Upaya ini dilakukan dengan memfasilitasi kelompok-kelompok pekka untuk bertemu, berdiskusi, membangun agenda bersama melalui forum wilayah dan forum nasional mereka. Pada periode 2001-2004, telah diselenggarakan 11 forum wilayah dan satu forum nasional dalam rangka pengembangan jaringan pekka.

### a. Forum Wilayah (Forwil)

Forwil dilaksanakan oleh kelompok dengan difasilitasi oleh PL di tingkat kecamatan, provinsi, maupun gabungan kecamatan. Forum wilayah dihadiri oleh wakil-wakil setiap kelompok yang ada di wilayah



yang

bersangkutan. Forwil bertujuan untuk mengkonsolidasi jaringan antar kelompok, ajang tukar pengalaman dan pengetahuan, kampanye pekka pada masyarakat yang lebih luas, mengadvokasikan persoalan pekka pada pihak berwenang. Kegiatan forum wilayah beragam dan sangat kontekstual seperti lokakarya, pameran ekonomi, pameran foto, pentas seni dan budaya serta dialog dengan pengambil tokoh. Forwil umumnya diikuti lebih dari 150 orang di setiap wilayahnya. Gambaran umum tentang forwil yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 12. Daftar kegiatan forwil pekka 2001-2004

Waktu	Tempat	Tema	Kegiatan	Peserta
06 – 08 Juni 2004	Ds. Redontena, Kelubagolit, NTT	Buka mata buka hati "Pai Pupu Taan Tou"	Workshop, Dialog, Pameran Foto & Produk	200 & seluruh masyarakat
10 – 11 Juni 2004	Hotel Mareje Sariguna, NTB	Kami adalah perempuan kepala keluarga berkumpul dan berbicara	Workshop, Dialog, Pameran Foto & Produk	180
10 – 11 Juni 2004	Gedung Pengadilan, Idi Rayeuk	Saatnya bicara kami adalah perempuan kepala keluarga	Workshop, Dialog, Pameran Foto & produk	100
12 – 13 Juni 2004	Gedung pertemuan kecamatan, Jeunib	Saatnya bicara kami adalah perempuan kepala keluarga	Workshop, Dialog, Pameran Foto & produk	100

14 – 15 Juni 2004	Wisma Haji, Banda Aceh	Perempuan kepala keluarga Bersatu untuk maju	Workshop, Dialog, Pameran Foto & produk	116
15 – 16 Juni 2004	Bangunan pasar, Tangan-tangan	Saatnya bicara kami adalah perempuan kepala keluarga	Workshop, Dialog, Pameran Foto & produk	100
15 – 16 Juni 2004	Bangunan serbaguna, Pasar Wajo	Dengarlah suara kami perempuan kepala keluarga. Kami berkumpul, bersatu untuk bangkit dan maju	Workshop, Dialog, Pameran Foto & produk	100
18 – 19 Juni 2004	Bangunan serbaguna, Mawasangka	Dengarlah suara kami	Workshop, Dialog, Pameran Foto & produk	100
18 – 19 Juni 2004	Bangunan serbaguna, Batauga	Dengarlah suara kami	Workshop, Dialog, Pameran Foto & produk	100
24 – 26 Juni 2004	Tobelo, Maluku	Saatnya bicara kami adalah perempuan kepala keluarga	Workshop, Dialog, Pameran Foto	150
2 – 4 Juli 2004	Bandung, Jawa Barat	Saatnya kami bicara "kami adalah perempuan kepala keluarga"	Workshop, Dialog, Pameran Foto & produk	200

#### b. Forum Nasional (Fornas)

Fornas telah berhasil diselenggarakan pada tanggal 8 - 14 Agustus 2004 di Jakarta, dengan tema "Saatnya Bicara, Kami Perempuan Kepala Keluarga". Fornas bertujuan untuk:

- Memperkenalkan gerakan Pekka dengan perjuangannya kepada publik secara luas, pengambil kebijakan, penyelenggara pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, agar terbuka fikiran dan perhatian pada kehidupan mereka.
- Mengkonsolidasikan organisasi pekka mulai dari tingkat wilayah sampai di tingkat nasional, agar terbangun solidaritas dan kerjasama dalam memperjuangkan nasibnya.
- Membangun dukungan fihak-fihak yang peduli terhadap kehidupan dan perjuangan Pekka.



*Dialog dengan Khofifah Indar Parawansa*

Selama sepekan di Jakarta, Pekka telah melakukan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah mereka tetapkan.

▪ ***Dialog dengan tokoh, pemerintah, dan organisasi yang relevan***

Ada tiga tema dialog yang dilakukan dalam tiga kelas paralel, dimana masing-masing kelas akan dihadiri oleh lebih dari 110 orang Pekka. Tema tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan Pekka yaitu:

- Pertama, berkaitan dengan Hak dan Kedudukan Perempuan Kepala Keluarga. Diskusi ini membahas dua pendekatan yaitu sosial politik, dan nilai agama dan budaya, dengan nara sumber Khofifah Indar Parawansa (sosial politik), Lies Marcoes (agama Islam dan budaya), Intan Darmawati (Agama Kristen)
- Kedua, berkaitan dengan Akses dan Kontrol Pekka terhadap berbagai sumberdaya kehidupan. Diskusi membahas berbagai sumberdaya yang dapat diakses oleh pekka guna meningkatkan taraf hidupnya. Dialog ini menghadirkan pihak pemerintah yang diwakili oleh Abdul Aziz Husein dari Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan organisasi non pemerintah yang diwakili oleh Titik Hartini dari PKM.
- Ketiga, berkaitan dengan pekka sebagai sebuah program. Diskusi difokuskan pada visi, misi, dan strategi program serta kaitannya dengan program lain, proses pendanaan dan keberlanjutannya. Dialog menghadirkan pihak pemerintah yang diwakili oleh pimpro PPK-PMD Bito Wikantosa, lembaga donor yang diwakili oleh Scott Guggenheim dan Nurlela Hasanah dari The World Bank, serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang diwakili oleh Melky B. Hayen dari Mitra Sejahtera, NTT.



*Dialog dengan Scott Guggenheim dari The World Bank tentang strategi dan visi misi Pekka*

▪ ***Semiloka dengan Komnas Perempuan***

Sebagian anggota Pekka merupakan korban tindak kekerasan baik yang dilakukan dalam rumah tangga maupun oleh negara. Namun, mereka umumnya belum memahami sepenuhnya bahwa penderitaan mereka selama ini karena tindak kekerasan yang mereka alami. Selain itu, masih banyak perempuan lain di sekitar mereka yang mengalami hal serupa. Guna membangun kesadaran kritis mereka tentang kekerasan terhadap perempuan, Pekka melakukan diskusi intensif dengan Komnas Perempuan berkaitan dengan peran dan kontribusi gerakan Pekka untuk menghapuskan tindak kekerasan dalam rumah tangga dan masyarakat. Pokok bahasan akan difokuskan pada pemahaman tentang berbagai tindak kekerasan dan perlindungan hukumnya, serta strategi membangun gerakan Pekka untuk menghapuskan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan. Kesempatan ini juga dipergunakan Pekka untuk membangun jaringan dan dukungan tingkat nasional untuk gerakan mereka.

▪ ***Kunjungan kerja***

Untuk memahami lebih jauh lembaga legislatif dan eksekutif, serta menyampaikan berbagai gagasannya, Pekka difasilitasi untuk bertemu dengan berbagai pihak di jajaran legislatif dan eksekutif.

Namun demikian, karena pada saat kegiatan dilangsungkan, DPR terpilih belum dilantik sedangkan DPR lama sedang dalam masa reses, maka Pekka hanya dapat bertemu dan berdialog dengan:

- Suara Parlemen, dimana mereka dapat memahami apa yang menjadi visi dan misi Suara Parlemen serta menyampaikan keprihatinan Pekka agar dapat dijadikan salah satu persoalan yang dibahas oleh kelembagaan ini.
- Kaukus Perempuan di DPR, dimana mereka dapat memahami aktivitas dan perjuangan kaukus perempuan bagi keadilan dan kesetaraan gender.
- Pengurus DPP Golkar yang juga Menteri Pemberdayaan Perempuan, wakil Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan wakil Partai Amanat Nasional (PAN); dimana mereka telah menyuarakan kepentingan Pekka agar dapat dijadikan salah satu perhatian anggota DPR dari partai ini.

■ ***Pameran dokumentasi Pekka — foto, video dan tulisan***

Selama hampir tiga tahun mengorganisir diri, anggota kelompok Pekka juga telah melakukan berbagai dokumentasi berkaitan dengan kehidupan mereka. Dokumentasi ini dibuat dalam berbagai bentuk seperti foto, tulisan, dan video, yang dapat memberikan gambaran kehidupan Pekka, perjuangan, dan kegiatan mereka. Dalam forum ini mereka memamerkan karya-karya terbaik yang telah mereka buat selama ini, untuk dilihat oleh publik secara luas. Sebagian foto-foto karya terbaik yang dipamerkan, telah pernah dipamerkan di Gedung Bank Dunia, Washington DC. Karya tulisan mereka juga telah dimuat dalam buletin Pekka serta diterbitkan dalam sebuah buku.

■ ***Diskusi Buku tentang Kehidupan Pekka***

Buku kumpulan tulisan anggota Pekka yang berjudul “Sebuah Dunia tanpa Suami”, yang berisi kisah hidup mereka secara resmi diperkenalkan dalam acara ini. Buku ini didiskusikan bersama tiga orang pembahas dari kelembagaan yang berbeda seperti budayawan yang diwakili oleh Ahmad Tohari, aktivis perempuan dan media massa yang diwakili oleh Maria Hartiningsih, dan produser dan artis film yang diwakili oleh Jajang C. Noor. Setiap nara sumber memberikan bahasan dan kritik membangun terhadap tulisan tersebut sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Guna mensosialisasikan hasil karya ini, beberapa organisasi rakyat yang setara Pekka diundang untuk ikut membahas buku tersebut. Acara ini dipandu oleh seorang moderator — Myra Diarsi, yang merupakan aktivis perempuan di Indonesia.



*Acara bedah buku tentang pekka yang berjudul “Sebuah Dunia Tanpa Suami”*

■ ***Pameran Produk Pekka***

Seluruh anggota Pekka mempunyai kegiatan ekonomi produktif. Sebagian mereka merupakan produsen berbagai produk seperti produk kerajinan tenun, anyaman, produk pengolahan makanan, dll. Produk mereka merupakan sumber kehidupan diri dan keluarganya. Oleh karena itu, guna mempromosikan hasil karya dan membuka peluang pasar bagi produk tersebut, Pekka juga memamerkan dan menjual contoh produk mereka masing-masing pada acara forum. Acara ini juga dibuka untuk publik.

- ***Pentas seni budaya***

Salah satu cara anggota Pekka menghibur diri dan membangun keakraban mereka selama ini adalah melalui seni budaya. Mereka biasa menghabiskan malam-malam di kampungnya dengan menyanyi, menari, bershalawat, bersyair, dan bercerita bersama. Kegiatan ini secara langsung juga menjadi terapi dan hiburan dalam menghadapi kerasnya kehidupan yang mereka hadapi. Setiap wilayah mempunyai keunikan budaya tersendiri. Guna membagi kekayaan budaya mereka, maka diadakan pentas seni budaya yang disajikan oleh mereka dan untuk mereka dalam acara fornas ini.

- ***Lokakarya dan pelatihan***

Pekka melakukan refleksi untuk melihat sejauh mana perjalanan gerakan yang telah mereka bangun. Mereka difasilitasi untuk memperkuat gerakannya sampai di tingkat nasional dengan mempertajam visi dan misi serta membangun kesepakatan dan agenda gerakan nasional Pekka. Selain itu, mereka juga berlatih untuk melakukan advokasi guna menyuarkan kepentingan mereka pada fihak-fihak yang berkepentingan

Fornas dihadiri oleh 320 orang yang terdiri dari wakil-wakil kelompok Pekka di 14 kabupaten 21 kecamatan di 6 propinsi yaitu Nanggro Aceh Darussalam (NAD), Jawa Barat (Jabar), Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku Utara (Malut), dan Sulawesi Tenggara (Sultra).

### 3. Advokasi Pekka

Kegiatan advokasi pekka diarahkan pada dua target yaitu perubahan berbagai kebijakan yang berdampak langsung pada Pekka dan perubahan nilai sosial budaya yang mendeskreditkan pekka. Untuk mencapai kedua target tersebut, pekka difasilitasi untuk melakukan dialog dengan pengambil kebijakan dan kampanye serta pendidikan bagi masyarakat luas. Pada periode 2001-2004, pekka telah melakukan dialog dengan berbagai fihak, terutama sejalan dengan kegiatan forum wilayah yang mereka lakukan dan forum nasional. Sedangkan kampanye dilakukan dengan menyebarkan hasil dokumentasi pekka dalam bentuk video, pameran foto, buku kumpulan kisah pekka, dan penyebaran poster. Berikut ini tabel kegiatan dialog yang telah dilakukan pekka dalam periode 2001-2004

**Tabel 13. Kegiatan dialog pekka 2001-2004**

No	Tempat & Waktu	Topik Dialog	Nara Sumber	Peserta
1	Klubagolit, NTT, 6-8 Juni 2004	Hak dan Kedudukan Pekka dalam pembangunan. Kemandirian pekka dalam pembangunan desa	Pemerintah dan tokoh LSM lokal	200
2	Idi Rayeuk, NAD 10-11 Juni 2004	Buka Mata Buka Hati	Camat, Anggota DPRD Tk II	86
3	Jeunib, NAD 12-13 Juni 2004	Buka Mata Buka Hati	PJOK, Ketua BPM, Kabag PP, Kabid Sosbud Bappeda	80
4	Suka Makmur & Mutiara Timur, NAD 14-15 Juni 2004	Buka Mata Buka Hati	DPRD Tk I, wakil dari LSM Matahari, BPM Propinsi, Bappeda, PPK	119

No	Tempat & Waktu	Topik Dialog	Nara Sumber	Peserta
5	Tangan-tangan, NAD 15-16 Juni 2004	Penajaman visi misi Pekka	Pemerintah, konsultan PPK, partai politik	107
6	Mataram, NTB 10-11 Juni 2004	Perempuan kepala keluarga di NTB. Kebijakan pemerintah terhadap perempuan kepala keluarga	Pemerintah: anggota DPR, kecamatan, PMD. LSM : Kasmianti dari KSU Annisa	180
7	Pasarwajo, Sultra, 15-16 Juni 2004	Kebijakan pemerintah bagi program di daerah terhadap hak & peran perempuan. Peranan, hak dan kewajiban perempuan khususnya pekka dalam masyarakat adat dan masy secara umum	Bappeda Buton, Kepala Desa, tokoh masyarakat dari kecamatan Pasarwajo	100
8	Batauga, Sultra, 18-19 Juni 2004	Suara Hati : Kami adalah perempuan kepala keluarga, berkumpul, bersatu untuk maju dan sukses	Pemerintah: Camat, Pemda, tokoh masyarakat	100
9	Mawasangka, Sultra, 18-19 Juni 2004	Perhatian pemerintah terhadap program Pekka. Koordinasi antara Pekka dan pemerintah.	Pemerintah: PJOK, PJAK, Sekcam, Kepala desa, tokoh masyarakat	100
10	Tobelo, Maluku Utara, 24-25 Juni 2004	Hak dan kedudukan perempuan sebagai kepala keluarga	Pemerintah Partai Damai Sejahtera PDI Perjuangan	150
11	Jawa Barat, 28 Juni – 2 Juli 2004	Peran pekka dalam melakukan proses perubahan sosial. Gender budget propinsi Jabar	Sosiolog UNPAD, anggota DPR Jabar	200
12	Jakarta, 8-13 Agustus 2004	Hak & kedudukan perempuan kepala keluarga. Akses & kontrol pekka terhadap berbagai sumberdaya kehidupan. Pekka sebagai sebuah program.	Pemerintah: Meneg PP LSM : Titik Hartini, Intan Darmawati, Scott, Nurlela, Melky, pengurus partai DPR: Kaukus Perempuan, Forum Parlemen	350

## V. GAMBARAN UMUM PERKEMBANGAN SETIAP WILAYAH

Berikut ini adalah gambaran umum perkembangan program Pekka di masing-masing wilayah, yaitu : NTT – Nusa Tenggara Timur, NAD-Nanggroe Aceh Darussalam, SULTRA– Sulawesi Tenggara, JABAR- Jawa Barat, NTB dan Maluku Utara

### 5.1. NTT – Nusa Tenggara Timur



Di Nusa Tenggara Timur hingga akhir September 2004 sudah terbentuk 45 kelompok di 24 desa dengan total anggota mencapai 1.227 orang. Dari jumlah tersebut 18 kelompok ada di kec. Ile Boleng di 8 desa dengan 467 anggota, di kec. Klubagolit ada 15 kelompok di 6 desa dengan 467 anggota dan di kec. Larantuka terbentuk 12 kelompok di 10 desa dengan 293 anggota. Jumlah ini masih bisa berkembang mengingat masih banyak perempuan kepala keluarga di Kabupaten Flores Timur yang belum didampingi.

Motivasi mereka bergabung dengan kelompok juga berkembang. Yang semula ikut kelompok hanya untuk dapat ikut simpan pinjam atau dapat memperoleh bantuan (BLM), kini mereka ingin dirinya bisa berkembang, ingin membangun kekuatan bersama, ingin membangun wadah yang menjadi milik dan kekuatan mereka sendiri. Dengan demikian kegiatan kelompoknya juga berkembang. Kegiatan utama memang tetap pada simpan pinjam, tetapi kini banyak kelompok menambah waktu atau jumlah pertemuan. Ada yang tetap melakukan pertemuan 1 kali tetapi berlangsung pagi dan sore hari dan ada yang menambah frekuensi pertemuannya menjadi 2 hingga 4 kali sebulan agar dapat mengisi dengan kegiatan tambahan seperti pelatihan ketrampilan, baca tulis atau yang lainnya. Kelompok tidak hanya digunakan untuk wadah pengembangan diri anggota, tetapi juga telah berfungsi sebagai wadah untuk saling berbagi suka duka, saling membantu, saling berbagi informasi. Beberapa kelompok juga mengembangkan usaha kelompok untuk peningkatan modal kelompok seperti titi jagung bersama, tenun bersama, pengadaan benang tenun, anyaman lidi, anyaman lontar dan tempurung kelapa.

Bagi anggota sendiri banyak perubahan yang terjadi setelah mereka ikut program Pekka ini. Namun umumnya mereka semakin percaya diri, berani berpendapat dan semakin kritis. Sementara di tingkat pengurus, mereka semakin mampu melakukan administrasi pembukuan bahkan banyak di antara mereka yang mampu melakukan pembukuan hingga neraca untuk pembukuan dengan jumlah uang yang sangat tinggi yang tidak terbayangkan sebelumnya.

Berkembangnya jumlah kelompok yang ada juga menyebabkan meningkatnya intensitas hubungan antar kelompok terutama dalam 1 kecamatan. Pertemuan antar kelompok berkembang mulai di tingkat desa hingga di tingkat kecamatan. Hubungan ini terjadi terutama dalam pertemuan antar pengurus kelompok dimana mereka bisa saling bertukar pengalaman tentang persoalan yang terjadi di kelompoknya masing-masing dan cara mengatasinya. Di sisi lain juga mulai berkembang hubungan sosial antar anggota pekka tidak hanya dalam 1 kelompok, tetapi juga dengan anggota kelompok lainnya. Jika ada musibah kematian atau sakit yang menimpa anggota di suatu kelompok, maka mereka yang berasal dari kelompok lain hadir untuk ikut berbagi rasa dan membantunya.

Hubungan di tingkat yang lebih luas terjadi saat pelaksanaan forum wilayah yang berlangsung di Kec. Klubagolit dengan tema "Buka Mata Buka Hati Pupu Taan Tou". Anggota pekka yang datang dari kecamatan lain menginap tidak saja di rumah anggota pekka yang ada di Klubagolit, tetapi juga masyarakat umum di luar kelompok yang bersedia menyediakan rumahnya untuk tamu. Forum wilayah yang melibatkan peserta dari ketiga kecamatan ini memang didukung penuh oleh masyarakat khususnya karang taruna desa Redontena tempat forum berlangsung. Mereka turut terlibat menjadi panitia pelaksana dan ikut serta berpartisipasi dalam acara-acara yang ada. Kegiatan ini sangat berarti banyak, karena bisa memberi bukti langsung keberadaan kelompok pekka – sekaligus menjadikan masyarakat paham akan kegiatan kelompok pekka yang terbukti benar-benar bermanfaat buat ibu-ibu pekka yang ada. Sementara peserta sendiri merasa sangat senang bisa bertemu dengan teman-teman senasib dari kecamatan lainnya. Untuk kelompok Rere Gere dan Bunga Redon yang berada di desa

Redontena setelah acara forwil mendapat kepercayaan untuk terlibat dalam penyelenggaraan Pesta Emas Sekolah, karena model pameran dan stand pada acara tersebut mencontoh acara forwil.

Selanjutnya wakil-wakil dari kelompok di NTT hadir di Forum Nasional yang berlangsung di Jakarta. Wakil-wakil ini dipilih secara musyawarah oleh kelompoknya masing-masing. Banyak di antara mereka yang terpilih belum pernah pergi ke Jakarta. Mereka merasa bangga, karena pada acara bedah buku dipercaya untuk menampilkan seni budaya NTT. Pada kesempatan forum ini mereka juga menampilkan beberapa produk kerajinan yang mendapat perhatian dari peserta dan pengunjung lain. Sebagai hasilnya ada beberapa pesanan yang diterimanya saat pameran. Yang menarik mereka juga mendapat dukungan dari masyarakat NTT yang ada di Jakarta yang bersemangat meminjamkan peralatan untuk pertunjukkan seni budaya.

Perkembangan kegiatan simpan pinjam tetap berjalan lancar walau di wilayah ini telah ada BLM. Kesadaran untuk melakukan simpanan tidak berkurang dengan adanya BLM. Dari nilai simpanan yang tercatat tampak total simpanan tertinggi ada di Kecamatan Klubagolit (Rp. 42,500,835) diikuti kecamatan Larantuka (Rp. 27,030,475) dan kecamatan Ile Boleng (Rp. 24.103.000). Namun jika dilihat dari kelompok per kelompok, maka nilai simpanan yang tertinggi ada pada kelompok Gonzalus dari kecamatan Larantuka dengan nilai Rp. 8,020,200,- dan jika jumlah simpanan yang ada dibagi dengan jumlah anggota yang ada, maka kelompok Gonzalus ini pun memiliki nilai rata-rata simpanan tertinggi yaitu Rp. 267,340 per anggota. Di beberapa kelompok seperti Susah Hati & Cahaya Ibu di Ile Boleng, Mutiara, Tapang Holo, Burung Pelikan, Rere Gere dan Bunga Redon di Klubagolit serta Kusuma II, Gonzalus, Tonu Wujo di Larantuka, simpanan sukarela dan khususnya mencapai lebih dari 50% simpanan swadaya yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi mereka bergabung bukan sekedar mendapat pinjaman.

Di sisi pinjaman, rata-rata pinjaman yang berputar di kelompok juga tinggi. Namun semua ini juga diimbangi dengan kelancaran pengembalian. Kesadaran dan rasa tanggung jawab anggota untuk melakukan pengembalian pinjaman umumnya sangat baik. Ini tidak lepas dari semangat mereka untuk membuktikan bahwa mereka sebagai pekka dapat dipercaya. Kelompok di NTT umumnya sudah melakukan RAT. Bahkan untuk kelompok lama rata-rata sudah melakukan 2 kali RAT. Pada RAT ini dilaporkan perkembangan kelompok dan posisi keuangannya terakhir oleh pengurus dan juga dibagikan Sisa hasil Usaha dari kegiatan simpan pinjam yang mereka lakukan. Hal ini menumbuhkan kepercayaan kepada kelompok dan memberi semangat bagi mereka untuk terus melakukan kegiatan simpan pinjam.

Berdasarkan data SPM BLM yang sudah masuk, maka dari dana yang tersedia sebesar 2,4 milyar rupiah hingga saat ini sudah terserap 66,03% (Rp. 1.584.737.500). Berdasarkan data per kecamatan, maka dana BLM yang terserap di kecamatan Larantuka sudah mencapai 75,25% (Rp. 451.501.500), Ile Boleng 79,86% (Rp. 718.736.000) dan Klubagolit 46,06% (Rp. 414.500.000).

Pada umumnya dana BLM ini terbesar dimanfaatkan untuk modal usaha anggota. Selanjutnya untuk pembangunan sarana prasarana yang dibutuhkan anggota kelompok. Sisanya untuk dana pendidikan, makanan sehat dan kesehatan. Dana UEP BLM ini diakui anggota kelompok mampu meningkatkan usaha dan berdampak pada peningkatan pendapatan mereka. Sarana prasarana yang dibangun antara lain untuk perbaikan rumah anggota, MCK, pembuatan bak tempat penampungan air, tempat pertemuan kelompok dll. Namun untuk membangun tempat bak penampungan dan tempat pertemuan banyak kelompok mengalami kesulitan untuk mendapat tempat terkait dengan persoalan kepemilikan

lahannya yang umumnya milik suku suami mereka. Oleh karenanya untuk tempat pertemuan untuk beberapa kelompok dibelikan tenda terpal dan tikar lantai yang bisa digunakan sewaktu ada kebutuhan kelompok. Beberapa kelompok yang berdekatan juga membuat tempat pertemuan kelompok bersama. Dana pendidikan umumnya diberikan dalam bentuk SPP, seragam sekolah atau perlengkapan sekolah.

Pada perkembangan lebih lanjut, maka dana BLM yang ada di kelompok disepakati ditarik untuk digunakan sebagai modal Lembaga Keuangan Mikro yang dibentuk di tingkat kecamatan. LKM inilah yang berfungsi untuk memutar modal yang ada tersebut tidak hanya untuk kelompok pekka yang sudah menikmati BLM, tetapi juga untuk diputar kepada kelompok pekka yang saat ini namun belum berkesempatan mengakses dana tersebut serta untuk kelompok pekka yang akan terbentuk di kemudian hari. Pembentukan LKM di Ile Boleng telah berlangsung pada tanggal 27 Juni 2004, diikuti oleh LKM di Klubagolit pada tanggal 21 Agustus dan Larantuka pada tanggal 22 September 2004. Pembentukan LKM ini melibatkan seluruh kelompok yang ada pada kecamatan tersebut. Setiap kelompok mengirimkan perwakilan untuk ikut dalam perencanaan hingga pembentukan pengurus yang dipilih langsung oleh mereka sendiri. Atas inisiatif mereka, kelompok juga menyepakati bahwa modal LKM tidak hanya berasal dari dana BLM yang ada namun juga disepakati ada simpanan pokok dan wajib dari setiap kelompok sebagai anggota LKM. Selain itu juga telah disusun aturan (AD/ART) LKM yang meliputi antara lain: ketentuan simpanan pokok dan wajib, jasa pinjaman, masa jabatan pengurus LKM, pembagian SHU, denda jika terlambat pengembalian atau tidak hadir dalam pertemuan LKM. Beberapa kelompok kini sudah mulai memasukkan usulan pinjaman kepada LKM. Hal ini tak lepas dari meningkatnya nilai pinjaman yang diajukan oleh anggota yang telah melunasi pinjaman BLM-nya. Keberhasilan dalam memanfaatkan dan mengembalikan pinjaman yang ada telah mendorong mereka untuk mencoba meningkatkan usahanya lebih besar lagi. Selanjutnya LKM yang telah terbentuk juga melakukan pertemuan rutin bulanan yang dihadiri setiap wakil kelompok anggotanya.

Semua perubahan yang ada umumnya mendapat respon yang positif dari masyarakat. Masyarakat yang semula mencemooh mereka kini semakin menghargai dan mengakui keberadaan mereka. Demikian juga dengan sebagian besar pemerintah desa yang ada. Mereka yang dulu tidak terlalu peduli kini berbalik mendukung. Ada juga dari pemerintah yang membantu memberi tambahan modal seperti yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan kepada kelompok ikat tenun (gabungan 3 kelompok yang mengembangkan tenun di Waibalun kec. Larantuka).

Hingga tahun ketiga pelaksanaan program Pekka ini pendampingan secara rutin tetap dilakukan oleh PL. 3 PL yang ada mempunyai komitmen yang sangat tinggi untuk memajukan perempuan kepala keluarga yang ada di wilayahnya. Hanya saja jika di awal program PL melakukan pendampingan sendiri, maka kini banyak dibantu oleh kader yang telah dikembangkan dari anggota kelompok. Jumlah kader di NTT kini mencapai 26 orang yang terdiri dari 12 kader lokal, 6 kader foto, 2 kader penulisan dan 6 kader LKM. Kader-kader tersebut khususnya kader lokal banyak terlibat membantu PL dalam melakukan pendampingan kepada kelompok-kelompok. Mereka umumnya telah melakukan perannya dengan baik dalam memotivasi anggota untuk aktif dan membantu pengurus kelompok dalam administrasi kegiatan simpan pinjam dan BLM. Untuk meningkatkan kerjasama antar mereka, maka setiap bulan secara rutin di setiap kecamatan dilakukan pertemuan antara PL, kader dan pengurus. Diskusi antara PL dengan kadernya juga sering dilakukan sehingga tampak cukup tinggi peningkatan kemampuan dan ketrampilan kader yang ada.

PL sendiri tetap melakukan kunjungan pertemuan rutin kelompok, kunjungan rumah ke rumah baik kepada anggota atau pengurus. Hanya untuk kelompok yang melakukan pertemuan rutin lebih dari 1 x

sebulan, maka pendampingan pertemuan sebagian didelegasikan kepada kader lokal yang ada. PL berupaya mengembangkan kelompok baru dan memperkuat kelompok-kelompok yang baru dikembangkan. Bersama kader yang ada, PL terus mendampingi pembukuan kelompok yang berkaitan dengan simpan pinjam dan BLM. PL juga melakukan penguatan LKM yang baru dibentuk serta merintis terbentuknya jaringan kelompok ke tingkat yang lebih luas.

Wilayah NTT juga berkesempatan mengirimkan wakil 1 orang kader (Katarina L Betan) dan 1 orang PL (Bernadete Deram) untuk pergi ke Amerika menghadiri pameran Foto sekaligus melakukan kunjungan ke berbagai lembaga untuk studi banding. Kunjungan ini memberi pelajaran berharga dan menambah rasa percaya diri bagi keduanya.

Tantangan yang dihadapi:

- o Adat yang ada sangat merugikan kaum perempuan kepala keluarga dalam perkawinan. Hal ini secara umum disadari oleh ibu-ibu pekka yang ada, tetapi hingga kini belum ada kekuatan untuk mengubahnya.
- o Ada kelompok pekka yang kecewa karena belum berhasil mengakses dana BLM seperti yang diperoleh kelompok lain. Kekecewaan mereka banyak didorong oleh pihak luar.
- o Ada tekanan kuat dari pemerintah lokal kepada PL agar semua sisa dana BLM bisa dicairkan sebelum closing date. Mereka menganggap jika hal ini tidak bisa dilakukan, maka merupakan kesalahan PL.
- o Di beberapa kelompok masih ada beredar isu dari luar bahwa dana BLM yang diterima merupakan dana pemerintah yang harus dihibahkan, sehingga PL harus harus memberi pengertian ulang
- o Ada kelompok yang kesulitan melakukan penggantian pengurus, karena anggota yang ada buta huruf dan rata-rata sudah tua dan tidak ada yang bersedia menjadi pengurus.

## 5.2. NAD—Nanggroe Aceh Darussalam

Dari target 10 kelompok setiap kecamatan, hanya Kec. Mutiara Timur yang berhasil mencapainya. Hal ini bukan berarti jumlah pekka yang potensial untuk menjadi kelompok terbatas ataupun tidak ada upaya PL untuk melakukan usaha untuk mencapainya, tetapi karena lebih banyak terbentur situasi keamanan yang harus diakui tetap merupakan faktor kunci. Pendampingan yang sempat tidak berjalan maksimal saat adanya Darurat Militer ternyata tidak juga menjadi lebih mudah setelah adanya Darurat Sipil. Bahkan tingkat keamanan di beberapa desa dampingan kembali rawan. Sebagai gambaran di kec. Idi Rayeuk sebenarnya sudah terbentuk 9 kelompok, namun 1 kelompok akhirnya terpaksa menghentikan kegiatannya, karena kelompok tersebut dianggap oleh pihak yang bertikai sebagai bentukan pihak yang menjadi lawannya. Akibatnya keselamatan mereka yang terlibat dalam kelompok baik PL dan kader yang mendampingi maupun masyarakat yang menjadi anggota menjadi terancam. Hingga akhir September 2004 sudah terbentuk 44 kelompok di 43 desa dengan 1.029 anggota dengan rincian kec. Mutiara Timur ada 10 kelompok di 9 desa dengan anggota 263 orang, kec. Suka Makmur (9 kelompok, 9 desa, 209 orang), kec. Jeunib (9 kelompok, 9 desa, 222 orang), kec. Tangan-tangan (8 kelompok, 8 desa, 189 orang) dan kec. Idi Rayeuk (8 kelompok, 8 desa, 146 orang).

Motivasi mereka untuk berkelompokpun cukup beragam. Ada yang mereka berkelompok murni untuk pengembangan diri namun kemudian berubah setelah adanya isu dari luar (kunjungan tamu, informasi pemerintah, dll) tentang adanya bantuan sehingga menjadi kurang bersemangat ketika dana bantuan tersebut tidak muncul. Suasana ini diperparah dengan banyaknya bantuan yang bersifat langsung yang

diberikan kepada masyarakat tanpa syarat yang susah. Sebaliknya ada juga kelompok yang dibentuk karena motivasi bantuan tetapi akhirnya tetap bersemangat untuk terus berkelompok walaupun bantuan tidak segera cair, karena telah merasakan manfaat kelompok bagi dirinya baik dari simpan pinjam yang ada ataupun pengembangan diri.

Kegiatan kelompok lebih banyak dalam bentuk pertemuan rutin yang diisi dengan kegiatan simpan pinjam. Pertemuan ini masih banyak dilakukan di Meunasah (musholla) untuk keamanannya. Kegiatan tambahan lainnya lebih banyak yang berkaitan dengan keagamaan seperti pengajian wirid yasin, sholawat, dll. Ada juga kelompok yang telah melakukan tambahan kegiatan arisan, ketrampilan, baca tulis, belajar tanda tangan dan ada juga melakukan kegiatan usaha, namun ini belum terjadi di semua kelompok. Kelompok Cut Nyak Dhien di Idi Rayeuk misalnya mengisi pertemuan dengan belajar buta huruf yang terbuka untuk ibu-ibu selain pekka. Sementara kelompok di Jeunib mengadakan les bahasa Inggris untuk anak pekka dan non pekka.

Walau demikian adanya kelompok telah memberi dampak besar bagi anggotanya. Mereka secara umum tampak lebih percaya diri, berani mengemukakan pendapat dari yang masih terbatas dalam kelompoknya hingga di tingkat forum, bermusyawarah jika akan mengambil keputusan atau jika ada masalah di kelompok dan di beberapa kelompok sudah berani menentang pihak luar yang menjelekan kelompoknya. Secara umum kelompok memberi kesempatan bagi mereka untuk belajar membuka diri dengan ibu pekka senasib dalam kelompoknya, saling berbagi pengalaman dan pengetahuan serta berorganisasi. Bagi pengurus mereka kini banyak yang telah mampu berorganisasi dan mampu melakukan pembukuan dari yang sederhana hingga ada yang telah mampu hingga neraca. Selain itu ada anggota pekka yang dipercaya menjadi pengurus PKK di desanya, karena dianggap mampu berorganisasi.

Kerjasama antar kelompok sudah terjalin cukup baik. Setidaknya secara rutin 1 – 2 bulan sekali dilakukan pertemuan antar pengurus kelompok untuk bertukar pengalaman dalam memecahkan persoalan yang dialami kelompoknya. Salah satu puncak kegiatannya adalah berhasilnya mereka menyelenggarakan forum kecamatan/wilayah yang hampir sepenuhnya diselenggarakan oleh mereka sendiri. Mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya seluruh kelompok yang ada saling bantu dan saling berbagi peran. Untuk kec. Idi Rayeuk, Jeunib dan Tangan-tangan, kegiatan forum ini diselenggarakan di kecamatan mereka sendiri. Sementara untuk kec. Mutiara Timur dan Suka Makmur, kegiatan forum diselenggarakan di Banda Aceh, karena kondisi keamanan di lokasinya yang tidak terlalu mendukung. Forum kecamatan/wilayah ini digunakan sebagai ajang bagi pekka untuk memperkenalkan diri pada masyarakat luas. Pada kegiatan forum yang terbuka untuk umum ini juga diselenggarakan pameran foto dan produk karya ibu-ibu pekka.

Keberhasilan pekka dalam menyelenggarakan forum di tingkat kecamatan ternyata cukup berdampak nyata. Masyarakat setidaknya menyadari bahwa kegiatan kelompok Pekka yang ada selama ini ternyata tidak sia-sia. Bahkan atas keberhasilan menyelenggarakan forum kecamatan, maka kelompok-kelompok Pekka di kecamatan Jeunib telah mendapat kepercayaan untuk mengadakan pameran rakyat menyambut ulang tahun kemerdekaan RI pada tanggal 18 - 19 Agustus 2004 lalu.

Setelah merintis jaringan di tingkat kecamatan ataupun antar kecamatan, wakil-wakil kelompok juga berkesempatan mengembangkan jaringan yang lebih luas dengan hadir di Forum Nasional Pekka yang diselenggarakan di Jakarta. Walau sempat diwarnai kekhawatiran mereka atas kemampuan dirinya yang mereka nilai masih rendah serta ketakutan akan dijual atau dijadikan TKW, mereka akhirnya bisa

bertemu dengan wakil pekka dari daerah lain dan menyadarkan mereka bahwa banyak perempuan yang bernasib sama seperti dirinya. Di sisi lain forum ini membangkitkan semangat mereka untuk melakukan perubahan terhadap kelompoknya agar bisa berhasil seperti pengalaman kelompok lain yang telah mereka dengar. Mereka juga senang bisa belajar advokasi dan berlatih berhadapan dengan berbagai pihak.

Perkembangan simpan pinjam memang sangat terkait dengan kondisi ekonomi yang ada. Perubahan kondisi ekonomi berdampak pada simpanan kelompok. Ada saat simpanan berlangsung lancar, tetapi saat kondisi ekonomi mereka menurun, maka simpanan tidak selancar biasanya. Namun dilihat dari perkembangan yang ada secara umum kegiatan simpanan kelompok berjalan cukup lancar dan cenderung meningkat. Demikian juga perputaran pinjaman di beberapa kelompok menunjukkan tingkat yang menggembirakan. Nilai pinjaman yang berputar relatif lebih besar dari dana yang terkumpul. Artinya dana simpanan yang ada benar-benar dimanfaatkan oleh anggota kelompoknya. Memang bagi mereka kelompok telah menjadi wadah tempat meminjam, karena sebagai pekka sering tidak mudah untuk mendapat pinjaman.

Berbeda dengan lokasi dampingan pekka yang lain, proses pencairan BLM di NAD terjadi lebih lambat. Proses pencairan ini bahkan sempat dihentikan sementara saat diberlakukannya Darurat Militer. Akibatnya pencairan BLM baru mulai berlangsung September 2003 lalu di Jeunib. Sementara untuk 4 kecamatan yang lain proses pencairan baru mulai berlangsung tahun 2004. Berdasarkan data SPM yang ada, maka di Kec. Jeunib telah berhasil dicairkan dana BLM senilai Rp. 363.409.250 (75,71% dari dana yang tersedia), Kec. Tangan-tangan senilai Rp. 432.000.000 (90%), Kec. Idi Rayeuk Rp. 135.797,100 (28,29%), Kec. Mutiara Timur Rp. 240.000.000 (50%) dan Kec. Suka Makmur (43,84%).

Dana BLM yang telah cair telah dimanfaatkan sesuai usulan yang diajukan. Paling banyak tentunya untuk modal usaha ekonomi produktif. Usaha yang diusulkan oleh kelompok sangat beragam, mulai dari ternak, ojek hingga angkutan umum. Sedangkan usaha perorangan untuk pertanian, dagang, pembuatan ikan asin, dll. Selebihnya dana tersebut digunakan untuk pendidikan, makanan dan kesehatan dan untuk sarana prasarana bagi pekka. Dana pendidikan diberikan bagi anak-anak pekka dalam bentuk seragam, sepatu, buku, ATK. Dana makanan diberikan kepada janda-janda tua tidak hanya mereka yang menjadi anggota kelompok pekka tetapi juga yang bukan anggota. Dana ini biasanya diberikan dalam bentuk beras, telur dan gula. Dana kesehatan diberikan kepada mereka yang sakit dan harus berobat ke Puskesmas. Sedang sarana prasarana umum digunakan antara lain untuk pembuatan balai pertemuan kelompok sekaligus untuk pengajian anak, juga untuk membuka pustaka umum seperti untuk pembelian kitab-kitab agama, Al Quran dan lemari.

Dana BLM ini setelah diputar di kelompok nantinya juga akan dikumpulkan sebagai modal LKM di setiap kecamatan. Hingga akhir September ini LKM telah dirintis di kec. Jeunib dan Tangan-tangan yang telah melakukan pencairan BLM lebih awal dibanding kecamatan lain. Sementara di kecamatan lain rencana LKM sudah disosialisasikan kepada kelompok yang ada.

Pendampingan kelompok di NAD tidaklah mudah. Faktor keamanan menjadi penentu. Pendampingan yang dilakukan meliputi kunjungan pada pertemuan rutin, kunjungan ke rumah anggota dan pengurus kelompok, pendampingan simpan pinjam kelompok, pendampingan pembukuan. PL juga banyak melakukan kunjungan ke rumah, karena masih ada anggota kelompok yang malu mengungkapkan masalahnya di hadapan orang banyak. Namun PL terkadang harus membatalkan rencana kunjungan jika lokasi yang dikunjungi atau yang dilalui ternyata tidak aman. Mereka menjalin hubungan baik

dengan masyarakat umum di lokasi dampingan dan sebagai balasannya mereka mendapat bantuan berupa informasi jika ada perubahan situasi keamanan. Mereka juga berupaya bersikap netral kepada pihak-pihak yang bertikai. Namun demikian PL di Mutiara Timur sempat mengalami pemeriksaan oleh pihak-pihak yang bertikai, karena disangka menjadi kaki tangan pihak lawan. Kondisi keamanan yang tidak kondusif ini kadang menyebabkan ada lokasi yang tidak dapat didampingi secara rutin bahkan terpaksa kegiatan pendampingan yang dilakukan harus dihentikan untuk keamanan tidak hanya bagi PL dan kader sebagai pendamping, tetapi juga masyarakat yang didampingi. Oleh karena itu sangat berarti peran kader-kader yang ada. Untuk wilayah yang tidak bisa didampingi langsung oleh PL, maka kader-kader yang ada bisa menjadi penghubung PL dengan kelompok. Mereka sebagai orang lokal di wilayah tersebut lebih mudah bergerak dan tidak terlalu dicurigai.

Hingga akhir September 2004 ini di NAD telah memiliki 20 kader lokal, 10 kader foto, 3 kader penulis dan 10 kader LKM. Dari jumlah yang ini memang tidak semuanya mampu berperan membantu kegiatan pendampingan. Ada juga di antara mereka yang tidak berani melakukan pendampingan, karena khawatir akan kondisi keamanan mereka akibat trauma dengan kematian yang dialami anggota keluarga dekatnya. Untuk mengoptimalkan pendampingan, maka dilakukan pembagian wilayah dampingan bagi setiap kader lokal yang ada. Kemudian untuk meningkatkan kemampuan kader yang ada, maka secara rutin dilakukan pertemuan kader bersama PL di setiap kecamatan. Pada kesempatan tersebut mereka saling bertukar pengalaman, saling memberikan masukan agar dapat memperbaiki kemampuan diri bahkan pada kesempatan tersebut mereka juga boleh mengkritik terhadap PL. Pada kesempatan yang lain bersama PL, mereka juga ikut dalam pertemuan koordinasi PL dan kader lokal se-NAD.

Dari wilayah NAD juga dikirim 1 orang kader Foto (ibu Sudarmi) untuk ikut pameran foto di Amerika. Di sana ia dipercaya untuk memberikan pidato sambutan. Hal yang tidak terbayang oleh dirinya bahwa ia mampu melakukannya.

#### Tantangan yang dihadapi

- o Keamanan merupakan persoalan utama di NAD. Kegiatan pendampingan maupun kegiatan kelompok sering harus tertunda karenanya. Bahkan ada kegiatan kelompok yang harus vakum, karena masalah ini.
- o Surat izin berkaitan dengan persoalan keamanan. Jika melakukan kegiatan tanpa izin, maka bisa berdampak panjang. Bahkan untuk pergi keluar lokasi untuk acara yang harus dilakukan di luar, maka harus benar-benar diurus. Hal ini agar anggota kelompok maupun PL tidak terkena masalah kemudian hari. Persoalannya kadang tidak mudah mengurus surat izin ini. Butuh waktu yang tidak pendek, sehingga cukup merepotkan. Hal ini banyak dialami oleh PL jika akan membawa kader atau anggota kelompoknya mengikuti acara di luar NAD. Hal yang sama dialami PL Mutiara Timur saat melakukan pengurusan surat-surat dan pasport ketika salah seorang kader foto dari wilayahnya akan ke Amerika.
- o Perubahan dari Darurat Militer ke Darurat Sipil ternyata berdampak terhadap posisi pemerintahan sipil yang ada. Dulu PL seperti dilepas saat ada Darurat Militer dengan catatan menjadi tanggungan sendiri jika mereka mendapat masalah. Setelah pemerintah sipil kembali ke posisinya mereka merasa bahwa PL selama ini tidak melakukan koordinasi dan masuk wilayahnya tanpa permissi. Padahal dulu sangat sulit PL mencari aparat pemerintah di desa. Mereka tidak berada di lokasi ataupun lepas tanggung jawab, tetapi kini mereka mempersoalkan keberadaan program ini di wilayahnya.

- PL melakukan koordinasi dengan pemerintah dilakukan dengan PJOK, camat ataupun Tim Koordinasi tingkat Kabupaten. Dalam pemikiran PL jika telah berkoordinasi dengan mereka, maka segala informasi yang telah mereka laporkan akan sampai ke pemerintah yang lebih tinggi. Namun kenyataan sering tidak terjadi. Akibatnya banyak tuduhan PL tidak melakukan koordinasi dengan aparat pemerintah. Bahkan di tingkat propinsi dianggap semua kecamatan tidak melakukan koordinasi. Padahal ternyata ditelusuri ada salah pengertian. PL melakukan pelaporan kepada PJOK atau Tim Koordinasi Kabupaten dan kadang ke TK Propinsi. Laporan ini kadang tidak sampai kepada kepala BPMD Kabupten. Saat Kepala BPM Propinsi bertanya kepada kepala BPMD kabupaten, maka diinformasikan tidak ada laporan dari PL sama sekali. Kepala BPM tidak mengecek kepada TK Kabupaten ataupun TK Propinsi.
- Dampak hubungan yang kurang baik dengan pemerintah menyebabkan ada beberapa administrasi yang berkaitan dengan BLM yang tidak berjalan lancar. Seperti SK PJOK dan PJAK yang terhambat di kec. Suka Makmur, Mutiara Timur dan Idi Rayeuk. Untungnya setelah dilakukan pendekatan terus menerus oleh dengan pihak terkait dan juga surat PMD Pusat (untuk kasus kec. Mutiara Timur), maka persoalan ini dapat diselesaikan.
- Persoalan administrasi BLM menyebabkan pencairan dana BLM di lokasi tersebut menjadi terhambat, akibatnya di kec. Suka Makmur dan Mutiara Timur kepercayaan anggota terhadap program Pekka, PL dan bahkan kader sangat menurun. Apalagi ditambah ada isu yang menyatakan bahwa dana BLM ini sudah cair dan disalahgunakan oleh PL atau isu PL sengaja menghambat pencairan. Akibatnya sempat terjadi ancaman oleh keluarga pekka dan masyarakat terhadap PL dan kader di kec. Suka Makmur. Mereka hendak mencegat PL dan ingin menghakiminya. Bahkan sempat muncul pula ancaman pembunuhan terhadap PL dan kader. Untung hal ini dapat dicegah setelah PL diberitahu KL agar tidak datang ke lokasi tersebut. Dengan bantuan tokoh masyarakat setempat akhirnya persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik. Dampak dari keterlambatan pencairan dana BLM juga menyebabkan turunnya tingkat kehadiran anggota dalam pertemuan di beberapa kelompok.
- Namun persoalan berkurangnya kehadiran anggota tidak hanya akibat belum adanya pencairan dana BLM. Penurunan kehadiran ini kadang terjadi berkaitan dengan kegiatan panen. Ada pula penurunan kehadiran disebabkan tingkat kesadaran yang masih rendah.
- Setelah pencairan BLM juga terjadi persoalan. Untuk pengurusan pencairan tahap berikutnya kadang tidak mudah dilakukan, ini tidak lepas karena mereka tidak mendapat bagian sepeser pun padahal merasa telah berjasa membantu pencairan. Bahkan di kec. Jeunib, beberapa kepala desa (pak Keuchik) menunjukkan ketidaksukaan terhadap PL.
- Banyak orang luar yang ingin masuk kelompok setelah ada informasi tentang BLM
- Masih banyak orang-orang di luar kelompok yang usil dan mengata-ngatai para anggota kelompok.
- Beberapa pengurus masih harus selalu didampingi dalam pembukuan, karena sering lupa karena sibuk dengan pekerjaannya sendiri
- Ada anggota kelompok di Suka Makmur yang merasa cemburu atas terpilihnya anggota lain sebagai kader atau kelompok yang kecewa karena di kelompoknya tidak ada yang terpilih sebagai kader
- Sempat ada kekhawatiran pada ibu-ibu kelompok di Mutiara Timur jika namanya digunakan untuk pembukaan rekening kelompok, karena khawatir mereka tidak bisa bertanggungjawab bilamana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecurian, perampokan, penodongan, hilang atau salah hitung. Akibat kekhawatiran ini ada pengurus UPD yang mundur.

### 5.3. Sultra — Sulawesi Tenggara



Program Pekka di wilayah ini berada di Kabupaten Buton di tiga kecamatan, yaitu; kecamatan Pasar Wajo, kecamatan Batauga dan kecamatan Mawasangka. Pemilihan kecamatan tersebut didasarkan dari data yang didapat dari berbagai instansi pemerintah setempat juga kunjungan langsung ke lokasi, yaitu: banyaknya eksodus atau pengungsi dari Maluku di tiga kecamatan tersebut, banyak perempuan yang menjadi kepala keluarga disamping para eksodus juga penduduk asli, tingkat kemiskinan lebih tinggi dibandingkan kecamatan lain baik eksodus maupun penduduk asli, terdapat program PPK sebagaimana persyaratan yang ditentukan oleh PMD pusat bahwa administrasi program Pekka disatukan dengan program PPK.

Dengan informasi data yang didapat tersebut, program Pekka yang semula ditujukan hanya kepada perempuan kepala keluarga yang merupakan eksodus atau pengungsian dari Ambon-Maluku ke Buton. Namun karena penduduk asli juga banyak yang berstatus perempuan kepala keluarga dengan kondisi yang sangat miskin, maka partisipan program ini akhirnya tidak dibatasi untuk para eksodus saja tetapi juga para perempuan kepala keluarga dari penduduk asli. Sehingga kelompok yang terbentuk saat ini campuran dari penduduk asli dan eksodus.

Latar belakang perempuan kepala keluarga di wilayah Sultra penyebab tertinggi adalah suami meninggal dunia dan tingginya suami yang melakukan migrasi atau merantau ke luar negeri terutama ke Malaysia untuk mencari nafkah. Kepergian tersebut dalam waktu cukup lama berkelanjutan dan tidak jelas kepulangannya. Tingginya laki-laki yang melakukan migrasi di Sultra disebabkan karena sumberdaya ekonomi setempat sangat minim. Sumberdaya yang tersedia adalah sumberdaya alam dari pinggiran laut yaitu budidaya rumput laut, sedangkan tanah tidak subur dan berbatu. Tanaman pangan yang tumbuh terutama ubi atau singkong. Dengan kondisi alam yang tidak subur tersebut menyebabkan tingginya laki-laki yang melakukan migrasi. Sementara perempuan merawat anak-anak sambil bekerja keras untuk menghidupi mereka, karena meskipun suami bekerja di perantauan tapi sangat jarang mengirimkan uang.

Dengan adanya program Pekka tersebut membuahkan harapan besar bagi para perempuan kepala keluarga untuk bisa keluar dari himpitan kemiskinan. Berbagai kegiatan yang difasilitasi dalam program tersebut, seperti; mengorganisir para perempuan kepala keluarga dalam suatu wadah kelompok dengan didampingi oleh Pendamping Lapang (PL), melatih para Pekka untuk mengembangkan modal swadaya dengan melalui kegiatan simpan-pinjam, membangun visi-misi Pekka untuk kehidupan Pekka dan kelompoknya ke arah yang lebih baik, mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan managerial pengurus kelompok, mengembangkan kader kelompok dalam berbagai bentuk dan tingkatan, membangun kesadaran kritis anggota terhadap persoalan ketidakadilan yang terjadi disekitarnya dengan melalui berbagai pelatihan dan dialog dengan para pengambilan kebijakan, merintis lembaga keuangan mikro (LKM) sebagai wadah untuk memfasilitasi sumber modal Pekka secara berkelanjutan, membangun jaringan Pekka diberbagai tingkatan (tingkat kecamatan, propinsi, dan nasional).

Dari kegiatan tersebut perubahan yang dapat dilihat secara kuantitatif sebagai berikut:

- Jumlah Kelompok

Jumlah kelompok saat ini di tiga kecamatan, di 16 desa telah terbentuk 27 kelompok dengan total anggota 741 orang. Jumlah desa, kelompok dan anggota sampai dengan 2004 relatif tidak mengalami perubahan, hal tersebut karena konsentrasi pendampingan lebih terfokus pada peningkatan kualitas.

- Kegiatan Simpan-Pinjam

Dari data sampai dengan akhir Agustus 2004 jumlah modal swadaya yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela dan simpanan khusus sebesar Rp 47.467.650,- dan sumber modal dari dana BLM sekitar Rp 522.574.000,- sehingga total modal sebesar Rp 570.041.650,- Dana tersebut telah dipinjamkan keanggota sebesar Rp 606.474.000,- dan telah diangsur sebesar Rp 246.946.700,- sehingga sisa pinjaman yang masih bergulir di anggota sebesar Rp 359.527.300,-. Jumlah jasa pinjaman yang baru dibayarkan sebesar Rp 35.042.400,-.

- Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

BLM di wilayah ini telah melakukan pencairan hingga tahap ke II dan sedang proses tahap ke III, namun untuk kecamatan Mawasangka ada permasalahan dalam BLM, yaitu : di desa Lagili hanya sampai pencairan tahap ke I karena ada permasalahan dalam pengelolaan BLM dan ikut campur tangannya pihak luar sehingga PL memutuskan BLM tahap ke II dan ke III tidak diteruskan sebelum permasalahan bisa diatasi. Untuk permasalahan di desa Gumanano dan Bungi ada permasalahan SK-PJOK habis waktunya dan PJAK telah pensiun maka pencairan tahap III dikhawatirkan tidak tercapai. Dana BLM yang telah cair berdasarkan SPM yang dikirim ke Seknas untuk wilayah ini sampai dengan akhir Agustus 2004 diakses sebesar 32,52% (Rp 780.410.517,-) dari Rp 2.400.000.000 dana yang tersedia untuk BLM. Dana tersebut terdiri dari kategori I (UEP, Sarana Prasarana, Beasiswa) sebesar Rp 700.468.202 dan kategori II (Makanan sehat) sebesar Rp 79.942.315,-

- Kader Kelompok

Dalam melakukan pengkaderan di kelompok ada beberapa model. Model tersebut adalah sebagai berikut:

- o Kader Lokal : adalah merupakan kader yang dilatih untuk memfasilitasi anggota kelompok dalam pendampingan rutin dengan tujuan untuk memandirikan kelompok sehingga tidak terus-menerus difasilitasi oleh PL, dengan demikian program Pekka dapat berkelanjutan. Jumlah kader yang telah dilatih di Sultra tiap kecamatan 4 orang, sehingga total jumlah kader di Sultra 12 orang.
- o Kader photo : adalah merupakan kader yang dilatih untuk mendokumentasikan pengalaman hidup Pekka sehari-hari dengan menggunakan kamera poket. Jumlah kader yang telah dilatih tiap kecamatan 2 orang, sehingga jumlah kader photo sebanyak 6 orang.
- o Kader Penulisan : adalah merupakan kader yang dilatih untuk mendokumentasikan pengalaman hidup pekka dalam bentuk tulisan. Jumlah kader yang dilatih satu wilayah 3 orang (2 anggota dan 1 PL). Pengalaman Pekka telah di publikasikan lewat buletin dengan nama "cermin" terbit 3 bulanan, dan penulisan buku dengan judul " Dunia tanpa suami".
- o Kader keuangan : adalah merupakan kader yang dilatih untuk membantu kelompok dalam mengembangkan kegiatan simpan-pinjam dan perintisan pembentukan LKM (Lembaga Keuangan Mikro). Jumlah kader yang dilatih tiap kecamatan 2 orang, sehingga total kader sebanyak 6 orang.
- o Pengurus Kelompok: adalah merupakan anggota kelompok potensial yang dipilih oleh anggota, pengurus tersebut telah dilatih agar mampu mengelola kelompok. Jumlah pengurus tiap kelompok 3 orang, sehingga total pengurus yang telah dilatih berjumlah 81 orang.

Sedangkan perubahan secara kualitatif adalah sbb:

- o Visi dan misi berkelompok sudah dipahami oleh anggota secara merata.
- o Anggota mempunyai keyakinan yang kuat dengan melalui kelompok dapat membangun kekuatan bersama dan dapat memperbaiki kehidupan Pekka ke arah yang lebih baik.

- o Dengan diakuinya keberadaan Pekka dan didengar suaranya di tengah-tengah masyarakat, hal tersebut menimbulkan keyakinan dan kepercayaan diri Pekka untuk berani berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat yang lebih luas.
- o Anggota dan pengurus telah terbangun saling percaya, dan kerjasama yang cukup baik untuk sama-sama memajukan kelompok.
- o Munculnya keinginan anggota dan pengurus untuk mengembangkan diri, yaitu: dengan meningkatkan ketrampilan teknis usaha dan mengembangkan kegiatan simpan pinjam ke arah yang lebih besar dan berkelanjutan dalam bentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
- o Kepercayaan diri Pekka secara merata meningkat tidak saja pada diri pengurus juga pada anggota kelompok.
- o Kapasitas pengurus dan kemampuan managerial pengurus meningkat dan mulai berani memimpin kelompok sendiri dan mampu memecahkan persoalan kelompok meskipun masih sederhana.
- o Pengurus dan anggota kelompok mulai kritis terhadap persoalan-persoalan ketidakadilan yang berada di sekitarnya.
- o Jaringan antara kelompok mulai terbangun di berbagai tingkatan mulai dari tingkat kecamatan, wilayah dan merambah ke tingkat nasional.
- o Adanya kesadaran bersama untuk mengembangkan kelompok ke arah gerakan yang lebih strategis dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat yang mempunyai visi yang serupa.
- o Dari sejumlah kader yang dilatih dan dapat melakukan tugasnya secara aktif baru sekitar 65%, sedangkan sisanya masih disibukan dengan mencari nafkah dan juga belum percaya diri.

### **Koordinasi dan Komunikasi**

Bentuk koordinasi yang dilakukan dalam memfasilitasi program Pekka adalah :

- o Koordinasi dan komunikasi antara PL dengan Seknas Pekka di wilayah Sultra dilakukan dengan melalui telpon, fax, surat, saat monitoring, saat pelatihan dan refleksi tahunan. Koordinasi tersebut biasanya dilakukan ketika ada persoalan di lapang PL mengkonsultasikan dengan Seknas Pekka, atau usulan-usulan PL dalam kegiatan kelompok.
- o Koordinasi dan komunikasi antara PL dengan tim PL lainnya dilakukan pertemuan sebulan minimal satu kali. Dalam pertemuan tersebut terjadi sharing informasi, mendiskusikan permasalahan kelompok, dll.
- o Koordinasi antara PL dengan Kader Kelompok: Rata-rata sebulan sekali PL mengadakan pertemuan dengan para kader lokal guna mendiskusikan kegiatan-kegiatan yang sudah difasilitasi oleh kader, mengkritisi dan memberi masukan pada kader untuk perbaikan ke depan, berbagi pengalaman antar kader, dll.
- o Koordinasi antara Kader tingkat wilayah: Kegiatan ini belum lama diadakan di Sultra minimal 3 bulan sekali.
- o Koordinasi antara PL dengan Pemerintah lokal: Koordinasi ini dilakukan antara PL dengan PJOK atau dengan Kecamatan. Sebulan sekali PL datang ke kantor kecamatan untuk melaporkan kegiatan secara lisan, dan juga tertulis juga penandatanganan time sheet. Untuk Koordinasi antara PL dengan PMD atau dengan tim program PPK dalam kegiatan ini kadang-kadang PL diundang Rakorbang oleh tim Koordinasi PPK tingkat Kabupaten.

### **Tantangan yang dihadapi**

Dalam pelaksanaan program Pekka di Sultra ada beberapa permasalahan yang menjadi tantangan berjalannya program Pekka di lapang, seperti:

- Masih terdapat anggota yang tidak membayar angsuran dengan tepat dan menunggu ditagih pengurus kelompok. Sebagian pengurus juga masih kurang dapat bertindak tegas.
- Adanya dana BLM di kelompok mengundang pihak luar ikut intervensi terhadap kelompok.
- Kelompok belum mampu mengembangkan usaha besar, masih terjebak dengan usaha-usaha kecil.
- SK PJOK dan PJAK menjadi hambatan terhadap pencairan dana BLM, sehingga pencairan tahap ke III di kecamatan Mawasangka terhambat, sedangkan di Kecamatan Batauga terhambat pencairan tahap ke III karena PJOK keberatan untuk melakukan tandatangan usulan, di Pasar Wajo SPM belum bisa diambil dikarenakan harus PJOK yang mengambil sementara PJOK belum ada kesempatan mengambil.
- Adanya ikut campur pihak luar dalam kelompok Pekka, menjadikan anggota kelompok menjadi kacau, misalnya di desa Lagili kelompok diminta untuk bubar, di desa Lapanda ibu-ibu Pekka oleh keluarganya dilarang mengembalikan dana BLM karena merupakan dana hibah. Namun ada juga yang menjadikan kelompok semakin kuat untuk bertahan dan melawan pihak-pihak luar yang mengganggu misalnya di Pasar Wajo.
- Sistem dan mekanisme kontrol yang jelas dan transparan belum mampu dikembangkan di kelompok, sehingga jika terjadi penyimpangan di kelompok akan mudah diketahui.
- Persoalan koordinasi dalam program Pekka selalu menjadi alasan bagi pemerintah daerah, sehingga menyulitkan PL dalam melakukan dampingan kelompok.

#### 5.4. Jabar — Jawa Barat

Program Pekka di wilayah ini berada di empat (4) kabupaten di empat (4) kecamatan, yaitu; kecamatan Pacet - Kab. Cianjur, kecamatan Cibadak – Kab. Sukabumi, Kec. Tanjung Siang – Kab. Subang, dan kecamatan Telaga Sari – Kab. Karawang. Pemilihan kecamatan tersebut didasarkan dari data yang didapat dari berbagai instansi pemerintah setempat juga kunjungan langsung ke lokasi, yaitu: banyaknya perempuan yang menjadi kepala keluarga, tingkat kemiskinan lebih tinggi dibandingkan kecamatan, terdapat program PPK sebagaimana persyaratan yang ditentukan oleh PMD pusat bahwa administrasi program Pekka disatukan dengan program PPK.

Memulai program Pekka di Jawa Barat tidaklah mudah, bahkan bisa disebut paling sulit dibandingkan dengan wilayah lain. Berbagai faktor yang melatar belakangi sulitnya memulai program ini, seperti: tingkat kawin cerai di Jawa Barat sangat tinggi dan bahkan membudaya hal ini menyebabkan sulitnya PL memilih partisipan dalam program Pekka, pengaruh ibu kota cukup nampak yaitu dengan pola hidup yang konsumtif. Selain itu banyaknya program pengentasan kemiskinan dengan pendekatan yang berbeda dengan yang dilakukan program Pekka yaitu pendekatan pemberdayaan dengan terlebih dahulu melakukan penyadaran untuk mau melakukan perubahan, melatih untuk pemupukan modal swadaya. Dengan pola masyarakat yang terbiasa seperti tersebut di atas maka untuk mengajak masyarakat khususnya ibu-ibu Pekka tentu saja mengalami kesulitan.

Pada awal mula sosialisasi dan pembentukan kelompok masyarakat selalu menanyakan bantuan materi yang akan diberikan. Ketika pendamping Lapang menyampaikan bantuan yang akan diberikan adalah dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk keluar dari kesulitan, maka kelompok yang sudah terbentuk bubar. Hampir tiap minggu membentuk kelompok kemudian bulan berikutnya bubar.

Melihat kondisi seperti tersebut di atas kemudian PL melakukan beberapa strategi yang dilakukan, di antaranya merubah penampilan agar terkesan PL yang mengajak berpenampilan menyakinkan,

menunjukkan photo-photo kegiatan ibu-ibu kelompok dari wilayah lain, mengajak beberapa Pekka melihat kegiatan secara langsung di wilayah dampingan lainnya, dll. Nampaknya strategi tersebut dapat mempengaruhi ibu-ibu Pekka untuk mau mendengarkan yang disampaikan PL. Akhirnya kelompok sudah mulai stabil. Beberapa hal persoalan-persoalan Pekka sudah mulai terbuka untuk didiskusikan.

Latar belakang perempuan kepala keluarga di wilayah Jabar penyebab tertinggi adalah tingginya tingkat perceraian, dan suami meninggal dunia. Ketika terjadi perceraian perempuan di Jabar akan muda menikah lagi dan kemudian terjadi perceraian kembali penyebabnya biasanya terjadi perselingkuhan. Ketika bercerai biasanya anak menjadi tanggungan ibu. Untuk itu perempuan mengalami kesulitan dalam membiayai anak-anaknya sementara sumberdaya alam yang tersedia milik pengusaha kota. Kegiatan produktif yang bisa dilakukan yaitu menjadi buruh dengan upah murah.

Dengan adanya program Pekka tersebut dan mulai sadarnya masyarakat khususnya ibu-ibu Pekka untuk berkelompok, menimbulkan harapan besar bagi para perempuan kepala keluarga untuk bisa ke luar dari persoalan kemiskinan. Berbagai kegiatan yang difasilitasi dalam program tersebut, yang juga tidak jauh berbeda dilakukan di wilayah-wilayah lainnya dengan metode partisipatif dan melibatkan orang dan potensi yang ada dimasyarakat sebanyak-banyaknya dengan terlebih dahulu mengorganisir para perempuan kepala keluarga dalam suatu wadah kelompok dengan didampingi oleh Pendamping Lapang (PL), melatih para Pekka untuk mengembangkan modal swadaya dengan melalui kegiatan simpan-pinjam, membangun visi-misi Pekka untuk kehidupan Pekka dan kelompoknya ke arah yang lebih baik, mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan managerial pengurus kelompok, mengembangkan kader kelompok dalam berbagai bentuk dan tingkatan, membangun kesadaran kritis anggota terhadap persoalan ketidakadilan yang terjadi disekitarnya dengan melalui berbagai pelatihan dan dialog dengan para pengambilan kebijakan, merintis lembaga keuangan mikro (LKM) sebagai wadah untuk memfasilitasi sumber modal Pekka secara berkelanjutan, membangun jaringan Pekka di berbagai tingkatan (tingkat kecamatan, propinsi, dan nasional).

Dari kegiatan tersebut perubahan yang dapat dilihat secara kuantitatif sebagai berikut:

- Jumlah Kelompok

Kelompok Pekka di Jabar yang berada di empat kabupaten berjumlah 42 kelompok 929 anggota terdiri dari : Kab. Karawang – Kec. Telaga Sari berjumlah 11 dengan anggota 231 orang, Kab. Subang – Kec. Tanjung Siang berjumlah 11 kelompok dengan anggota 267 orang, Kab. Sukabumi – Kec. Cibadak berjumlah 10 kelompok dengan anggota 217 orang, dan Kab. Cianjur – Kec. Pacet berjumlah 10 kelompok dengan anggota 214 orang. Jumlah anggota dan kelompok mengalami peningkatan sekitar 9% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah kelompok ini dilakukan oleh kader lokal.

- Kegiatan Simpan-Pinjam

Dari data sampai dengan akhir Agustus 2004 jumlah modal swadaya yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela dan simpanan khusus di 4 kabupaten sebesar Rp 47,331,650,- dan sumber modal dari dana BLM sekitar Rp 472,446,500,- sehingga total modal sebesar Rp 519,778,150,-. Dana tersebut telah dipinjamkan keanggota sebesar Rp 432,547,500,- dan telah diangsur sebesar Rp 275,095,100,- sehingga sisa pinjaman yang masih bergulir di anggota sebesar Rp 157,452,400,-. Jumlah jasa pinjaman yang baru dibayarkan sebesar Rp 39,071,900,-.

- Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

BLM di wilayah ini semuanya telah melakukan pencairan hingga tahap ke III. Jumlah dana BLM yang telah cair berdasarkan SPM yang dikirim ke Seknas untuk wilayah ini sampai dengan akhir September 2004 diakses sebesar 57,25% (Rp 824.452.141,-) dari Rp 1.440.000.000 dana yang tersedia untuk BLM.

- Kader Kelompok

Sama dengan wilayah lainnya pengkaderan di kelompok terdiri dari beberapa macam, yaitu:

- o Kader Lokal: Jumlah kader yang telah dilatih di Jabar di tiap kecamatan 4 orang, sehingga total jumlah kader yang telah dilatih 16 orang.
- o Kader photo: Jumlah kader yang telah dilatih tiap kecamatan 2 orang, sehingga jumlah kader photo sebanyak 8 orang.
- o Kader Penulisan: Jumlah kader yang dilatih satu wilayah 4 orang (3 anggota dan 1 PL)
- o Kader keuangan: Jumlah kader yang dilatih tiap kecamatan 2 orang, sehingga total kader sebanyak 8 orang.
- o Pengurus Kelompok: adalah merupakan anggota kelompok potensial yang dipilih oleh anggota, pengurus tersebut telah dilatih agar mampu mengelola kelompok. Jumlah pengurus tiap kelompok 3 orang, sehingga total pengurus yang telah dilatih berjumlah 108 orang.

Sedangkan perubahan secara kualitatif adalah sbb:

- o Visi dan misi berkelompok sebagian besar sudah mulai dimengerti. Perubahan tersebut terlihat dari motivasi anggota yang semula karena adanya dana BLM, namun saat ini anggota punya keinginan kelompok lebih maju.
- o Anggota mempunyai cita-cita mempunyai usaha bersama yang besar dan dapat meningkatkan pendapatan bagi anggota.
- o Keberadaan Pekka mulai diakui keberadaannya dan mulai didengar suaranya.
- o Anggota Pekka mulai diperhatikan dan dilibatkan dalam berbagai kegiatan di masyarakat atau di pemerintahan setempat.
- o Anggota dan pengurus bekerjasama dan saling pengertian. Hal tersebut dapat terlihat dari berbagai kegiatan dapat berjalan dengan baik.
- o Anggota kelompok dan pengurus mempunyai keinginan yang sama untuk mengembangkan kelompok ke arah mandiri dan berkelanjutan yaitu dengan mendirikan LKM sebagai wadah untuk mengembangkan modal bagi Pekka secara berkelanjutan.
- o Meningkatnya kepercayaan diri Pekka untuk berada di tengah-tengah masyarakat
- o Meningkatnya keberanian Pekka untuk menyatakan dirinya sebagai seorang janda, yang mana sebelumnya kata-kata janda malu untuk disebut di depan umum.
- o Kapasitas pengurus dan kemampuan managerial pengurus meningkat dan mulai berani memimpin kelompok sendiri dan mampu memecahkan persoalan kelompok.
- o Daya kritis pengurus dan anggota kelompok meningkat dan mulai berani mempertanyakan persoalan-persoalan yang dianggap merugikan dirinya.
- o Jaringan antar Pekka mulai terbangun dalam berbagai tingkatan.
- o Dari sejumlah kader yang dilatih dan dapat melakukan tugasnya secara aktif baru sekitar 60%, sedangkan sisanya masih disibukan dengan mencari nafkah dan juga belum percaya diri.

## Koordinasi dan Komunikasi

Bentuk koordinasi yang dilakukan dalam memfasilitasi program Pekka adalah :

- o Koordinasi dan komunikasi antara PL dengan Seknas program Pekka di wilayah Jabar dilakukan dengan melalui telpon, fax, surat, pertemuan di kantor Seknas, saat monitoring, saat pelatihan dan refleksi tahunan. Hal-hal yang dikoordinasikan berkaitan dengan berbagai kegiatan di lapang, berkonsultasi tentang persoalan-persoalan yang ada di lapang.
- o Koordinasi dan Komunikasi antara PL dengan tim PL lainnya dilakukan pertemuan sebulan minimal satu kali. Dalam pertemuan tersebut terjadi sharing informasi, mendiskusikan permasalahan kelompok, dll.
- o Koordinasi antara PL dengan Kader Kelompok: rata-rata sebulan sekali PL mengadakan pertemuan dengan para kader lokal guna mendiskusikan kegiatan-kegiatan yang sudah difasilitasi oleh kader, mengkritisi dan memberi masukan pada kader untuk perbaikan kedepan, berbagi pengalaman antar kader, dll.
- o Koordinasi antara PL dengan Pemerintah lokal: Koordinasi ini dilakukan antara PL dengan PJOK atau dengan Kecamatan. Kegiatan ini sebulan sekali PL datang ke kantor kecamatan untuk melaporkan kegiatan secara lisan, dan juga tertulis juga penandatanganan time sheet. Untuk Koordinasi antara PL dengan PMD atau dengan tim program PPK dalam kegiatan ini kadang-kadang PL diundang Rakorbang oleh tim Koordinasi PPK tingkat Kabupaten atau juga diundang ke tingkat Propinsi di Bandung.
- o Dalam pelaksanaan program Pekka di lapangan PL mendapat dukungan dari pemerintah setempat dari mulai kecamatan sampai dengan Propinsi juga PMD kabupaten.

### **Tantangan yang dihadapi**

Dalam pelaksanaan program Pekka di Jabar ada beberapa permasalahan yang menjadi hambatan berjalannya program Pekka di lapang, seperti:

- o Masih terdapat anggota yang tidak membayar angsuran dengan tepat dan menunggu ditagih pengurus kelompok. Sebagian pengurus juga masih kurang dapat bertindak tegas .
- o Kelompok belum mampu mengembangkan usaha besar, masih terjebak dengan usaha-usaha kecil.
- o Sistem dan mekanisme kontrol yang jelas dan transparan belum mampu dikembangkan di kelompok, sehingga jika terjadi penyimpangan di kelompok akan mudah diketahui.
- o Program Pekka dianggap cukup berhasil oleh pihak luar, hal tersebut menyebabkan banyaknya pihak luar yang ingin ikut campur mengatur dan menitipkan berbagai kegiatan dalam kelompok Pekka.
- o Dana BLM belum mampu dikelola untuk mengembangkan kegiatan yang lebih punya prospek bisnis ke depan.
- o Masih rendahnya jiwa wirausaha dan ketrampilan teknis usaha anggota Pekka.
- o Keswadayaan kelompok perlu ditingkatkan sehingga ketergantungan kelompok dengan pihak luar berkurang, dan lebih menggali potensi-potensi diri.
- o Kualitas pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan dan daya kritis anggota perlu ditingkatkan dengan mengisi materi-materi pertemuan yang dapat memberi motivasi anggota untuk melakukan perubahan.

### **5.5. NTB – Nusa Tenggara Barat**

Program Pekka di NTB dilaksanakan mulai bulan April 2003 di 2 kabupaten yaitu Lombok Barat (kecamatan Gerung dan Lingsar) dan Lombok Tengah (kecamatan Jonggat). NTB merupakan salah satu wilayah miskin di Indonesia dimana banyak penduduknya hidup memprihatinkan, di antara mereka

adalah perempuan kepala keluarga karena berbagai sebab seperti meninggal, cerai, ditinggal merantau suaminya, atau lajang.

- ***Anggota Kelompok Pekka***

Di NTB saat ini telah terbentuk 18 kelompok di 18 desa di 3 kecamatan dan di 2 kabupaten dengan total anggota 490 orang. Sebagian besar dari anggota kelompok di NTB menjadi kepala keluarga karena cerai (44%), pendidikan mayoritas tidak sekolah (61%) dan tamat SD (33%), berumur kurang dari 40 tahun (59%), mata pencaharian dibidang jasa (67%) dengan jumlah tanggungan 0-1 (59%).

Apabila dibandingkan data NTB dengan wilayah lainnya, memang terlihat bahwa pendidikan anggota kelompok pekka terendah. Hal ini terkait dengan kondisi ekonomi yang terbatas menyebabkan ketidakmampuan mereka mendapatkan pendidikan yang memadai. Lebih jauh pendidikan yang terbatas ini menyebabkan mereka tidak dapat bersaing dalam pekerjaan dan akhirnya sebagian besar (67%) bekerja di bidang jasa seperti buruh genteng, batu bata, pecah batu dan peladen (pembantu tukang pada buruh bangunan). Keempat jenis pekerjaan jasa ini cukup berat dan di wilayah lain pada umumnya dilakukan oleh laki-laki. Namun mengingat kondisi ekonomi yang terdesak, perempuan kepala keluarga terpaksa melakukan pekerjaan ini. Pekerjaan peladen biasanya dilakukan oleh pekka yang berusia muda dan sebagian dari mereka masih lajang. Mereka bekerja keras untuk membiayai orangtua atau adiknya karena orangtua mereka meninggal atau sudah tua dan tidak mampu bekerja lagi.

Di NTB kawin cerai cukup tinggi dimana sebagian besar dari mereka berusia muda yaitu dibawah 30 tahun dengan tanggungan 0-1 anak. Kawin cerai di NTB ini memang sangat menonjol dimana dengan mudahnya laki-laki menceraikan istri hanya karena alasan bosan. Data lain yang mendukung kenyataan ini misalnya hasil penelitian Kasmiyati tahun 1990, dimana sebagian besar responden menceraikan istri karena bosan. Setelah bercerai, pihak perempuan biasanya tidak mendapatkan harta gono gini, walaupun sang istri ikut berkontribusi pada harta mereka berdua. Biasanya setelah bercerai istri hanya membawa peralatan makan atau dapur seperti piring, gelas dan sendok. Mereka merasa segan untuk membawa barang berharga lainnya. Apalagi masalah rumah atau barang mewah seperti TV atau tape recorder, tidak pernah perempuan menuntut pada suaminya, dan membiarkan suami bersama istri barunya memilikinya. Perempuan NTB hanya bisa menerima dan merasa itu memang bagian dari takdir dia sebagai perempuan. Mereka berharap pada saat anaknya dewasa nanti yang akan mendapatkan warisan tersebut dari ayahnya.

Fenomena kawin cerai dan tidak berdayanya perempuan atas harta gono gini menjadi topik yang diangkat dalam pendampingan program Pekka. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka sebenarnya mempunyai hak dan dapat menuntut haknya. Namun tidaklah mudah untuk mengubah keyakinan yang sudah melembaga secara turun menurun. Secara rutin para pendamping lapang mendiskusikan isu ini dalam pertemuan rutin ataupun kunjungan dari rumah ke rumah anggota kelompok, agar mereka semakin terbuka pikirannya.

- ***Pendampingan***

Pendampingan kepada kelompok merupakan hal utama dalam program Pekka. Karena pendampingan melalui bimbingan yang intensif terhadap anggota kelompok merupakan hal yang utama untuk



terwujudnya pemberdayaan bagi perempuan. Pendampingan yang dilakukan baik melalui pertemuan rutin bulanan ataupun kunjungan individu dari rumah ke rumah. Berbagai kegiatan yang dilakukan dalam pertemuan rutin ini seperti transaksi simpan pinjam, belajar baca tulis, pengajian, wirid, belajar agama. Frekuensi pertemuan kelompok bervariasi dari 1-4 kali sebulan tergantung pada kesepakatan kelompok. Sejauh ini kehadiran anggota ke kelompok cukup tinggi yaitu lebih dari 90%.

Selama pertemuan rutin dilakukan kegiatan dengan memanfaatkan nara sumber yang ada, misalnya meminta kader atau pengurus yang melek huruf untuk mengajar anggota yang buta huruf, untuk materi keagamaan meminta ustad atau ustadzah setempat memberikan ceramah. Selain itu juga dilakukan diskusi informal sekitar permasalahan yang dihadapi oleh para pekka. Topik yang dipilih dalam diskusi seringkali yang sederhana namun sesuai dengan kondisi mereka misalnya kesehatan perempuan, hak perempuan terhadap gono gini, kawin cerai, rukun sholat atau cara bersuci.

Pendampingan juga diberikan kepada individu dengan cara kunjungan ke rumah anggota untuk melihat dari dekat usaha yang dilakukan, kondisi keluarga, anak, atau tempat tinggal mereka. Kunjungan individu ini sangat efektif dalam menumbuhkan keakraban antara PL dan anggota kelompok. Hubungan yang akrab ini penting untuk membuat keterbukaan antara PL dan anggota, sehingga memudahkan bagi PL untuk melakukan komunikasi sampai kepada masalah pribadi. Karena pekka umumnya adalah orang yang jarang berhubungan dengan orang lain sehingga kurang terbuka, sedangkan untuk dapat mengetahui kehidupan pribadi yaitu pengalaman perkawinan perlu keterbukaan dan keberanian ekstra.

Pendampingan lain yang diberikan yaitu untuk para pengurus kelompok. Secara rutin baik melalui pertemuan rutin bulanan ataupun pertemuan khusus pengurus, PL membimbing pengurus tentang administrasi kelompok dan cara memimpin kelompok. Dalam hal administrasi mencakup ketrampilan pengurus dalam pembukuan keuangan kelompok, tertib administrasi berorganisasi seperti membuat notulensi dan catatan lainnya. Dalam kesempatan ini pengurus belajar memimpin kelompok mulai dari hal sederhana seperti membuka dan menutup pertemuan serta memimpin diskusi. Sejauh ini sekitar 65% pengurus di wilayah NTB telah mampu memimpin kelompoknya dan pertemuan rutin tetap berjalan walaupun PL tidak datang atau terlambat datang.

Mengingat sebagian anggota kelompok memiliki usaha kecil, maka PL juga melakukan pendampingan usaha. Bimbingan yang diberikan antara lain memberikan informasi yang diperlukan oleh anggota misalnya tentang cara menghitung biaya produksi, keuntungan, penentuan harga jual, cara mendapatkan pasar atau mencari informasi kepada pihak lain yang terkait. Sejauh ini belum ada usaha kelompok, tetapi sebagian kelompok merencanakan usaha bersama ini apabila mereka mendapatkan dana BLM. Karena untuk usaha bersama mereka memerlukan dana cukup besar, sementara dana swadaya yang terkumpul belum mencukupi.

Karena pendampingan yang diberikan oleh PL ini lebih bersifat sementara, maka diharapkan suatu saat kelompok akan mampu mengelola kegiatan tanpa dampingan intensif oleh PL. Hubungan dengan PL lebih kepada hubungan kemitraan atau konsultansi. Untuk tujuan ini, kaderisasi disiapkan oleh Seknas yaitu dengan cara memilih anggota kelompok yang potensial untuk dilatih menjadi fasilitator lokal. Kaderisasi yang telah ada di wilayah NTB yaitu 4 orang per kecamatan yang terdiri dari 2 kader lokal dan 2 kader LKM, sehingga total terdapat 12 orang kader. Secara bertahap kader ini diajak oleh PL untuk melaksanakan tugas sebagai fasilitator kelompok. Mereka diajak PL melakukan kunjungan ke

pertemuan rutin, membenahi pembukuan keuangan kelompok, sosialisasi pekka untuk mencari anggota baru ke dusun lain ataupun sosialisasi pekka untuk pembentukan kelompok baru.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pengurus dan anggota kelompok beberapa pelatihan diberikan untuk mereka. Pelatihan yang diberikan di wilayah ini adalah pelatihan visi misi dan motivasi berkelompok, pelatihan kepemimpinan dan manajemen kelompok, pelatihan pengorganisasian masyarakat bagi kader lokal dan pelatihan kader LKM.

Dari pelatihan visi misi dan motivasi berkelompok yang diberikan telah memberikan dampak yang positif bagi anggota kelompok, dan semakin memahami manfaat berkelompok yang selanjutnya meningkatkan motivasi mereka dalam mengikuti kegiatan kelompok. Sedangkan pelatihan kepemimpinan dan administrasi kelompok telah meningkatkan kemampuan pengurus dalam memimpin, mengelola kelompoknya, dan melakukan pembukuan keuangan kelompok.

Pelatihan kader lokal dan kader LKM yang dilaksanakan di Yogyakarta telah menumbuhkan semangat peserta lainnya dimana mereka merasa bangga teman kelompoknya dikirim ke luar wilayah mengikuti pelatihan dan memiliki pengalaman naik pesawat serta tinggal di hotel. Sementara bagi kader yang mengikuti pelatihan telah dapat menambah percaya diri mereka karena mendapat kepercayaan mewakili kelompoknya dan mendapat pengetahuan serta pengalaman yang berharga.

- ***Pengembangan Modal Swadaya***

Modal swadaya kelompok yang berasal dari simpanan anggota di 3 kecamatan saat ini telah terkumpul Rp. 8,891,950. Dana swadaya ini berasal dari simpanan pokok simpanan wajib, simpanan sukarela, dan simpanan khusus. Untuk wilayah NTB simpanan wajib dibayarkan setiap bulan secara tertib, namun simpanan sukarela dan khusus kurang berkembang karena pendapatan mereka terbatas sehingga tidak cukup uang untuk menabung. Dana sejumlah itu telah dipinjamkan kepada anggota dengan total dana berputar Rp. 21,112,500,-. Perputaran pinjaman lebih dari dua kali simpanan.

Kegiatan simpan pinjam telah dapat membantu anggota kelompok untuk mendapatkan pinjaman. Sebelum ada kelompok, sulit sekali bagi pekka mendapat pinjaman dari orang lain. Dengan kegiatan simpan pinjam di kelompok sangat membantu anggota. Mereka dapat meminjam dengan cepat. Alasan lain yaitu terbebas dari jeratan bank subuh (sebutan lokal bagi rentenir). Sebelum ada kelompok pekka, mereka biasa meminjam ke bank subuh dengan bunga 20-25% per bulan. Pinjaman berkisar antara 20.000-100.000 per orang, digunakan untuk modal usaha, biaya sekolah, kesehatan dan keperluan keluarga lainnya. Jasa pinjaman berkisar antara 1-3% per bulan dengan jatuh tempo 5-10 bulan. Sejauh ini angsuran kelompok berjalan lancar, tidak terjadi tunggakan.

Pada akhir Juli, DIP Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk wilayah NTB telah turun. Kelompok dengan bantuan PL mulai mempersiapkan pengajuan BLM dan mengurus segala keperluan administrasi BLM. Pada pertengahan September SK PJOK, PJAK dan musyawarah kelompok telah terlaksana. Pada awal Oktober ke tiga kecamatan telah berhasil mencairkan dana BLM hingga tahap II sebesar Rp. 745.930.908 atau 82,88% dari total dana tersedia.

Secara umum kondisi kelompok di NTB adalah sebagai berikut :

- Motivasi anggota kelompok telah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari kehadiran mereka dalam pertemuan rutin kelompok serta keaktifan mereka dalam kegiatan simpan pinjam dan kegiatan kelompok lainnya.
- Rasa percaya diri anggota kelompok telah tumbuh, mereka telah berani untuk bicara dan mengemukakan pendapat. Selain itu mereka tidak malu lagi dengan statusnya sebagai pekka.
- Keberadaan kelompok Pekka telah dianggap oleh aparat setempat yaitu dengan diundangnya pengurus kelompok dalam rapat desa yang membahas program yang akan masuk di desa.
- Pemerintah setempat mulai dari dusun, desa dan camat mendukung kegiatan Pekka dan berjanji akan mengikutsertakan kelompok Pekka dalam program mendatang.
- Pengurus kelompok telah mampu melaksanakan administrasi dan pembukuan keuangan. Peraturan kelompok telah didiskusikan. Pengurus telah mampu menyusun posisi kas, bahkan sebagian dari mereka telah dapat menyusun neraca.

Secara rutin PL di NTB melakukan pertemuan koordinasi di antara mereka, bahkan seringkali lebih dari dari sekali sebulan karena lokasi mereka berdekatan satu sama lain. Komunikasi berjalan dengan baik karena telah terdapat layanan telepon dan HP. PL juga melakukan koordinasi dengan aparat pemerintah mulai dari dusun, desa, kecamatan dan kabupaten. Secara rutin PL bertemu dengan penanggung jawab Pekka di kecamatan pada saat penanda tangan time sheet dan menceritakan perkembangan program Pekka secara rutin. Laporan tertulis dari PL dilakukan setiap 2-3 bulan sekali.

Tantangan yang dihadapi dalam proses pendampingan di NTB adalah :

- Sebagian besar anggota kelompok berpendidikan rendah dan buta huruf, sehingga sulit mencari anggota yang potensial untuk menjadi pengurus. Sebagai akibatnya PL mengalami kesulitan untuk mendampingi administrasi dan pembukuan kelompok serta perlu waktu lama.
- Di NTB banyak jamal (janda Malaysia) yaitu perempuan yang suaminya pergi bekerja ke Malaysia, namun suami kadangkala pulang ke NTB. Karena alasan ini PL seringkali merasa khawatir untuk menerima jamal masuk menjadi anggota kelompok Pekka. PL khawatir suaminya kembali sehingga gugur sebagai anggota kelompok.
- Jumlah anggota kelompok naik turun, karena perubahan status anggota atau karena kecewa ternyata bantuan yang diharapkan tidak turun.

## 5.6. Malut - Maluku Utara

Program Pekka mulai dilaksanakan di Maluku Utara bersamaan dengan NTB yaitu bulan April 2003, di kabupaten Halmahera Utara di 3 kecamatan yaitu Malifut, Kao dan Tobelo. Maluku Utara dipilih sebagai wilayah Pekka karena merupakan salah satu wilayah konflik yang terjadi lima tahun yang lalu antara masyarakat Islam dan Kristen. Konflik ini telah menelan banyak nyawa dan mengakibatkan banyak perempuan menjadi pekka. Konflik telah membuat masyarakat menderita akibat pembumihangusan wilayah yang menyebabkan tidak hanya kehilangan suami tetapi juga rumah, harta kekayaan dan mata pencaharian. Selain itu, pasca kerusuhan meninggalkan luka mendalam dan perasaan saling curiga antara dua kubu yang berkonflik. Kehidupan bermasyarakat tidak seaman dan setentram dulu, dimana di antara tetangga atau desa saling curiga dan waspada. Kondisi ini sangat berbahaya dan mudah memicu timbulnya konflik kembali apabila terdapat kejadian yang merugikan salah satu pihak yang berseteru. Terbukti pada tahun 2003 pada saat bom meletus dan menelan korban salah satu pihak, maka pihak tersebut menuding pihak lain yang melakukannya.

- **Anggota Kelompok Pekka**

Di Maluku Utara hingga tahun 2004 telah terbentuk 22 kelompok dengan total anggota 322 orang terletak di 20 desa di tiga kecamatan yaitu Malifut, Kao dan Tobelo. Secara umum kondisi masyarakat di Maluku Utara memiliki pendidikan SD (70%), sebagian besar menjadi pekka karena suami meninggal (54%) sebagian dari mereka (27%) adalah meninggal karena konflik. Jumlah tanggungan terbesar (70%) antara 1-3 orang dan sebagian besar bekerja di sektor pertanian 48% dan perdagangan 47%.

Kondisi sosial ekonomi ketiga kecamatan memiliki karakteristik yang berbeda. Kecamatan Tobelo merupakan ibukota kabupaten Halmahera Utara, secara ekonomi lebih berkembang dibandingkan kecamatan Kao dan Malifut, memiliki sarana prasarana lebih lengkap seperti jalan, pasar, telepon, transportasi, dan bank. Demikian juga karakteristik masyarakatnya lebih terbuka, berpendidikan lebih tinggi, progresif dan memiliki motivasi yang kuat untuk maju. Sebelum kerusuhan keadaan ekonomi anggota kelompok Pekka nampaknya bukan golongan ekonomi termiskin di wilayahnya. Konflik yang terjadi telah membawa mereka kepada kemiskinan dan menyebabkan mereka harus berusaha dari nol. Namun kondisi ekonomi di kecamatan ini cepat membaik, dunia bisnis bangkit kembali, pasar kembali ramai dan disetiap sudut kota terlihat masyarakat kembali membangun rumahnya. Anggota kelompok Pekka di kecamatan Tobelo umumnya memiliki mata pencaharian berdagang dan bertani. Mereka terlihat aktif dalam melakukan kegiatan kelompoknya. Mereka memiliki motivasi yang tinggi untuk maju dan berkembang. Ditambah pengurus dan kader yang aktif semakin menambah kelompok menjadi lebih dinamis.

Kecamatan terdekat dari Tobelo adalah Kao yang mayoritas penduduknya adalah Kristen. Sewaktu kerusuhan terjadi tidak mengalami kerusakan yang berarti. Rumah tetap tegak berdiri dan sarana prasarana masih terjaga. Namun kondisi ekonomi tidak berkembang seperti Tobelo. Anggota kelompok Pekka di kecamatan ini lebih banyak bekerja di sektor pertanian yaitu menanam cabai, tomat, singkong dan lainnya. Hasilnya mereka jual ke pasar dan kemudian mereka pergunakan uang hasil penjualan ini untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari.

Kecamatan ketiga yaitu Malifut, dimana masyarakatnya merupakan pendatang dari Pulau Makian. Karena adanya ancaman bahaya gunung meletus, pemerintah memindahkan penduduk Pulau Makian ke Malifut. Perpindahan ini sifatnya bedol kecamatan dimana lokasinya mengambil wilayah Kao. Penambangan emas di perbatasan kecamatan Malifut dan Kao merupakan awal petaka konflik di Maluku Utara. Konflikpun tidak terhindarkan dan akhirnya berkembang menjadi isu sara yaitu konflik Islam dan Kristen, karena Malifut berpenduduk Islam sedangkan Kao mayoritas Kristen dan sedikit Islam. Hingga tahun 2004, perkembangan ekonomi belum menggembirakan. Sarana prasarana belum dibangun kembali, gedung sekolah terbatas, listrik, bank dan telepon belum tersedia.

- **Pendampingan**

Pendampingan PL kepada kelompok dilakukan melalui pertemuan rutin bulanan, kunjungan individu ke rumah anggota, pertemuan rutin dengan pengurus ataupun kader. Pertemuan rutin kelompok bervariasi mulai dari 1-4 kali per bulan tergantung kesepakatan di antara mereka. Kehadiran anggota kelompok dalam pertemuan rutin bervariasi, secara rata-rata sekitar 90%. Pada awal program, jumlah anggota kelompok cukup besar namun setelah beberapa bulan program berjalan ternyata bantuan yang mereka tunggu tidak kunjung tiba, mengakibatkan sebagian anggota mengundurkan diri. Terdapat juga

anggota yang diminta mundur oleh pengurus karena tidak tertib mengikuti kegiatan kelompok dan mengganggu kelancaran kegiatan. Sejak terjadinya kerusuhan, masyarakat di Maluku Utara terbiasa menerima bantuan dari berbagai pihak, sehingga mengira setiap program yang masuk akan ada bantuan yang diberikan.

Pertemuan rutin diisi dengan transaksi simpan pinjam, belajar baca tulis, belajar agama, diskusi usaha kelompok atau permasalahan yang dihadapi. Belajar baca tulis diberikan oleh PL dibantu oleh kader dan pengurus yang melek huruf. Pada kesempatan ini pengurus belajar memimpin kelompok, membuka dan menutup acara pertemuan kelompok. Pengurus belajar pembukuan keuangan kelompok dengan bimbingan dari PL. Dalam pendampingan ini PL seringkali dibantu oleh para kader lokal dan kader LKM. Bahkan kader telah mulai melakukan sosialisasi program Pekka untuk mencari anggota baru dan pembentukan kelompok baru.

Pendampingan juga diberikan dari rumah ke rumah anggota. Kunjungan individu efektif untuk menjalin keakraban antara PL dan anggota kelompok sehingga mudah untuk melakukan komunikasi di antara keduanya. Selain itu juga efektif untuk memotivasi anggota dalam berkelompok. Diskusi tentang usaha individu juga terjadi disini, sekaligus PL dapat melihat usaha mereka secara langsung.

Di Maluku Utara, beberapa kelompok telah memiliki usaha bersama. Di Tobelo telah dirintis usaha bersama pembuatan abon ikan dan produknya dipasarkan di supermarket terdekat. Modal usaha ini berasal dari dana swadaya kelompok yaitu dari kegiatan simpan pinjam. Di Kao telah dimulai usaha kebun bersama, terdapat juga kelompok lain yang beternak ayam. Hasil penjualan dari usaha bersama ini digunakan untuk menambah modal kelompok. Pendampingan usaha yang lain misalnya PL menghubungi dinas pertanian setempat untuk meminta bibit seperti vanili dan sayuran. PL membantu kelompok cara menghitung kelayakan usaha, mencari pasar, mencari informasi bahan baku, proses pengolahan bahan.

Kelompok Pekka di Maluku Utara memiliki fungsi yang cukup penting dalam proses rekonsiliasi antara kelompok yang berseteru yaitu Islam dan Kristen. Pada awalnya sulit mempertemukan kedua belah pihak dalam satu forum. Namun lambat laun mereka dapat duduk bersama. PL sejak awal mencoba melakukan kegiatan yang memungkinkan kedua belah pihak bertemu dan berinteraksi, misalnya melalui pelatihan, pertemuan rutin, pertemuan selama monitoring, forum wilayah dan forum nasional. Seringkali dalam pelatihan kedua belah pihak mengungkapkan sedihnya perasaan mereka apabila teringat konflik yang telah terjadi, kedua belah pihak menderita dan dirugikan, tidak ada pihak yang menang, bahkan sama-sama kalah. Mereka menyadari kemungkinan ada pihak lain yang mendapat untung dari peristiwa ini. Melalui proses semacam inilah akhirnya timbul kesadaran bahwa mereka hanya merupakan korban dari pihak lain yang memanfaatkan situasi ini.

Kaderisasi di Maluku Utara berjalan dengan baik. Kader lokal dan kader LKM yang telah dibekali pengetahuan pengorganisasian masyarakat telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Mereka mengunjungi kelompok pekka pada saat pertemuan rutin bulanan dan memberikan bimbingan kepada pengurus tentang pembenahan pembukuan keuangan kelompok. Kader juga telah melakukan sosialisasi program Pekka ke desa terdekat untuk pembentukan kelompok baru.

Dalam pendampingan ini, PL memberikan pelatihan-pelatihan. Pelatihan yang diberikan adalah pelatihan visi misi dan motivasi berkelompok, pelatihan kepemimpinan dan manajemen kelompok, pelatihan pengorganisasian masyarakat bagi kader lokal dan pelatihan kader LKM.

Pelatihan visi misi yang diberikan telah berdampak positif bagi anggota kelompok, dimana mereka semakin memahami manfaat berkelompok yang selanjutnya meningkatkan motivasi mereka dalam mengikuti kegiatan kelompok. Sedangkan pelatihan kepemimpinan dan administrasi kelompok telah meningkatkan kemampuan pengurus dalam memimpin, mengelola kelompoknya, dan melakukan pembukuan keuangan kelompok. Pelatihan kader lokal dan LKM menumbuhkan motivasi anggota kelompok untuk memajukan kegiatan kelompoknya.

- ***Pengembangan Modal Swadaya***

Modal swadaya kelompok di tiga kecamatan di Maluku Utara telah terkumpul Rp. 21.959.500. Dana ini berasal dari simpanan pokok, wajib, sukarela, dan khusus. Lebih dari 50% berasal dari simpanan sukarela dan khusus. Terutama di kecamatan Tobelo anggota kelompok rajin menabung simpanan sukarela dan khusus, karena mereka ingin modal kelompoknya cepat besar dan dipinjamkan ke anggota. Alasan lain juga karena awalnya anggota kelompok di Tobelo ini tergolong masyarakat yang ekonominya bukan termiskin, hanya karena konflik mereka menjadi kelompok miskin. Semangat mereka untuk maju dan berkembang juga besar, hal ini tercermin dari keaktifan dan motivasi mereka dalam mengikuti kegiatan kelompok.

Dana swadaya telah dipinjamkan kepada anggota kelompok untuk berbagai keperluan seperti menambah modal usaha, biaya sekolah anak, kesehatan dan keperluan keluarga lainnya. Besar pinjaman berkisar antara Rp. 20.000- Rp. 300.000. Hingga saat ini total dana yang berputar sebesar Rp. 20.625.000, dari total dana simpanan Rp. 21.959.500. Simpanan anggota kelompok masih lebih besar dari pinjaman, hal ini terjadi karena sebagian anggota kelompok hanya menyimpan tidak meminjam dengan alasan mereka belum memerlukan dan sebagian lainnya perlu dana besar tetapi dana kelompok belum dapat memenuhi keperlunya.

Kelompok di Maluku Utara mulai bulan Agustus 2004 mempersiapkan usulan BLM misalnya melakukan sosialisasi BLM, pemilihan tim verifikasi, musyawarah kelompok, mengurus SK PJOK dan PJAK. Hingga pertengahan September, SK PJOK dan PJAK masih dalam proses. Namun hingga awal Oktober pengajuan usulan BLM ke KPKN gagal untuk dicairkan. KPKN ternyata belum mendapat informasi tentang adanya program ini. Mereka baru tahu adanya SE DJA berkaitan dengan dana BLM dari PL. Selanjutnya mereka juga bersikukuh bahwa usulan harus dilakukan bersama-sama 3 kecamatan dan jika hanya memungkinkan untuk pencairan tahap 1 saja maka mereka tidak bersedia mencairkan dana tersebut.

Secara umum kondisi kelompok di Maluku Utara adalah sebagai berikut :

- Motivasi anggota kelompok semakin meningkat, hal ini terlihat dari kehadiran anggota dalam pertemuan rutin kelompok serta keaktifan mereka dalam kegiatan simpan pinjam dan kegiatan kelompok lainnya.
- Rasa percaya diri anggota kelompok telah tumbuh, mereka telah berani untuk bicara dan mengemukakan pendapat.
- Keberadaan kelompok Pekka diterima dengan baik oleh aparat setempat dan telah mendapat dukungan positif. Apalagi setelah forwil, aparat setempat lebih memperhatikan kelompok Pekka dan menjanjikan akan mengikutsertakan kelompok Pekka pada program kecamatan di masa mendatang.

- Kemampuan pengurus mulai meningkat dalam melaksanakan administrasi dan pembukuan keuangan, walaupun masih sebatas posisi kas dan belum sampai pada neraca.
- Peraturan kelompok telah didiskusikan dan diterapkan di kelompok.
- Sosialisasi program Pekka dan pembentukan kelompok tetap dilakukan.

Pertemuan antar PL sebulan sekali terlaksana namun agak sulit menetapkan waktu mengingat lokasi agak jauh dan sarana komunikasi seperti telepon tidak ada sehingga sulit melakukan koordinasi di antara mereka. Koordinasi PL dan aparat pemerintah dilaksanakan sebulan sekali. PL secara lisan melaporkan perkembangan program Pekka saat penandatanganan time sheet.

Tantangan yang dihadapi dalam proses pendampingan di Maluku Utara adalah :

- Sebagian besar anggota kelompok berpendidikan rendah dan buta huruf, sehingga sulit mencari anggota yang potensial untuk menjadi pengurus. Sebagai akibatnya PL memerlukan waktu lama untuk membimbing administrasi dan pembukuan kelompok.
- Jumlah anggota kelompok naik turun. Hal ini terutama terjadi saat pendataan ulang anggota kelompok di satu desa, ternyata mereka pengungsi konflik yang telah menetap di Ternate dan pulang ke Tobelo hanya untuk kepentingan mendapatkan penggantian uang pengungsi. Di kelompok lain terjadi pengurangan anggota yang memiliki motivasi hanya untuk mendapat bantuan.
- Pergantian PL yang terjadi di Maluku Utara sedikit banyak mengganggu kelancaran proses pendampingan karena program Pekka merupakan proses yang berkelanjutan, sedangkan PL pengganti memiliki waktu yang terbatas untuk mengikuti program Pekka secara keseluruhan. Sehingga transfer pengetahuan kepada PL baru tidak optimal.

## V. ANALISA PENCAPAIAN TUJUAN

Secara umum program ini bertujuan untuk memperkuat perempuan kepala keluarga agar memiliki akses dan kontrol terhadap sumberdaya yang ada, memiliki posisi dan status sosial yang setara dengan anggota masyarakat lain, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan di berbagai tingkatan. Tujuan ini sangat ideal yang hanya dapat dicapai dengan proses jangka panjang dan perubahan struktural kehidupan sosial politik di negara ini. Namun demikian tiga tahun pertama pelaksanaan program ini merupakan langkah awal dan pembuka jalan bagi pekka mencapai tujuan tersebut. Paling tidak ada lima pintu yang telah mulai terbuka dari proses selama tiga tahun tersebut.

### ○ Pertama, pintu menuju kesejahteraan.

Hal ini dapat dilihat dengan tumbuh dan berkembangnya berbagai usaha kecil dan mikro yang ditekuni oleh para anggota pekka. Meskipun sebagian besar anggota kelompok pekka memang telah bekerja baik sebagai buruh maupun dalam sektor perdagangan dan jasa sebelum ada program pekka, namun program ini telah berkontribusi dalam tahapan pengembangannya. Sebagian kecil bahkan memang memulai kegiatan ekonomi setelah program ini ada. Paling tidak melalui pengembangan kegiatan ekonomi yang mereka rintis, mereka telah mampu meningkatkan pendapatan keluarga rata-rata 10-50%. Dibutuhkan studi kuantitatif dan mendalam untuk mengetahui hal ini dengan lebih mendalam. Selain itu, melalui kegiatan simpan pinjam yang dikembangkan dalam kelompoknya, mereka juga telah mempunyai tempat meminjam dengan bunga memadai ketika harus membayar sekolah anak, berobat ketika sakit, bahkan untuk membeli beras. Mereka terhindar dari rentenir yang selama ini membuat kehidupan ekonomi mereka menjadi lebih sulit, "gali lobang tutup lobang" terilit hutang. Ada juga

kelompok yang selama ini memburuh mencoba menjadi pengusaha sendiri secara berkelompok, misalnya usaha persawahan di Jawa Barat, usaha emping melinjo di Aceh, dan usaha tenun di NTT, usaha hasil perkebunan di Buton. Namun demikian, hasil ini belum optimal. Masih banyak hal yang harus dikerjakan untuk memberdayakan ekonomi mereka misalnya persoalan pasar dan diversifikasi usaha. Perkembangan ekonomi mereka juga akan membantu secara optimal persoalan pendidikan anak-anak, kesehatan dan perumahan yang mereka hadapi yang masih sedikit sekali tersentuh dari program ini.

o **Kedua, pintu akses.**

Akses terhadap sumberdaya yang selama ini sangat tertutup bagi mereka mulai terbuka secara perlahan. Dimulai dengan penggalangan sumberdaya mereka sendiri melalui kegiatan simpan pinjam mereka belajar mengelola sumberdaya yang lebih besar seperti dana BLM. Sebagian besar anggota kelompok menyatakan tidak pernah menjadi penerima manfaat langsung program-program yang ada di wilayahnya selama ini. Akses berbagai pelatihan, informasi, dan BLM yang diberikan melalui program ini merupakan hal baru bagi mereka pada umumnya. Selain itu, setelah terorganisir dalam kelompok dengan identitas sendiri, mereka juga mulai dikenali oleh pemerintah lokal dan masyarakat sekitarnya. Sebagai dampaknya, mereka mulai dijadikan penerima manfaat beberapa program lain seperti program beras murah, PKK, dan PPK meskipun masih terbatas. Misalnya di NTT kelompok pekka menjadi pengelola program beras murah yang ada di sana. Akses terhadap berbagai sumberdaya lain di luar program pekka baik sumberdaya ekonomi maupun sumberdaya lainnya memang belum optimal mengingat terbatasnya kapasitas mereka untuk mengelola sumberdaya tersebut.

o **Ketiga, pintu partisipasi**

Berpartisipasi dalam setiap tahapan kegiatan dalam kelompok dan dalam masyarakat merupakan hal penting yang juga telah dicapai oleh anggota kelompok pekka melalui program ini. Dimulai dari kegiatan dalam kelompok mereka secara aktif mendiskusikan, merencanakan, memutuskan dan melaksanakan berbagai kesepakatan dan kegiatan untuk kepentingan mereka sendiri. Dalam mengakses BLM semua anggota kelompok terlibat dalam menentukan alokasi budget dan proses pengembangan usulannya. Sebagian kecil mereka juga mulai masuk ke lingkungan yang lebih luas dalam masyarakat. Di beberapa wilayah kelompok mulai diajak dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek yang ada di wilayah tersebut. Misalnya di Jawa Barat kelompok pekka diminta konsultasinya dalam menentukan alokasi budget untuk program pemberdayaan perempuan di wilayah ini.

o **Keempat, pintu kesadaran kritis**

Membangun kesadaran kritis anggota pekka terhadap posisi, kondisi, hak dan kewajiban mereka sebagai manusia dan warga negara setara dengan lainnya merupakan hal tersulit yang dilakukan selama ini. Nilai-nilai sosial budaya yang didominasi oleh ideologi patriarchy menjadi penghambat utama dalam upaya membuka wawasan mereka akan persoalan yang mereka hadapi, penyebabnya, dan hak mereka. Guna mengantisipasi "shok budaya" yang mungkin muncul, maka proses ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan bertahap melalui berbagai pelatihan yang dilakukan dan diskusi dalam pertemuan kelompok mereka. Sejauh ini sebagian besar anggota kelompok telah cukup sadar bahwa persoalan yang mereka hadapi tidak berdiri sendiri namun terkait dengan berbagai persoalan dan aspek kehidupan lain yang lebih luas. Selain itu mereka juga mulai sadar bahwa hanya mereka lah yang dapat mengubah nasib mereka sendiri, bukan orang lain. Dengan demikian mereka mulai mau berusaha dan mengembangkan keswadayaan sendiri. Selain itu mereka juga sadar bahwa persoalan yang mereka hadapi hanya dapat diselesaikan jika mereka bersatu, tidak berdiri sendiri. Untuk wilayah konflik seperti Maluku Utara, kesadaran untuk mengupayakan kelompok mereka menjadi pelopor



rekonsiliasi antar dua kelompok masyarakat yang berbeda merupakan satu kemajuan yang sangat berarti bagi perdamaian di daerah ini.

o **Kelima, pintu kontrol terhadap kehidupan sendiri dan kehidupan sosial politiknya**

Tentu saja untuk sampai pada tahapan mereka mampu mempunyai kontrol penuh terhadap kehidupan pribadi dan sosial politiknya, masih sangat jauh dari pencapaian. Banyak faktor yang masih harus disoal dan diupayakan berubah, terutama konstruksi nilai budaya dan kehidupan sosial politik di dalam masyarakat. Namun demikian tahapan ke arah tersebut telah pula dilalui oleh kelompok selama pelaksanaan program ini. Misalnya, mereka belajar untuk menjadi pemimpin bagi diri, keluarga dan dalam kelompoknya. Mereka berlatih mengambil berbagai keputusan baik secara sendiri maupun berkelompok. Mereka juga belajar berorganisasi dengan menerapkan berbagai prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan. Terlihat perkembangan yang cukup signifikan dalam hal kemampuan anggota kelompok menentukan arah kelompok dan mengambil keputusan bagi kepentingan mereka sendiri. Mereka juga telah membuka kesepakatan-kesepakatan tanpa campur tangan orang lain. Dalam hal menghadapi persoalan, mereka juga telah sanggup bertanggungjawab dan menyelesaikan persoalan secara bersama. Misalnya dalam kegiatan simpan pinjam dimana terjadi penunggakan oleh anggota lain, mereka semua bersedia bertanggungjawab dengan sistem tanggung renteng. Namun demikian, di beberapa wilayah kehidupan mereka juga masih sangat dikontrol oleh pihak keluarga lain bahkan oleh tokoh lokal. Misalnya di Buton, masih ada anggota kelompok yang tidak berani keluar desa untuk mengikuti pelatihan dan pertemuan di tingkat nasional karena tidak direstui oleh kepala desanya.

Hampir semua tujuan khusus program ini telah dapat dicapai dengan baik.

o **Tujuan khusus pertama memfasilitasi perempuan kepala keluarga untuk mengorganisir dirinya.**

Kegiatan untuk mencapai tujuan ini telah dapat dilakukan sepenuhnya meskipun menghadapi beberapa kendala pada tahap awalnya. Hingga laporan ini dibuat telah terbentuk 198 kelompok pekka yang merupakan basis organisasi rakyat yang dipimpin oleh kalangan mereka sendiri. Dalam kelompok ini mereka belajar berorganisasi, memimpin, dan mengembangkan berbagai potensi yang mereka miliki. Organisasi ini juga menjadi tempat untuk mereka berlatih dan saling belajar, serta saling menguatkan. Prinsip keswadayaan, kesetaraan dan demokrasi telah dijadikan dasar mereka dalam berorganisasi. Mereka juga mulai merintis jaringan organisasi mereka agar kekuatan yang terbangun menjadi lebih besar dan berdampak lebih luas. Melalui forum-forum wilayah yang telah mulai dirintis, mereka telah memulai sebuah upaya menjembatani berbagai hambatan dan perbedaan bagi mereka selama ini untuk mengatasi kemiskinan dan keterkucilan.

o **Tujuan khusus kedua memfasilitasi perempuan kepala keluarga untuk mengakses berbagai sumberdaya.**

Hal ini juga telah dapat dilaksanakan meskipun dengan berbagai hambatan. Berbagai akses seperti pelatihan, informasi dan bahkan dana hibah dalam BLM telah mereka rasakan. Hingga saat ini telah 279 pelatihan visi misi dan motivasi berkelompok yang dilakukan dengan jumlah anggota yang menjadi partisipan sebanyak 6,531 orang, 68 pelatihan kepemimpinan dengan 611 orang peserta, 16 pelatihan mekanisme BLM dengan 371 orang peserta. Sementara itu hingga awal Oktober sudah berhasil dicairkan Rp. 5.365.911.194,-. Dana tersebut sebagian besar telah diputarkan menjadi modal kelompok kegiatan simpan pinjam mereka dan selebihnya untuk pendidikan anak-anak pekka, makanan sehat dan sarana prasarana kelompok. Hal ini sangatlah luar biasa mengingat selama ini mereka hampir

tidak pernah mendapatkan bantuan langsung seperti itu. Di Aceh bahkan cukup banyak janda korban konflik yang tidak pernah mendapatkan hak mereka berupa kompensasi dari pemerintah.

Selain itu, kelompok pekka juga sudah difasilitasi untuk mempunyai akses langsung dengan berbagai fihak yang mungkin dapat memperjuangkan nasib mereka menjadi lebih baik seperti pemerintah lokal, DPRD, BPD, organisasi dan lembaga non pemerintah seperti KOMNAS Perempuan dan LSM lain di tingkat lokal maupun nasional. Melalui kegiatan dialog dan forum wilayah dan nasional, mereka memperkenalkan diri dan identitasnya sehingga dapat membuka akses lebih lanjut pada berbagai fihak tersebut.

o **Tujuan khusus ketiga memfasilitasi perempuan kepala keluarga untuk mampu terlibat dalam proses pengambilan keputusan di berbagai tingkatan.**

Upaya ini masih belum dapat dicapai sepenuhnya. Pada saat ini mereka baru sampai pada tahap menumbuhkan keberanian dan meningkatkan kapasitas untuk berdialog dengan pengambil keputusan di tingkat wilayah maupun di tingkat nasional. Dibutuhkan beberapa tahapan lagi sampai mereka mampu terlibat secara langsung dan aktif dalam proses pengambilan keputusan, misalnya dengan duduk dalam lembaga untuk itu di wilayahnya. Kepemimpinan dan kapasitas memahami dan menganalisa berbagai persoalan yang dihadapi secara lebih komprehensif merupakan dua hal penting yang masih harus ditingkatkan oleh mereka. Namun demikian, pintu ke arah tersebut telah terbuka. Sebagian kecil mereka terutama yang memimpin kelompok mulai diakui keberadaannya di tingkat lokal dan dilibatkan dalam berbagai proses penting di wilayahnya.

Memfasilitasi pengembangan jaringan kelompok, pengembangan forum wilayah, bahkan pengembangan forum nasional merupakan salah satu strategi yang dianggap cukup efektif dalam mengembangkan kepemimpinan di kalangan mereka, mengangkat status mereka dalam masyarakat, memperkenalkan kelompok mereka pada masyarakat, dan mensosialisasikan agenda mereka secara lebih luas. Mereka juga mempergunakan peran media massa untuk mempublikasikan keberadaan gerakan mereka. Pada Fornas di Jakarta, kegiatan pekka diliput oleh puluhan media cetak nasional dan ditayangkan oleh sebuah TV berita yang berkompeten.

o **Tujuan khusus keempat, mendokumentasikan proses dan hasil**

Mendokumentasikan proses pengorganisasian mereka juga merupakan agenda penting dari program ini. Hal ini dikarenakan pekka merupakan pilot program dimana penggalian pelajaran berharga menjadi kunci untuk mengembangkan program ini secara lebih luas. Selain itu, persoalan perempuan kepala keluarga belum pernah diangkat secara komprehensif sehingga menjadi isue marjinal. Oleh karenanya mendokumentasikan dan mempublikasikannya menjadi sangat strategis untuk sosialisasi isue dan membangun kesadaran masyarakat tentang persoalan ini. Ada 10 judul video dokumenter yang telah diproduksi selama program berjalan, sebuah buku kisah pekka yang diterbitkan, 6 serie buletin yang disebar, dan ribuan foto yang telah dibuat. Foto-foto telah dipamerkan diberbagai wilayah dan di kantor Bank Dunia Washington DC. Sementara itu video dan buku juga telah disebarluaskan keberbagai fihak seperti pemerintah, LSM, donor, dan masyarakat luas.

## VI. TANTANGAN DAN REKOMENDASI

Pelaksanaan program ini menghadapi banyak persoalan yang menjadi tantangan serius dalam mencapai tujuannya. Berdasarkan analisa terhadap tantangan tersebut dan pengalaman mengatasinya maka rekomendasi untuk perbaikan dimasa mendatang telah dikembangkan.

## 6.1. Tantangan program

### o Program pemberdayaan vs proyek penanggulangan kemiskinan

Tantangan terbesar dari pelaksanaan program ini adalah tidak sinkronnya konsep program dengan mekanisme pendanaan proyeknya. Sebagai sebuah program pemberdayaan, dibutuhkan fleksibilitas dan waktu tertentu untuk pengalokasian dan administrasi keuangan proyeknya. Selain itu, program pemberdayaan juga membutuhkan tidak hanya indikator kuantitatif dalam targetnya, namun juga kualitatif berkaitan dengan pengembangan aspek sosial manusianya. Namun sebagai sebuah proyek dalam mekanisme birokrasi, pendanaan program ini sangatlah berorientasi pada pendekatan proyek dengan sistem birokrasi yang tidak luwes. Sistem anggaran tahunan yang hampir tidak memungkinkan untuk diubah dalam perjalanannya merupakan hambatan yang kerap muncul. Selain itu, sistem reimbursement dengan keterlambatan sampai mencapai satu tahun dalam pembayarannya menyebabkan program seperti ini hampir tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh lembaga seperti Seknas Pekka.

Bantuan langsung masyarakat (BLM) yang dalam konsep pemberdayaan hanya sebagai alat dan stimulasi untuk penguatan, menjadi tujuan utama dalam konsep proyek di kerangka pemerintah. Sebagai akibatnya penetapan pagu BLM untuk tiap wilayah yang harus dilakukan pada tahap awal proyek tanpa data yang akurat tentang jumlah calon penerima manfaat dan kebutuhan aktual mereka menyebabkan terjadinya mis-alokasi dana BLM di beberapa wilayah, dan rendahnya absorpsi dana BLM tersebut oleh masyarakat.

Tidak jelasnya sistem koordinasi dan aliran informasi dalam birokrasi pemerintah dari pusat ke daerah menyebabkan seringnya terjadi salah informasi dan komunikasi antara pelaksana dengan pihak birokrasi. Tidak jelasnya status dan dana pendampingan proyek ini di mata pemerintah daerah menyebabkan dipersulitnya pelaksanaan program di tingkat lapangan oleh oknum-oknum pemerintah setempat.

### o Kondisi sosial, ekonomi, politik dan kultural

Tantangan lain yang tidak kalah beratnya adalah kondisi ekonomi, sosial, dan kultural dan kultural anggota kelompok pekka di wilayah-wilayah program. Kemiskinan, penderitaan dan trauma yang berkepanjangan menyebabkan sulitnya menumbuhkan kembali motivasi mereka untuk bangkit dan mempergunakan kekuatan yang ada dalam mengatasi berbagai persoalannya. Nilai-nilai budaya yang cenderung menghambat ruang gerak mereka merupakan salah satu kondisi yang cukup sulit untuk diatasi dalam mengorganisir mereka. Ketertinggalan dan keterpinggiran mereka dari sistem yang ada selama ini, menyebabkan mereka tidak mempunyai wawasan dan pengalaman dalam berkelompok. Kerangka proyek adalah uang, yang selama ini selalu diterapkan dalam mengembangkan program di pedesaan telah mengurangi nilai dan motivasi mereka untuk mengorganisir diri dalam konteks pemberdayaan. BLM menjadi tujuan utama dengan tidak mempunyai rasa tanggungjawab untuk mengelola, memutarakan serta mengembalikannya bagi kepentingan masyarakat karena dianggap hibah dari pemerintah sebagaimana lazimnya selama ini.

Di wilayah konflik bersenjata seperti NAD dan wilayah pasca konflik seperti Maluku Utara, atau wilayah pengungsian akibat konflik seperti Buton, tantangan terberatnya adalah mempergunakan program ini sebagai salah satu alternatif membangun perdamaian dan kehidupan lebih baik bagi mereka, dan mengatasi trauma dan ketakutan yang mendera dan menghantui mereka. Rasa curiga antar satu kelompok masyarakat yang bertikai juga membuat proses pengorganisasian terhambat dalam hal ini.

Tingkat pendidikan yang sangat rendah bahkan cukup banyak yang buta huruf, kesibukan mencari nafkah, dan keterkucilan di medan yang sulit dijangkau, merupakan aspek lainnya yang mempengaruhi kualitas pendampingan yang dapat dilakukan. Dibutuhkan upaya yang sangat serius untuk meningkatkan kapasitas mereka agar mampu setara dengan anggota masyarakat lainnya. Hidup dalam situasi keterbelakangan dalam waktu lama menyebabkan mereka sangat sulit untuk mencerna berbagai informasi dan proses pembelajaran yang dilakukan bersama mereka.

#### o **Kapasitas organisasi pelaksana**

Dari segi organisasi pelaksana program, tantangan juga muncul terutama dalam hal kapasitas mengelola dana proyek dengan sistem yang diberlakukan oleh pemerintah. Seknas dan tim PL memiliki pengalaman yang tidak memadai dalam pengelolaan proyek dengan pemerintah dan dalam bekerjasama dengan birokrasi pemerintah. Selain itu, sebagian besar PL merupakan orang-orang yang belum mempunyai pengalaman lapangan yang memadai sehingga pada tahap awal banyak kesulitan yang dihadapi di lapangan. Sistem komunikasi baik karena infrastruktur yang tidak memadai maupun karena keterbatasan kemampuan personal dalam hal ini, juga menjadi tantangan yang cukup serius dalam pelaksanaan program selama ini. Kerap terjadi kesalahpahaman dalam manajemen program karena kurang komunikasi. Lemahnya kemampuan pelaksanaan program dalam mengembangkan data base merupakan tantangan yang cukup berpengaruh dalam kinerja program selama ini.

### 6.1. Rekomendasi

Jika program ini akan dikembangkan secara lebih luas dan mendalam maka dibutuhkan perubahan-perubahan mendasar sebagai rekomendasi dari pelajaran berharga selama ini.

- o Sistem pendanaan program seperti ini haruslah ke luar dari kerangka proyek pada umumnya. Membuat sistem pendanaan rutin dan blok grant yang dapat diakses sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan dengan jangka waktu yang panjang merupakan salah satu rekomendasinya.
- o Komponen BLM harus dibuat sebagai stimulan akhir dari pengembangan kelompok simpan pinjam atau lembaga keuangan mikro jika tahapan pemberdayaan telah memasuki masa pengembangan ekonomi kelompok. Alokasi BLM harus berdasarkan proposal kelompok yang dibuat secara partisipatif dengan analisa sosial dan kebutuhan yang objektif. BLM harus dikampanyekan sebagai dana berputar bukan hibah yang tidak dikembalikan.
- o Untuk mengatasi kendala ekonomi, sosial, politik dan kultural, diperlukan strategi beragam untuk setiap wilayah dengan memfokuskan pada persoalan khusus yang dihadapi. Pendekatan yang dilakukan harus dalam konteks masyarakat tanpa menyeragamkan target yang harus dicapai oleh semua wilayah.
- o Advokasi kebijakan dan kampanye publik secara lebih luas dan terstruktur merupakan hal yang harus dilakukan dalam pengembangan program kedepan guna berkontribusi dalam proses perubahan sosial masyarakat agar tercipta kondisi yang lebih kondusif bagi pekka.
- o Diperlukan alokasi budget yang lebih besar untuk berbagai aktivitas pelatihan, lokakarya, diskusi, dialog, kampanye dan studi banding bagi anggota kelompok agar dapat mengembangkan kegiatannya dalam kondisi yang mereka hadapi.
- o Dibutuhkan pengembangan sistem pendanaan yang berkelanjutan misalnya melalui pembiayaan rutin oleh pemerintah daerah dalam program pembangunannya agar kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan meskipun tanpa dukungan proyek.
- o Dibutuhkan lembaga keuangan mikro yang berada dekat dengan anggota kelompok pekka agar

mereka dapat terus mempunyai akses terhadap sumberdaya ekonomi untuk kebutuhan hidup mereka. Agar LKM ini benar-benar berfihak pada mereka, maka pengembangannya harus dirintis dari kelompok simpan pinjam mereka sendiri.

- o Pengembangan sistem pengelolaan data yang profesional dan dapat diandalkan serta diakses sesuai kebutuhan menjadi rekomendasi penting yang harus diperhatikan mengingat tidak adanya data tentang pekka selama ini dan pentingnya data untuk menentukan berbagai strategi program dan advokasi mereka.